

Buletin

H a b a



Reinterpretasi Nasionalisme Dalam Konteks Kelokalan

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2008

48

5
-
Balai Pelestarian
i Tradisional



Perpustakaan
Sejarah dan

07
B

H a b a

**Informasi Kesejarahan
dan Kenilaitradisional**

**No. 48 Th. VIII
Edisi Juli – September 2008**

PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film
Direktur Tradisi
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Teuku Djuned
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
(Agus Budi Wibowo)
Agung Suryo S
Piet Rusdi

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Netti Darmi
Lizar Andrian

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : info@bksntbandaaceh.info
Website : www.bksntbandaaceh.info

Diterbitkan oleh :
**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh**

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

**Peralatan Pertanian Yang Ramah
Lingkungan**

Wacana

Piet Rusdi

**Aceh Sebagai Daerah Modal Pada
Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-
1949)**

Harvina

**Nasionalisme Para Tokoh Ulama Di
Aceh**

Cut Zahrina

**Membedah Nasionalisme Masyarakat
Aceh Dari Perspektif Agama**

Essi Hermaliza

**Memaknai Nasionalisme dalam Seni
Tari Tradisional Aceh**

Sudirman

**Pendidikan dan Tumbuhnya
Kesadaran Nasionalisme Masyarakat
Aceh**

Titit Lestari

**MoU, Perdamaian dan Reintegrasi:
Meretas Kembali Nasionalisme Di NAD**

Hasbullah

**Reinterpretasi Nasionalisme :
Pergulatan Identitas Etnik Dan
Identitas Kebangsaan Di Aceh**

Pustaka

Manuskrip Tambah Tujuh

Cerita

Puti Baumakkan Kabau

Cover

Seulawah RI-001

Tema Haba No. 49 Kapita Seleкта

PENGANTAR

Redaksi

Apa itu nasionalisme ? Bagi sebagian orang, khususnya generasi muda, mungkin tidak mengerti atau pernah mendengar kata tersebut. Akan tetapi, lain halnya apabila kata tersebut ditanyakan pada generasi yang mengalami masa Kolonial, baik Belanda maupun Jepang. Nasionalisme merupakan roh atau jiwa bagi sebuah Negara. Tanpa nasionalisme Negara tidak akan kokoh berdiri dan dengan mudah dapat diceraiberaikan. Untuk itu, rasa nasionalisme harus terus dipupuk secara berkesinambungan terhadap semua generasi. Apalagi pada masa mendatang tantangan kebangsaan sangatlah rumit dan sulit. Globalisasi dan modernisasi tidak mudah menegakkan rasa nasionalisme, apalagi di saat manusia mengalami “kelaparan”. Untuk itu, beberapa saat yang lalu, Indonesia menguatkan rasa nasionalisme melalui Perayaan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-100 sebagai upaya melestarikan rasa nasionalisme bagi segenap bangsa Indonesia.

Haba 48 kali ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh untuk ikut menggugah dan melestarikan semangat kebangsaan dan nasionalisme melalui kajian sehingga pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga tidak mudah kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tulisan-tulisan yang dirangkum dalam bulletin kali ini diharapkan dapat mereflesikan keberadaan nasionalisme di Aceh dan Sumatra Utara. Selamat membaca semoga bermanfaat bagi kita semua (ABW).

Redaksi

Peralatan Pertanian Yang Ramah Lingkungan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sedikit kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Salah satu kelebihan yang dipunyai manusia ini adalah kapasitas otak yang lebih besar, yang memungkinkan manusia memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tersebut manusia menciptakan benda-benda yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan di bumi.

Bermula dari peralatan yang sangat sederhana, lama kelamaan manusia dapat menciptakan berbagai macam benda. Misalnya, penemuan api dimulai tatkala manusia memukul dua batu hingga dapat menimbulkan percikan api. Demikian pula, penemuan-penemuan lain yang semakin rumit dan canggih.

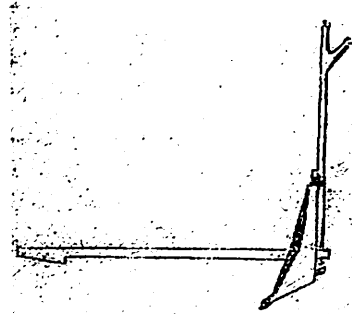
Keberadaan benda-benda ini memang pada akhirnya dapat mempermudah kehidupan manusia. Misalnya, apabila pada zaman dahulu manusia melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah ditempuh dengan waktu yang sangat lama, tetapi pada saat ini perjalanan itu dapat dilakukan dengan singkat. Akan tetapi, kemajuan dalam teknologi yang dihasilkan manusia bukan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa kemajuan teknologi yang bagi manusia itu sendiri malahan dapat menimbulkan masalah, khususnya terhadap lingkungan dimana manusia bertempat tinggal.

Demikian pula teknologi yang masih sederhana seringkali memiliki kearifan. Walaupun tidak canggih, teknologi yang sangat sederhana tidak menimbulkan efek yang sangat merugikan manusia, khususnya terkait dengan lingkungan alam dimana manusia tinggal. Lingkungan tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan bencana, yang dapat merugikan manusia itu sendiri.

Sebenarnya, banyak peralatan tradisional untuk bertani, tetapi pada tulisan ini hanya dibahas beberapa peralatan tersebut.

Adapun peralatan itu dapat dibaca di bawah ini

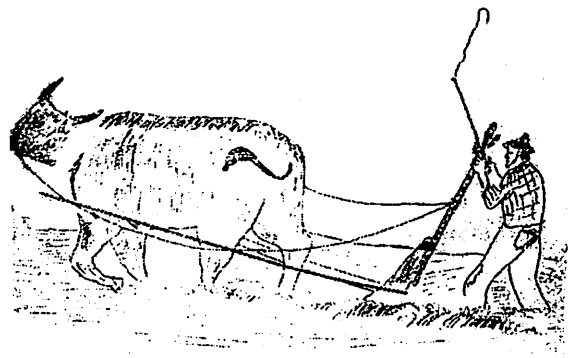
a. Langa



Langa ada juga orang yang menyebut *langai* (lihat gambar No.1).

Langa/langai ini adalah sejenis alat yang dipakai untuk membajak sawah, guna menggemburkan

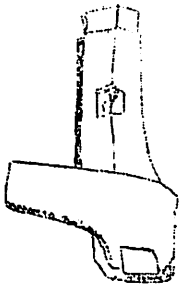
tanah agar mudah dapat ditanamai. *Langa*, biasanya ditarik oleh sapi atau kerbau. Pekerjaan ini (membajak) disebut dengan istilah *me'ue* dan orang yang melakukannya disebut *ureueng me'ue* (orang yang sedang membajak sawah dengan maksud untuk menggemburkan tanah). Biasanya untuk sawah yang agak berawa-rawa dan berair para petani menggunakan kerbau, sedangkan sawah yang terletak di tempat yang agak tinggi dan sedikit airnya dipakai sapi. Namun pada umumnya *langa* ini digunakan untuk membajak tanah yang kering.



Ureueng mu oeu

Langa ini terdiri atas beberapa bagian, yang masing-masing bagian memiliki nama sendiri-sendiri. Tetapi untuk penggunaannya tidak dapat dipisahkan satu

bagian dengan bagian yang lainnya, jadi harus merupakan suatu kesatuan. Diantara bagian-bagian ini, yaitu yang disebut *iboh langai*.

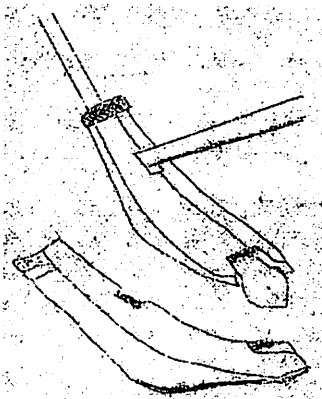


Boh langa/langai



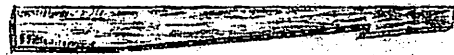
Mata langa

Iboh langai adalah bagian *langa* yang dibuat dari sejenis kayu yang lazim digunakan yaitu yang disebut dalam bahasa Aceh *bak mane*. Pada *boh langa* ini dipasang *mata* yang dibuat dari besi yang gunanya untuk mengorek/mengemburkan tanah ketika *langa* (bajak) ditarik. Mata ini disebut *mata langa* dan merupakan alat yang sangat penting dan harus dibuat dari besi agar tahan dan kuat. Menurut keterangan yang didapat dari informan, ada juga para petani yang mencoba membuat mata langa dari kayu, tetapi daya tahannya hanya sehari atau dua saja. Bentuk *mata langa* ini menyerupai anak panah dalam ukuran yang besar. Bagaimana bentuk sebuah *boh langa* yang telah dirangkaikan dengan *mata langa*.

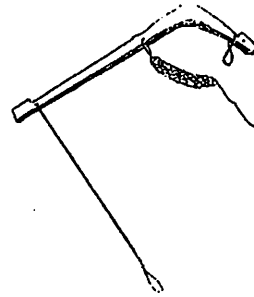


Boh langa dengan mata untuk sawah kering

Bagian lain dari sebuah *langa* yaitu yang disebut *eh langa*. *Eh langa* ini dibuat dari sepotong kayu yang keras, dan biasanya untuk ini dibuat dari kayu. Batang ijuk. Guna dari pada *eh langa* yaitu untuk menghubungkan antara *boh langa* dengan sapi atau kerbau yang menarik bajak/*langa*. *Eh langa* juga merupakan alat yang cukup penting pada sebuah *langa* karena tanpa *eh langa*, sebuah *langa* tidak mungkin untuk digunakan. Panjang dari pada sebuah *eh langa* biasanya sekitar 2½ meter dan lebarnya sekitar 10-12 cm.



Eh langa



yok langa

Bagian lain dari sebuah *langa/langai* yaitu yang disebut *yok (yok langa)*. *Yok* ini dibuat dari kayu dengan bentuk khas disesuaikan agar mudah dipasang pemasangannya yaitu diatas leher sebuah sapi/kerbau, maka oleh karenanya bentuk sebuah *yok* biasanya dibuat sesuai dengan bentuk leher sapi/kerbau. Guna dari pada *yok* ini yaitu untuk menyangkutkan *eh langa*, sehingga kalau sapi bergerak/berjalan maka ia akan dapat menarik *boh langa*. Jadi *yok* ini berfungsi sebagai alat penghubung antara *boh langa* dengan sapi/kerbau sebagai penarik. Selain itu diatas sebuah *boh langa*, masih terdapat peralatan lainnya yaitu sepotong kayu

Info Budaya

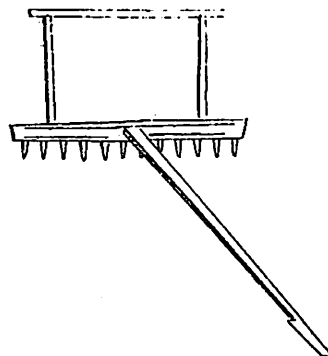
yang dihaluskan/dilicinkan yang ditancapkan padanya, dengan panjang kira-kira 1½ meter. Nama sebutannya *lamat* yang secara harafiah artinya tempat pegang, ada juga yang menyebut dengan nama *neugon* (penekan). Gunanya yaitu sebagai tempat pegangan bagi orang yang membajak dan juga untuk menekan *boh langa*/mata *langa* agar masuk ke dalam tanah supaya tanah dapat baik "termakan"/tergembur. Mungkin itulah sebabnya maka diberi nama *lamat* dan *neugon* (tempat pegang dan penekan). Selain sebagai tempat pegangan dan penekan, *lamat* ini juga berfungsi sebagai alat "pengatur", pekerjaan membajak: yaitu dengan memutar/membelokkan kekanan atau ke kiri dan sebagainya dari pada sebuah *langa* /bajak yang diinginkan oleh seorang petani.

Selain bagian-bagian tersebut di atas, masih terdapat bahan-bahan lain sebagai alat penunjang sebuah *langa*. Diantaranya tali-temali (tali sabuk kelapa atau tali dari *jok/enau*) yang gunanya untuk mengatur jalannya sapi/kerbau. Selain itu juga anyaman rotan sebesar telapak tangan yang gunanya sebagai pengikat dalam menghubungkan bagian *yok* yang di bawah leher sapi/kerbau; sepotong *cambok* (cambuk/cemeti) yang dibuat dari kayu kecil atau sejenis kulit kayu, gunanya untuk mencambuk sapi/kerbau agar mau berjalan/menarik bajak.

b. Creueh

Bila tanah sawah sudah selesai dibajak dengan *langa* (dua sampai tiga kali, berikutnya dilakukan penaburan padi. Dan agar tanah yang telah dibajak tadi menjadi rata, serta juga halus serta juga supaya padi yang telah ditabur itu menjadi rata pada seluruh tanah yang dibajak, maka untuk ini digunakan suatu alat yang dalam bahasa Aceh disebut *creueh*. Bahan untuk membuat alat ini terdiri dari kayu, batang *jok*, bambu dan besi. *Creueh* ini juga terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 1. mata *creueh*, dibuat pada umumnya dari besi bulat yang ujungnya runcing, kadang-kadang ada juga yang dibuat dari kayu yang kuat (*batang jok/enau*). Jumlah mata *creueh* biasanya sekitar 12-15 biji. 2. *eh creueh*, bentuknya sama dengan *eh langa* dan

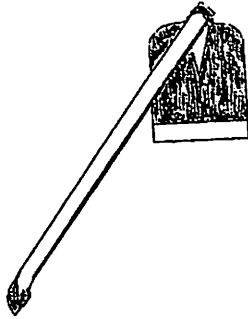
juga dibuat dari *batang jok/enau* yang keras. Gunanya juga untuk dihubungkan pada sapi-sapi yang menarik *creueh* ini (biasanya digunakan dua ekor sapi). 3. *kaye creueh*, yaitu tempat mata *creueh* dipasangkan (bagian bawah), biasanya dibuat dari sejenis kayu yang kuat yang disebut *bak mane* (sejenis pohon kayu yang biasanya digunakan untuk tiang-tiang rumah Aceh). 4. *tempat mat creueh*, secara harafiah artinya pegangan *creueh*/tempat pegang. 5. *yok creueh*, bahan dan bentuknya sama dengan *yok langa*. 6. *talo jeureubab*, yang dibuat dari anyaman rotan sebagai alat pengikat yang ditempatkan dibawah leher sapi (pengikat leher sapi dan *yok*). *Creueh* ini biasanya digunakan pada sawah kering (sebelum sawah berair) dan seperti telah disebutkan kegunaannya yaitu untuk meratakan tanah dan juga meratakan padi yang telah ditabur.



Creueh

c. Cangkaoy

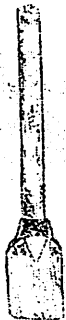
Cangkaoy (cangkul) juga merupakan alat untuk pengolahan tanah yang digunakan di sawah. Bahannya dari kayu dan besi. Kayu sebagai tempat pegang/pegangan dan besi sebagai mata. Kayu pegangan ini pada umumnya juga dibuat dari *bak mane* atau jenis kayu keras lainnya. Pegangan ini dinamakan *gou cangkoy* (gagang cangkul). Besi yang disebut mata *cangkoy*, dibuat dari besi lempengan bekas yang oleh pande (pandai besi) diolah/ditempa menjadi mata *cangkoy*. Kegunaan dari pada alat ini yaitu sebagai alat membuat pematang sawah.



Cangkoy

d. *Lhaam*

Lhaam juga sebagai alat pengolah tanah. Bahannya juga terbuat dari kayu dan besi. Pegangannya dibuat dari kayu keras atau batang *jok yan* disebut *gou Lhaam* dan matanya dibuat dari besi, sama seperti *cangkoy* cuma ukurannya lebih kecil dan bentuknya agak melengkung yang dalam bahasa Aceh disebut *mata Lhaam*. Kegunaan dari pada alat ini, yaitu, untuk menggali tanah, membuat saluran air pematang sawah.



Lham

Apa yang dicontohkan merupakan sebagian dari peralatan pertanian yang ramah lingkungan, khususnya untuk mengolah tanah. Dengan adanya peralatan tradisional yang ramah lingkungan sebenarnya dapat menjaga alam tetap lestari. Akan tetapi, karena seringkali peralatan ini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, maka peralatan ini semakin ditinggalkan. Untuk itu, sangat disayangkan apabila suatu saat ini, kita hanya melihat alat-alat ini di museum.

Sumber Bacaan

Rusdi Sufi. dkk. 1985/1986. *Peralatan Produksi Tradisional dan Perkembangannya Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Depdikbud.

Aceh Sebagai Daerah Modal Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

Oleh : Piet Rusdi

I

Aceh, salah satu provinsi paling Barat di ujung pulau Sumatera. Bila berbicara tentang Aceh, yang terkenal adalah ketaatan masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam dan sejarahnya di masa lampau hingga sejarahnya sekarang ini. Kenapa orang menarik tentang sejarah Aceh ini karena, pertama DI-TII 1953 dan kedua Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 1976 hingga berakhir di meja perundingan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki (\pm 31 tahun). Namun Aceh tidak dikenal pada sejarah masa lampunya saja. Pada tanggal 26 Desember 2004, daerah Aceh mengalami bencana terbesar di abad 20 yaitu gempa dan gelombang tsunami yang telah meluluhlantakkan segala infrastruktur kehidupan masyarakat Aceh sehingga sorotan mata dunia pada waktu itu tertuju ke Aceh. Luar biasa bila dikatakan tidak ada negara di dunia ini yang tidak mengenal daerah Aceh.

Di balik dua peristiwa bersejarah tentang Aceh yang telah disebutkan di atas, maka pada tulisan ini penulis mencoba untuk melihat peristiwa lain tentang sejarah Aceh yang tidak kalah menariknya dan terdapat nilai-nilai patriotisme/kepahlawanan yang dimiliki rakyat Aceh yaitu di masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang mana direbut kembali oleh Belanda pada waktu itu. Peristiwa-peristiwa sekitar revolusi kemerdekaan ini juga sebagai bukti bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II

Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui di Kutaradja (kini Banda Aceh) pada tanggal 21 Agustus 1945; disampaikan oleh para pemuda Aceh (Ghazali Yunus dan kawan-kawan) yang bekerja pada Kantor Berita *Domei* milik Jepang.¹ Namun berita ini secara resmi tersebar luas ke seluruh pelosok Aceh pada tanggal 24 Agustus 1945, setelah adanya telegram yang dikirim dari Bukittinggi (sudah sejak masa Jepang adalah pusat pemerintahan di Sumatera) oleh Jamaluddin Adinegoro selaku Koordinator Komite Nasional Daerah seluruh Sumatera kepada Teuku Nyak Arief seorang tokoh masyarakat Aceh waktu itu (ketua dewan Penasehat Keresidenan Aceh masa Jepang).² Jamaluddin Adinegoro memperoleh berita proklamasi ini dari Mr. Teuku Muhammad Hasan, salah seorang anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) wakil Sumatera³, yang baru kembali dari Jakarta. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan diangkat oleh Ir. Soekarno sebagai wakil pemimpin besar bangsa Indonesia untuk wilayah Sumatera dengan tugas antara lain, menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan menganjurkan kepada para pemimpin rakyat di Sumatera supaya membentuk Lembaga Komite Nasional Indonesia (KNI)

¹ Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45. *Modal Revolusi 45* (Kutaradja : Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960), hlm. 54.

² Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, *Memoir* (Banda Aceh : Alhambra, 1972), hlm. 10.

³ Selain Mr. Teuku Muhammad Hasan, wakil dari Sumatera lainnya sebagai anggota PPKI ialah Dr. Amir dan Mr. Abbas. Lihat T. Ibrahim Alfian, dkk. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh 1945-1949*. (Banda Aceh : Depdikbud, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982), hlm. 21.

di daerah-daerahnya.⁴ Untuk tugas ini Mr. Teuku Muhammad Hasan bersama dengan rekannya tiba di Sumatera pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan sejak inilah berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyebar secara luas di Pulau Sumatera, termasuk di daerah Aceh.

Berita kemerdekaan Indonesia dan anjuran untuk membentuk Komite Nasional daerah mendapat tanggapan antusias dari sejumlah tokoh masyarakat di Aceh. Pada tanggal 25 Agustus para tokoh ini mengadakan suatu pertemuan untuk membicarakan pendirian Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Mereka yang menghadiri pertemuan ini antara lain, Teungku Muhammad Daud Beureueh (Ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA), Sutikno Patmo Sumarto (Ketua Taman Siswa Daerah Aceh), Teuku Nyak Arief (Ketua Dewan Penasehat Keresidenan Aceh masa Jepang, mantan anggota *Volksraad* dan *Uleebalang* Panglima Sagi XXVI *Mukim*), Teuku Muhammad Amin (Sekretaris PUSA), Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (*Uleebalang*, Panglima Sagi XXII *Mukim*), dr. M. Mahjudin (Kepala Kesehatan Rakyat Daerah Aceh dan kepala rumah-rumah sakit seluruh Aceh) dan Ng. Suratno (guru Taman Siswa).⁵ Dalam pertemuan ini dicapai kesepakatan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh dan pada tanggal 28 Agustus 1945, Teuku Nyak Arief ditunjuk sebagai Ketua dan Sutikno Patmo Sumarto sebagai Wakil Ketua, sedang peserta lainnya sebagai anggota komite.⁶

Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Republik Indonesia Soekarno,

mengangkat Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera dan daerah Aceh ditetapkan sebagai salah satu karesidenan di bawah Provinsi Sumatera. Pada tanggal 3 Oktober 1945 Teuku Nyak Arief diangkat sebagai Residen dan Teuku Muhammad Ali Panglima Polem sebagai wakilnya.⁷ Selanjutnya dalam melaksanakan pemerintahan Republik Indonesia di Aceh, Residen Teuku Nyak Arief dibantu oleh Komite Nasional Daerah yang dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang No. 1/1945 23 November 1945. Dan sebagai ketua Komite yang menggantikan Teuku Nyak Arief diangkat Tuanku Mahmud (mantan anggota *Volksraad* mewakili Aceh). Setelah itu disusul pula dengan dikeluarkannya beberapa ketetapan yang berhubungan dengan pembagian wilayah administrasi Karesidenan Aceh, pemilihan kepala-kepala jawatan, asisten residen dan kepala-kepala wilayah (Asisten Wedana sebelumnya bernama *Controleur*) di seluruh daerah Aceh. Dengan demikian maka administrasi pemerintahan Republik Indonesia secara resmi telah mulai digerakkan di daerah Aceh.

Seiring dengan diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tempat-tempat tertentu dilaksanakan pengibaran bendera merah putih, (termasuk pada mobil pribadi Residen Teuku Nyak Arief selalu dikibarkan bendera merah putih kecil dan ini memberi dampak psikologis kepada rakyat dan bangsa Jepang yang pada waktu itu masih berada di Aceh).⁸ setelah terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, untuk lebih meratakan pengibaran bendera merah putih sampai ke pelosok-pelosok juga dalam menyambut peringatan dua bulan Proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 13 Oktober 1945, Komite Nasional

⁴ Selain untuk Sumatera, juga diangkat wakil untuk Borneo, Selebes, Sunda Kecil dan Maluku, masing-masing Ir. Pangeran Mohammad Noer, DR.GS. SY. Ratulangi, Mr. I Gusti Ketut Poedja dan Mr. J. Latuharhari.

⁵ Mr. S. M. Amin, *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hlm. 35. lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah* (Jakarta ; UI Press, 1999), hlm 81-83.

⁶ *Ibid.*, hlm. 82. Lihat juga Ramadhan KH dan Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 80.

⁷ Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Kemerdekaan I*. (Medan : Badan Musyawarah Perjuangan Republik Indonesia, Medan Area, 1967), hlm 12. lihat juga Mardanas Syafwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*. (Jakarta : Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Departemen P dan K, 1975), hlm. 154.

⁸ Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, *op.cit.*, hlm. 11.

Wacana

Indonesia Daerah Aceh, mengeluarkan sebuah maklumat yang mengintruksikan penduduk supaya mengibarkan bendera merah putih pada rumah-rumahnya sejak tanggal 13 hingga 17 Oktober 1945 di seluruh daerah Aceh. Di samping itu sebahagian rakyat ada yang melilitkan kain merah putih di leher, lengan atau di kepalanya sebagai lambang kecintaan mereka kepada Negara Indonesia yang baru merdeka.⁹ Selain itu juga dalam upaya meningkatkan semangat kebangsaan oleh para tokoh pergerakan melontarkan yel-yel dan slogan-slogan perjuangan supaya diikuti oleh rakyat seperti, pekik "merdeka 3x" dengan tangan dikepalkan ke atas yang dianggap sebagai salam perjuangan pada waktu itu dan salam ini juga harus dijawab dengan kata "merdeka", "merdeka 100%", "sekali merdeka tetap merdeka", "enyahlah penjajah", "hidup merdeka atau syahid", beberapa di antara nya ditulis dalam bahasa Inggris, seperti "freedom or death", "once free forever free". Slogan-slogan di atas menghiasi dinding-dinding Meunasah, kantor-kantor, tembok-tembok bangunan, balai-balai pemuda, gerbong-gerbong kereta api, kenderaan umum dan tempat-tempat lainnya.¹⁰

Setelah terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia di Aceh dipikirkan pula pembentukan organisasi-organisasi pertahanan keamanan dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan itu. Inisiatif ini pada mulanya datang dari beberapa bekas perwira *Gyugun* (organisasi pertahanan rakyat atau tentara sukarela yang dibentuk Jepang) di Koetaradja¹¹ (kini Banda Aceh). Setelah

⁹ Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45, *op. cit.*, hlm. 66.

¹⁰ Usman Nyak Gade, "Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh," *makalah*, yang disampaikan pada acara Diskusi Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh : Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976), hlm. 7. Lihat juga Amran Zamzami, *Jihad Akbar Di Medan Area*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm. 13.

¹¹ Mereka antara lain : Syamaun Gaharu, Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid

mengadakan beberapa kali pertemuan, akhirnya diputuskan untuk mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di seluruh daerah Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pengurus API berhasil disusun dengan Ketua / Komandan : Syamaun Gaharu, Kepala Staf : T. A. Hamid Azwar, Sekretaris : Husein Yusuf, Anggota : Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, T.M. Daud Samalanga, T. Sarung, Bakhtiar Idham, T. Abdullah dan Saiman. Organisasi ini terdiri dari :

1. Markas Daerah berkedudukan di Koetaradja
2. Wakil Markas Daerah (pada mulanya hanya dibentuk di 4 daerah kemudian di 8 daerah) yaitu, di semua daerah bekas *Afdeeling*¹²

Langkah pertama yang diambil API ialah mengeluarkan sebuah seruan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat di Aceh agar membantu dan menyokong API yang baru lahir itu. Seruan itu antara lain berbunyi :

*Seroean Tanah Air
Di seloeroeh Atjeh telah berdiri Angkatan
Pemoeda Indonesia – API
API akan mendjadi dasar tentara Repoeblik
Indonesia
API akan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia
API akan mendjaga keamanan dan
kententruman oemoem*¹³

Dalam proses selanjutnya API bertukar nama menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat atau Tentara Keselamatan Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan akhirnya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat waktu itu.

Azwar, Said Usman, Bakhtiar Idham dan lain-lain. Lihat Usman Nyak Gade, "Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh," *op. cit.*, hlm. 23.

¹² Kemudian 8 (delapan) daerah. Lihat Sesi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45, *op. cit.*, hlm. 31.

¹³ Ramadhan KH dan Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 84.

Selain kelompok bekas *Gyugun*, kelompok pemuda lainnya (kebanyakan dari alumnus sekolah agama yang modernis) juga mendirikan Badan Perjuangan Rakyat dengan tujuan yang sama seperti API. Di kantor Surat Kabar *Atjeh Simboen* (surat kabar masa pendudukan Jepang di bawah asuhan tenaga-tenaga Indonesia dan Jepang, setelah Proklamasi tidak terbit lagi) para pengasuh surat kabar tersebut seperti Ali Hasjmy, Teuku Ali Basyah (Talsya) dan lain-lain, mendirikan sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Ikatan Pemoeda Indonesia (IPI). Organisasi ini kemudian pada 6 Oktober 1945 dirubah menjadi BPI (Barisan Pemoeda Indonesia) dengan pengurusnya Ketua Umum I dan II, Ali Hasjmy dan M. Saleh Rahmany, Setia Usaha I, II, III dan IV masing-masing, Tuanku Hasyim, Sulaiman Arsyad Abu Bakar, Potan Harahap dan Sang Syarif, Bendahara Haji Jamin.¹⁴ Pada tanggal 17 Oktober 1945 BPI dirubah lagi menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Organisasi ini berkembang dengan pesatnya ditandai dengan terbentuknya cabang-cabang di seluruh daerah Aceh.¹⁵ Organisasi ini juga mengeluarkan suatu maklumat yang berupa "panggilan umum" kepada seluruh pemuda Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas untuk menjadi anggota PRI. Ditegaskan pula dalam maklumat itu bahwa: "Kemerdekaan tanah air tidak didapati dengan jalan mengemis, tetapi ia harus ditempa oleh tangan putranya sendiri".¹⁶ Kemudian pada tanggal 20 Desember 1945 berdasarkan ketetapan markas tertinggi Pemuda Republik Indonesia di Yogyakarta, nama PRI daerah Aceh berubah lagi menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) daerah Aceh dengan Ketuanya tetap Ali Hasjmy. Namun dalam konferensi Pesindo daerah Aceh 14 - 17 Februari 1947 di Koetaradja diputuskan bahwa Pesindo Aceh memisahkan diri dari Pesindo pusat di Jawa, disebabkan orientasi

ideologinya berbeda. Lebih-lebih setelah diketahui bahwa Pesindo pusat ikut terlibat dalam peristiwa Madiun (pemberontakan PKI/Muso tanggal 19 Oktober 1948).¹⁷

Selain kedua Badan Perjuangan tersebut di atas pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh muncul pula berbagai organisasi kelasykaran, seperti Kesatria Pesindo atau Divisi Rencong (di bawah pimpinan Ali Hasjmy), lasykar Mujahidin (di bawah pimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh), yang kemudian juga dengan nama Divisi X Tengku Chiek Di Tiro, Barisan Berani Mati lasykar Tengku Chiek Paya Bakong penjelmaan dari TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) dipimpin oleh Amir Husein Al-Mujahid. Di samping itu juga terdapat Resimen Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI), Tentara pelajar Islam (TPI) dan berbagai organisasi kepemudaan dan kelasykaran lainnya.¹⁸

Suatu hal yang sangat menggugah semangat seluruh rakyat Aceh untuk berpartisipasi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh pada masa revolusi kemerdekaan karena dikeluarkannya sebuah seruan oleh 4 orang ulama Aceh paling berpengaruh pada waktu itu. Seruan itu dinamakan, *Makloemat Oelama Soeloeroeh Atjeh*. Maklumat ulama ini dikeluarkan di Kutaraja pada tanggal 15 Oktober 1945 dan ditandatangani oleh: 1. Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, 2. Teungku Muhammad Daud Beureueh, 3. Teungku Haji Jakfar Sidiq Lamjabat dan 4. Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri. Maklumat ini diketahui dan ikut ditandatangani oleh Residen Aceh Teuku Nyak Arief dan disetujui serta ditandatangani pula oleh Ketua Komite Nasional Daerah Aceh, Tuanku Mahmud.¹⁹ Isi lengkapnya maklumat tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.* Lihat juga Amran Zamzami, *op.cit.*, hlm.11.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁹ Surat Kabar *Semangat Merdeka* Nomor. 18 Kamis 28 November 1945. Kutipannya dengan ejaan yang disempurnakan telah dimuat dalam Pramoeodya Ananta Toer, dkk. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I*,

¹⁴ T. Ibrahim Alfian, dkk. *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ T.A. Talsya, "Fragmen Revolusi 45 Di Aceh", *Sinar Darussalam*, Nomor 75/76. (Banda Aceh: Maret 1978), hlm. 85-88.

Wacana

"Perang Dunia Kedua yang maha dahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dari paduka yang mulia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Belanda adalah suatu kerajaan yang kecil serta miskin, satu negeri yang kecil, lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur; bangsa dari negeri seperti ini kini bertindak melakukan kekhianatannya terhadap tanah-Air kita Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajah kembali.

Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semua harta benda Negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hamba sahaya kembali dan menjalankan usaha untuk menghapus Agama Islam kita yang suci serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Di Jawa bangsa Belanda serta kakitangannya telah melakukan keganasannya terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguhpun begitu, mereka belum juga insyaf.

Segenap lapisan rakyat yang telah bersatu-padu dengan patuh berdiri di belakang maha pemimpin Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.

Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan seperti ini adalah perjuangan suci yang disebut **Perang Sabil**.

Maka percayalah, wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Tjhi' Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka, untuk mengikuti jejak perjuangan nenek-nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita untuk keselamatan Tanah-Air, Agama dan Bangsa. Kutaradja, 15 Oktober 1945. Atas nama ulama seluruh Aceh : Teungku Hadji Hassan Krueng-Kale, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Hadji Dja'far Sidik Lam-

(Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999), hlm. 84.

Djabat, Teungku Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri".²⁰

Dengan isi seperti di atas, maka maklumat keempat ulama tersebut, oleh masyarakat Aceh dianggap sebagai suatu fatwa, bahwa perlawanan terhadap Belanda yang hendak merebut kembali kemerdekaan Indonesia merupakan suatu kewajiban dalam agama. Dan dapat dinamakan "Perang Sabil" yang kalau meninggal waktu melakukannya mendapat pahala syahid. Mati syahid dapat diperoleh melalui Perang Sabil dan orang yang dapat menetapkan seseorang mati syahid atau bukan hanyalah para ulama. Karenanya maklumat ulama ini cepat beredar ke seluruh daerah Aceh, sehingga cepat pula mempengaruhi rakyat Aceh untuk ikut serta dalam mendukung dan membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945.²¹

Pernyataan ulama Aceh tersebut telah memotivasi masyarakat Aceh dalam berjuang selama revolusi kemerdekaan. Mereka bersepakat untuk bersatu padu guna melawan Belanda dengan mendukung kemerdekaan Indonesia. Tindakan pertama diawali dengan perebutan senjata dari tentara pendudukan Jepang. Kegiatan perebutan senjata ini umumnya terjadi di kota-kota / tempat-tempat di mana tentara Jepang ditempatkan di seluruh Aceh. Aksi perebutan ini dikoordinir oleh badan-badan perjuangan seperti API / TKR, BPI / PRI dan barisan-barisan kelasykaran rakyat. Perebutan senjata ini diawali di Seulimum (Aceh Besar) yang dipimpin langsung oleh Komandan API / TKR. Dan kemudian merembes ke markas-markas Jepang lainnya di seluruh pelosok Aceh, baik yang dilakukan oleh API / TKR maupun oleh barisan-barisan kelasykaran.²²

²⁰ Pramoedya Ananta Toer, dkk, *loc.cit*.

²¹ Rusdi Sufi, *Peranan Tokoh Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh*. (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003), hlm. 75.

²² Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949, dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*.

Proses perebutan senjata milik Jepang berlangsung hingga tanggal 18 Desember 1945, saat tentara Jepang bersama dengan pegawai sipil pemerintahannya meninggalkan daerah Aceh untuk selamlamanya dengan menggunakan kapal sekutu melalui pelabuhan Ulee Lheue.²³

III

Pada tanggal 15 Juni 1948 daerah Aceh mendapat suatu kehormatan, dikunjungi oleh Presiden Indonesia Pertama, Soekarno. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembleng semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan khususnya di daerah Aceh. Rombongan Presiden ini berjumlah 17 orang, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin negara pada masa itu baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer.²⁴ Saat mendarat di lapangan terbang Lhoknga, Presiden disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tengku Muhammad Daud Beureueh, Residen Aceh Teuku Muhammad Daudsyah dan para pembesar sipil / militer lainnya.²⁵

Kunjungan Presiden yang pertama ini dianggap oleh rakyat Aceh sebagai kunjungan bersejarah sehingga mendapat sambutan yang luar biasa dari segenap lapisan masyarakat di Aceh. Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* yang terbit pada hari Kamis 17 Juni 1948 di Yogyakarta, menyebutkan ratusan ribu rakyat Aceh, di

antaranya terdapat 6000 murid sekolah memadati jalan-jalan yang dilalui rombongan Presiden untuk ikut serta mengelukannya.²⁶

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam hubungan untuk meningkatkan perjuangan rakyat di daerah Aceh. Ketika Presiden memberikan wejangannya kepada pemuka sipil dan militer di Pendopo Residen Aceh, beliau berkata antara lain bahwa "Aceh contoh perjuangan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia". Petikan wejangan Presiden Soekarno tersebut sebagai berikut :

"...Saya tahu rakyat Aceh adalah pahlawan. Aceh selalu menjadi contoh perang kemerdekaan, contoh perjuangan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia melihat ke Aceh, mencari kekuatan batin dari Aceh dan Aceh tetap menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia...."²⁷

Puncak acara kedatangan Presiden adalah rapat raksasa yang diadakan di lapangan *explanade* (kini lapangan Blang Padang) pada tanggal 17 Juni 1948 untuk mendengarkan pidato Kepala Negara Presiden Soekarno. Dalam pidato inilah Presiden menjuluki Daerah Aceh sebagai "*Daerah Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*". Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Daerah Aceh pada masa itu (masa Mempertahankan Kemerdekaan) merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak berhasil dimasuki dan diduduki kembali oleh pihak Kolonial Belanda (kecuali Pulau Weh, Sabang), sejak kekalahan mereka dengan Jepang pada tahun 1942. Diperkirakan lebih 100 ribu orang dari segenap penjuru Aceh yang hadir memadati lapangan *explanade* tersebut. Di antara kata-

(Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama, bekerjasama dengan Yayasan SEULAWAH RI-001, tahun 1998), hlm. 174.

²³ Jarahdam I / Iskandar Muda, *Dwi Windu Kodam I Iskandar Muda* (Banda Aceh : Jarahdam I / Iskandar Muda, 1972), hlm. 91-103. Dalam buku ini juga disebutkan sejumlah jenis-jenis senjata yang berhasil direbut pejuang Aceh dari pihak Jepang di seluruh daerah Aceh.

²⁴ Nama-nama ke 17 rombongan Presiden ini dapat dilihat dalam Surat Kabar *Semangat Merdeka*, nomor khusus "kedatangan Presiden ke Aceh", (Kutaradja : 1948).

²⁵ Abdullah Ali dkk, *op.cit.*, hlm. 283.

²⁶ "Presiden di tengah Rakjat Aceh", dalam *Harian Kedaulatan Rakjat*, (Yogyakarta : Kamis 17 Juni 1948).

²⁷ Amran Zamzami, *op.cit.*, hlm. 323. Ejaan ini telah disesuaikan dengan EYD.

Wacana

kata heroik dan patriotik yang disampaikan Presiden Soekarno yaitu :

*"Dari ribuan kilometer aku datang ke sini spesial untuk bertemu dengan Rakyat Aceh, yang terkenal sebagai satu Rakyat yang selalu berjuang untuk kemerdekaan, yang selalu menjadi kampiun dan pelopor perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia. Segenap Rakyat Indonesia di Tanah Jawa, Sumatera, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya, mengarahkan matanya kepada saudara-saudara. Pokoknya, saudara punya perjuangan sekarang ini ialah perjuangan menyelamatkan Republik Indonesia, Republik yang sekarang menjadi kecil sesudah terjadinya perang kolonial pada tanggal 21 juli 1947 tahun yang lalu, tetapi dengan Aceh menjadi Daerah Modal, seluruh wilayah Republik Indonesia akan kita rebut kembali. Dan hendaknya Republik yang kecil ini tetap, tetap, tetap, tetap menjadi pelopor. Tetap menjadi modal kita. Walaupun daerahnya sekarang menjadi lebih kecil daripada dahulu, jangan hendaknya hatinya, semangatnya, batinnya, tekadnya, rohaninya, jiwanya menjadi kecil. Terus saudara-saudara, tidak salah sangka aku, semangat Aceh memang bergelora menjadi modal, bagi perjuangan bangsa Indonesia...."*²⁸

Pernyataan Presiden Soekarno bahwa Aceh adalah Daerah Modal tidak hanya disebut sekali dua saja, tetapi dalam rapat raksasa yang diadakan di Bireuen (Aceh Utara) pada tanggal 18 Juni 1948 Presiden juga menyebutkan "...Rakyat Aceh yang telah mengadakan perjuangan mati-matian, bertempur, menolak dan menahan imperialisme Belanda masuk ke Daerah Aceh, sehingga karenanya Aceh menjadi Daerah Modal Republik Indonesia. Rakyat Aceh menjadi inspirasi untuk mengobarkan semangat Bangsa Indonesia...."

²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

Ucapan Presiden tersebut di atas juga berhubungan dengan berbagai sumbangan yang telah diberikan oleh rakyat Aceh kepada perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Di antaranya yang paling terkenal menyumbangkan 2 buah pesawat udara jenis *Dakota*. Adanya sumbangan ini diawali dengan suatu pertemuan antara Presiden beserta rombongannya dengan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) di *Atjeh Hotel* (Kutaradja). Di sini Presiden membicarakan berbagai hal sehubungan dengan situasi negara pada waktu itu. Presiden menanyakan / mengusulkan kepada GASIDA apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang *Dakota* (bekas pakai) yang berharga 120.000 *Dollar Malaya* atau sekitar 25 Kg emas. Menjelang akhir pertemuan, Presiden mengatakan, "tidak akan mau makan sebelum mendengar jawaban dari GASIDA, ya atau tidak". Usulan Presiden tersebut mendapat sambutan meriah dari mereka yang hadir khususnya para saudagar Aceh yang tergabung dalam GASIDA. Pada waktu istirahat Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Wakil Residen Aceh pada waktu itu), mewakili para saudagar Aceh mengumumkan bahwa rakyat Aceh menyanggupi untuk membeli pesawat udara jenis *Dakota* seperti yang diinginkan Presiden tersebut.³⁰ Dikatakan, tidak hanya satu pesawat tetapi 2 pesawat akan dibeli rakyat Aceh untuk dipersembahkan kepada negara dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kegembiraannya maka Presiden telah berkenan memberikan kesempatan kepada 10 orang para wakil dari GASIDA untuk menikmati naik pesawat udara pada hari itu juga di atas Kutaradja.³¹

Mengenai spontanitas dan antusias Rakyat Aceh dalam membantu pembelian pesawat udara ini ada yang menceritakan, bahwa Rakyat Aceh begitu rela pintu rumah

³⁰ Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, *op.cit.*, hal. 36.

³¹ Surat Kabar *Semangat Merdeka*, *op.cit.*, hlm. 58.

mereka digedor pada waktu malam hari untuk memberi atau menyumbangkan sebahagian emas-emas atau barang-barang berharga yang mereka miliki demi untuk negara. Oleh karenanya tidak mengherankan dalam waktu yang relatif singkat panitia pembelian pesawat ini telah dapat mengumpulkan sejumlah uang untuk dapat membeli pesawat tersebut. Selanjutnya uang yang telah terkumpul ini diserahkan oleh panitia kepada Residen Aceh T.M. Daudsyah untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat c/q Kepala Staf Angkatan Udara di Yogyakarta. Akhir bulan Agustus 1948 Teuku Muhammad Ali Panglima Polem selaku Ketua Panitia pembelian pesawat tersebut menerima sepucuk surat bertanggal 28 Agustus 1948 serta sebuah telegram bertanggal 23 Agustus 1948 Nomor. 3470/KSU/48, yang berasal dari Kepala Staf Angkatan Udara Komandemen Sumatera. Isi telegram ini memberitahukan bahwa uang yang disumbangkan oleh rakyat Aceh untuk membeli pesawat udara telah diterima.³²

Pesawat yang dibeli dengan uang sumbangan Rakyat Aceh ini diberi nama *RI-001 Seulawah*. Pesawat inilah yang kemudian dijadikan modal pertama bagi usaha penerbangan sipil/komersil di Indonesia yang di kenal dengan *Garuda Indonesian Airways* (GIA).

Selain memberikan sumbangan 2 pesawat Dakota untuk kepentingan Revolusi Republik Indonesia, rakyat Aceh juga menyumbang biaya-biaya untuk Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Pada tahun 1949, Pemerintah Daerah Aceh telah mengeluarkan biaya untuk keperluan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, sebesar S \$ 500.000 (Straits Dollar) dengan perincian, untuk perwakilan luar negeri (Mr. Maramis) S \$ 100.000, untuk Indonesia Office Singapore S \$ 50.000, untuk Angkatan Perang S \$ 250.000 dan untuk pengembalian Pemerintah

Republik Indonesia ke Yogyakarta S \$ 100.000.³³

Modal perjuangan Bangsa Indonesia lainnya yang terdapat di Aceh pada masa Revolusi Kemerdekaan yaitu sebuah Pemancar Radio, populer dengan sebutan "*Radio Rimba Raya*".³⁴ Radio ini ditempatkan di Rimba Raya (62 Km dari Kota Bireuen ke arah Takengon, Aceh Tengah) dengan memakai gelombang 19 – 25 atau 60 Meter, berada di udara dari jam 5 petang sampai jam 6 pagi. Radio ini berasal dari sebuah Pemancar Radio yang diseludupkan ke Aceh dari Malaya (kini Malaysia) di bawah pimpinan seorang mayor Laut Jonh Lie (Yahya Daniel Dharma) dengan speed boat. Perakit pemancar ini seorang Indo-Jerman bernama J.W. Schultz dibantu oleh beberapa tenaga lokal (Ramli Melayu, Syamsuddin, Letnan R.Syarifuddin dan Letnan R. Abdullah). Radio ini selain menyiarkan siaran berbahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Belanda dan Urdu. Selain itu memegang peranan penting dalam menyiarkan dan mengobarkan semangat perjuangan, membantah siaran-siaran bohong Belanda yang dipancarkan melalui Radio Medan dan Radio Batavia. Di samping juga dapat berhubungan dengan pemancar Radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Suliki (Sumatera Barat) serta dengan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia di Banaran. Melalui siaran ini juga instruksi-instruksi dari PDRI dapat disalurkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti dengan Dr. Sudarsono di India dan L.N. Palar di PBB. Dengan demikian perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mempunyai bukti tentang eksistensi Negara Republik Indonesia.

Kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh, di samping telah lebih meningkatkan

³³ *Ibid.*

³² Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, *loc.cit.* Uang yang dikirim tersebut cukup untuk membeli 2 pesawat, tetapi ternyata yang di beli hanya 1 pesawat saja.

³⁴ Mengenai "*Radio Rimba Raya*" ini, lihat misalnya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Sumbangsih Radio Rimba Raya Terhadap Republik* (Banda Aceh : Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004).

Wacana

semangat rakyat Aceh dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, juga telah memberi suatu harapan bagi perjuangan umat Islam di daerah Aceh. Di sela-sela kunjungannya itu, Presiden telah sempat *"berdialog empat mata"* dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh (Ketua PUSA dan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo), di Pendopo Keresidenan Aceh. Inti dari dialog tersebut yaitu, Presiden meminta kepada Tengku Muhammad Daud Beureueh yang dipanggilnya *"kakak"*³⁵ agar rakyat Aceh terus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamkan itu sampai titik darah yang penghabisan, sebab hanya daerah Aceh yang masih belum dijamah oleh musuh. Menurut Soekarno, Aceh lah modal Indonesia seperti yang disebutkan dalam pidato-pidatonya di berbagai tempat di Aceh. Bahwa Aceh adalah basis pertahanan terakhir dan *"Benteng Andalan"* dalam menegakkan Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya seluruh potensi yang ada di daerah Aceh harus dikerahkan untuk menangkal masuknya Belanda sekaligus merupakan simbol masih adanya wilayah Republik Indonesia yang tetap bebas. Hal itu penting dalam memberi fakta kepada dunia internasional dan menarik simpati PBB kepada kita. Tengku Muhammad Daud Beureueh mengatakan bahwa rakyat Aceh siap melaksanakannya. Insya Allah benteng pertahanan ini tidak akan bobol. Berjihad Fisabilillah membela Negara adalah wajib hukumnya dalam syariat Islam. Selanjutnya Presiden mengatakan *"kalau demikian biarlah rakyat Aceh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan syariat Islam"*. Oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh meminta kepada Presiden agar janji itu ditulis di atas kertas. Namun Soekarno tidak menuliskannya tetapi sekali lagi ia meyakinkan bahwa janjinya itu akan

³⁵ Dalam dialog itu Presiden Soekarno memanggil *"kakak"* kepada Tengku Muhammad Daud Beureueh. Dialog ini bunyi selengkapnya dapat dilihat dalam, M.Nur El Ibrahimy, *Kisah Kembalinya Tgk Mohd. Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia*. (Jakarta Pengarang Sendiri, 1979), hlm. 37-38. Lihat juga Amran Zamzami, *op.cit.*, hlm 342-343.

ditepati. Ia akan memperjuangkan untuk menjadikan Aceh sebagai Daerah Istimewa sehingga rakyatnya bebas melakukan syariat Islam. Dengan menitikkan air mata Presiden Soekarno menghindari janji tertulisnya dan tetap meyakinkan Tengku Muhammad Daud Beureueh bahwa rakyat Aceh nantinya benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam. Demikian janji Presiden Republik Indonesia Soekarno dalam dialog empat mata dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 tanggal 5 April 1948, Sumatera dibagi menjadi 3 Provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dengan Gubernurnya Mr. S.M. Amin (sebelumnya Gubernur Muda).³⁷

Pada akhir tahun 1949, berdasarkan peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No : 8/Des/WK/49 tanggal 17 Desember 1949, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan statusnya ditingkatkan menjadi Provinsi tersendiri (Provinsi Aceh yang pertama). Tengku Muhammad Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh (sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah karo). Namun provinsi Aceh yang pertama ini tidak berumur panjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, daerah Aceh kembali menjadi Keresidenan di bawah provinsi Sumatera Utara yang dikepalai oleh seorang Residen. Perubahan status dari provinsi menjadi keresidenan tidak sesuai dengan keinginan para pemimpin dan rakyat Aceh. Mereka protes, tetapi Pemerintah Republik Indonesia tetap pada keputusannya. Penghapusan provinsi ini merupakan awal dari kekecewaan para pemimpin dan rakyat Aceh. Dan selanjutnya timbul gejolak-gejolak politik yang kemudian dikenal dengan nama *"Peristiwa Aceh"* atau pemberontakan DI/TII di Aceh.

³⁶ Ibid.

³⁷ S.M. Amin, *op.cit.*, hlm. 41.

IV

Rentetan peristiwa yang terjadi di daerah Aceh pada masa mempertahankan kemerdekaan (1945-1950) merupakan satu bagian saja dari kisah perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia pada masa itu. Dan peristiwa-peristiwa masa Revolusi Kemerdekaan itu telah memberikan pada Aceh suatu kebanggaan tersendiri. Salah satu yang paling membanggakan Aceh ialah julukan "*Daerah Modal*" yang diberikan oleh Presiden Soekarno dalam lawatannya pertama kali ke Aceh. Dan julukan "*Daerah Modal*" ini berkaitan dengan kontribusi yang telah diberikan dan diperlihatkan oleh rakyat Aceh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaan di daerah ini, rakyat Aceh tidak hanya berjuang untuk kepentingan daerah sendiri, akan tetapi juga berbagai bantuan untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia waktu itu mereka berikan. Selain memberi sejumlah uang untuk membeli dua buah pesawat udara bagi kepentingan Negara Indonesia, rakyat Aceh juga memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Demikian pula bantuan yang diberikan untuk perjuangan di Medan Area.

Tanggapan rakyat Aceh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilihat antara lain dalam sambutan yang mereka berikan ketika kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada bulan Juni 1948. kunjungan ini dianggap rakyat Aceh sebagai kunjungan bersejarah.

Cinta rakyat kepada Presidennya, kesediaan mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan Negara, semangat bertempur, keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan, segalanya ini dapat dilihat dalam kesempurnaan yang telah mereka berikan ketika menyambut kedatangan Kepala Negara mereka yang pertama ke Aceh. Namun di saat sudah berakhirnya Revolusi Kemerdekaan, kekecewaan mulai dirasakan oleh para pemimpin dan rakyat Aceh. Awalnya ketika dileburnya provinsi Aceh, sehingga status Aceh menjadi Daerah Keresidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Mereka kecewa dan merasa "di tipu", kebijaksanaan yang telah digariskan Pemerintah untuk Aceh, tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan Aceh kepada Republik Indonesia, maka "*terjadilah apa yang akan terjadi*".

Akhirnya banyak pengalaman berharga yang dapat diambil dari kisah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Semua pengalaman itu semoga dapat dipergunakan sebagai cermin kehidupan dalam menangani masalah bangsa dan Negara di masa-masa yang akan datang. Memang itulah salah satu manfaat mempelajari sejarah, yaitu agar orang-orang menjadi lebih bijaksana dalam menyongsong masa depannya berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampaunya.

Piet Rusdi, S. Sos adalah Tenaga Penelaah pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Nasionalisme Para Tokoh Ulama Di Aceh

Oleh : Harvina

Pendahuluan

Perkembangan nasional dan global menuntut paradigma yang disesuaikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan keadaan bangsa dan negara yang berdaulat. Dari dalam itulah lahir kesadaran berbangsa dan bernegara yang pada hakikatnya merupakan kesadaran politik yang normatif. Dari sini pula kesadaran yang merupakan janin suatu ideologi yang disebut nasionalisme. Dalam arti, nasionalisme sebagai suatu paham yang mengakui kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa demi kejayaannya seharusnya bersatu bulat dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari nasionalisme inilah lahirnya ide dan usaha perjuangan untuk merealisasi negara bangsa. Di Indonesia, ide dan usaha seperti ini berkembang kuat pada tahun 1930-an dan memuncak pada tahun 1940-an.

Dalam hal mana, nasionalisme adalah *awareness of membership in a nation together with desire to achieve, maintain, and perpetuate the identity, prosperity, and power of the nation*. Suatu kesadaran sebagai bangsa yang disertai oleh hasrat untuk memelihara, melestarikan dan mengajukan identitas, integritas serta ketangguhan bangsa tersebut.¹

Artinya, nasionalisme yang diwujudkan atau diaktualisasikan dalam bentuk tindakan untuk memelihara dan melestarikan identitas dan terus berjuang untuk memajukan bangsa dan negara, dengan membasmi setiap kendala yang menghalangi di jalan kemajuan, yang selama beberapa tahun ini tidak kita lakukan, yang akhirnya memudarkan rasa kebanggaan kita tersebut.

Nasionalisme yang dalam beberapa Ensiklopedi dirujuk kepada asal kata *Nation*

yang bermakna bangsa, sudah menjadi wacana dan komitmen bangsa terhadap suatu negara. *Nation* berarti sejumlah besar orang yang menganggap dirinya sebagai sebuah kelompok masyarakat yang meletakkan loyalitasnya terhadap kelompok tersebut di atas mana-mana pertentangan loyalitas.

Webster's New World Encyclopedia mendefinisikan nasionalisme sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk mempersatu sebuah bangsa, membentuk sebuah negara, atau membebaskannya dari peraturan luar dan imperialistik.²

Nasionalisme Indonesia dan Nasionalisme Aceh

Nasionalisme Indonesia yang tumbuh pada kurun waktu 1905 hingga Indonesia Merdeka dapat disebut seperti mosaik, di mana masing-masing daerah memiliki pergerakan nasionalnya sendiri-sendiri dan tidak saling lepas dari ranah kebangsaan Indonesia walaupun masih bersifat kedaerahan. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat bahwa nasionalisme telah muncul dalam diri masyarakat Indonesia. Bisa jadi, kesadaran dan paham kebangsaan itu tumbuh sebagai dampak tekanan yang dilakukan oleh kaum kritis dan terdidik atau juga oleh kaum pemuda, atau pula karena adanya keinginan untuk mengganti elit yang telah menjadi kaki tangan kolonial.

Munculnya nasionalisme Indonesia pada periode itu juga disebabkan oleh beberapa hal seperti munculnya figure kritis dan terdidik yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, situasi politik internasional seperti takluknya Rusia ditangan Jepang (1905) dan berdirinya pemerintahan nasionalis Tiongkok (1911), praktek monopoli perdagangan kaum China yang

¹ <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01635.html>

² Hasanuddin Yusuf Adnan, *Politik dan Tamaddun*, (Adnin Foundation Aceh: Banda Aceh), hlm 250.

memaksa kaum priyayi melakukan pemboikotan untuk melindungi pedagang pribumi serta masuknya pengaruh luar yang dibawa oleh agamawan³.

Sedangkan nasionalisme Aceh memiliki nilai patriotisme agamis yang amat tinggi, sehingga mempertahankan negara dan bangsa identik dengan mempertahankan agama dalam konteks duniawi dan ukhrawi. Ketika berbicara persoalan nasionalisme bagi Aceh, maka bedalah ia dengan nasionalisme bagi bangsa lain. Nasionalisme Aceh termasuk komitmen duniawi (negara dan bangsa) dan ukhrawi (Islam sebagai agama), sehingga tidak mengherankan bahwa tokoh agama atau elite agama di Aceh mempunyai peranan yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada umumnya dalam khasanah sejarah nasional Indonesia, tokoh agama atau elite agama yang lazim disebut sebagai pemimpin masyarakat nonformal. Hal ini menunjukkan bahwa peranan para elite agama atau ulama dalam masyarakat cukup besar dan cukup disegani. Apa yang dikatakan atau difatwakan oleh mereka lebih didengar dan dipatuhi oleh masyarakat daripada apa yang dikatakan oleh pemimpin formal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemimpin-pemimpin formal tidak dapat dengan serta merta melepaskan diri dari dukungan para ulama.

Tulisan ini akan membahas bagaimana nasionalisme para tokoh ulama di Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ulama

Sudah semenjak masa kerajaan, masa penjajahan dan hingga kemerdekaan para ulama selalu mendampingi para pemimpin formal dalam melaksanakan pemerintahan mulai dari unit pemerintahan terkecil yang disebut *gampong*

(kampong/desa) hingga unit pemerintahan tertinggi (kesultanan).

Pengertian ulama adalah orang Islam yang berilmu (secara luas dan dalam) beriman dan bertaqwa, beramal saleh, berakhlak mulia, mendidik-membina dan menarik umat dari yang ragu kepada yakin, dari takabur kepada tawadul, dari permusuhan kepada persaudaraan, dari ria kepada ikhlas, dari cinta materi kepada keseimbangan dunia dan akhirat, yang selalu beramar makruf dan bernahi mungkar, sehingga para ulama menjadi informal kader dalam masyarakat. Berbeda dengan pemimpin formal atau umara, para ulama mendapatkan fungsi atau kedudukan, bukan atas dasar pengangkatan oleh suatu lembaga/pemerintah, tetapi diperoleh dari pengakuan masyarakat pendukungnya.⁴

Kepopuleran seorang ulama bukan saja karena kesalehannya dan berilmu tinggi, akan tetapi karena sanggup memimpin masyarakat. Sosok ulama adalah symbol pemersatu umat. Sebagai pemersatu umat pada diri ulama itu terpancar sifat kharismatik. Kharisma yang dimiliki oleh seseorang ulama itu menjadi satu kekuatan untuk menggerakkan dan memotivasi rakyat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Para ulama dalam mentransferkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat menempuh berbagai cara dan media, antara lain melalui lembaga pendidikan dayah dan berbagai media dakwah lainnya. Hikayat merupakan salah satu media dalam memvisualkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama kepada masyarakat. Hikayat ini mengandung petuah-petuah, nasihat-nasihat, dan kisah-kisah *kehidupan* para nabi/auliya yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan umat manusia.

Pemilihan hikayat sebagai media oleh para ulama dalam mentransformasikan nilai-nilai agama kepada masyarakat

³<http://pussis.wordpress.com/2008/03/17/rein-tpretasi-dan-reaktualisasi-nilai-hari-kebangkitan-nasional/>

⁴ Rusdi Sufi, dkk., *Peranan Tokoh Ulama dalam perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh*, (Banda Aceh: PDIA), hlm. 1

sangatlah tepat. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya masih belum mampu menulis dan membaca tulisan Arab dan Latin. Hikayat ini pada umumnya ditulis oleh para ulama dan dibacakannya dihadapan masyarakat, baik pada ruang tertutup maupun ruang terbuka.

Pada masa penjajahan Belanda hikayat menjadi media untuk membangkitkan semangat juang. Banyak para pemuda setelah mendengar pembacaan hikayat dengan gagah berani mengambil pedang atau rencong pergi ke medan perang untuk melawan kafir Belanda tanpa ragu atau gundah sedikit pun. Para ulama itu membacakan hikayat untuk mendukung pejuang tersebut di setiap mukim atau gampong.

Selain membina lembaga-lembaga pendidikan dayah, sejak masa kesultanan para alim ulama di Aceh juga bergerak dalam usaha-usaha pembangunan lainnya terutama dalam bidang sosial, pembinaan moral/mental dan pertanian. Ulama yang bergerak dalam bidang pertanian antara lain: Teungku Chik Di Pasi, Teungku Chik Di Bambi, Teungku Chik Di Trueng Campli, dan Teungku Chik Di Ribee. Ulama yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tabib (kedokteran) dan karang-mengarang seperti Teungku Chik Kuta Karang. Pada bagian lain ada pula ulama-ulama seperti Teungku Chik Di Tanoh Abee dan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee yang mempunyai keahlian di bidang ilmu falaq dan ilmu hisab.

Seorang ulama besar Aceh lainnya, Teungku Muhammad Daud Beureuh mempunyai keahlian tidak hanya dalam bidang ilmu agama tetapi juga mempunyai kecakapan dalam bidang politik, bangunan, pertanian, dan irigasi. Dalam bidang politik ia pernah menjadi ketua umum PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), Gubernur Militer Aceh Langkat, dan Tanah Karo, serta Gubernur Kepala Daerah Propinsi Aceh.⁵

Hubungan Ulama dengan Pemerintah

Sudah semenjak kerajaan, masa penjajahan dan hingga masa kemerdekaan dalam struktur pemerintahan tradisional di Aceh terdapat seperangkat aparat yang melaksanakan tugas pemerintahan secara bersama. Aparat tersebut dapat dijumpai mulai dari unit pemerintahan terkecil, yaitu *gampong* (desa). Aparat yang dimaksud adalah yang sekarang populer dengan sebutan penguasa (umara) dan ulama.

Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintahan dalam suatu unit wilayah kekuasaan. Contohnya seperti sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam suatu unit pemerintahan kerajaan. *Uleebalang* sebagai pimpinan unit pemerintahan *nanggroe* (negeri). *Panglima sago* (*panglima sagi*) yang memerintah unit wilayah pemerintah *sagi*; kepala *mukim* yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan *mukim*; dan keuchik yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan *gampong* (kampung). Kesemua mereka dalam struktur pemerintahan di Aceh dikenal sebagai pimpinan adat.

Sementara ulama adalah aparat pendamping dan penasihat para umara atau pimpinan adat dalam melaksanakan pemerintahan khususnya dalam memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bidang hukum (syariat atau hukum Islam). Dengan kata lain ulamalah yang membantu atau memberi nasihat kepada sultan, panglima sago, uleebalang, kepala mulim, dan keuchik dalam mengerjakan atau menyelesaikan berbagai hal yang berkenaan dengan masalah keagamaan di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, para ulama ini dalam struktur pemerintahan tradisional di Aceh dikenal sebagai pemimpin agama atau tokoh agama.⁶

Panggilan umum sehari-hari terhadap ulama adalah *teungku*. Namun tingkatan mereka berbeda tergantung pada kadar keilmuan atau keulamaan yang

⁵ *Ibid*, hlm 14

⁶ *Ibid*, hlm 22

dimilikinya. Bila mereka telah sampai pada tingkat “ulama besar” biasanya dipanggil dengan sebutan *teungku* chik atau syiek. Lazim pula dengan menyebut nama tempat ia mengajarkan pendidikan (perguruannya) atau tempat ia berdomisili di belakangnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat Aceh dikenal dengan dua jenis kelompok pimpinan, yaitu kelompok pimpinan adat (umara) dan kelompok pemimpin agama (ulama). Adapun mereka yang tergolong dalam kelompok pemimpin adat (pengusaha/umara) adalah:

1. Sultan yang disebut dengan istilah *poteu* (tuan kita) atau *Po teu* raja, yang keturunan laki-lakinya diberi gelar dengan Tuwanku.
2. *Uleebalang* mereka merupakan raja-raja kecil beserta dengan kerabatnya yang membantunya.
3. Kepala *mukim* yaitu yang mengepalai suatu kesatuan wilayah kekuasaan yang merupakan gabungan dari beberapa buah *gampong* yang berdekatan dan penduduknya melaksanakan sembahyang bersama pada setiap hari jumat di sebuah mesjid dalam wilayah mukim yang bersangkutan.
4. Panglima Sagoe yaitu sebagai pimpinan sago yang merupakan federasi dari mukim-mukim yang khusus terdapat di Aceh Besar, yang dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Jumlahnya hanya tiga buah yaitu *Sagi XXII mukim*, *Sagi XXV mukim*, dan *Sagi XXVI mukim*.
5. *Keuchik* atau ada pula yang menyebutnya dengan *geuchik* yaitu yang mengepalai sebuah *gampong* (desa).

Di samping itu ada juga yang delapan orang yang disebut *tuha lapan*.⁷ Unsur lain dalam suatu *gampong* yaitu yang dinamakan dengan *ureung le* (orang banyak) yang merupakan anak-anak daripada ayah kampung (*keuchik*) sebagai umara dan ibu kampung (*teungku meunasah*) sebagai ulama.

Sementara yang tergolong pimpinan agama (kelompok alim ulama) yang mengurus masalah keagamaan yang disebut hukom adalah:

1. *Kadli* yaitu orang yang mengurus pengadilan agama atau yang dipandang mengerti mengenai hukum agama di Kerajaan Aceh.
2. *Imeum mukim* (imam *mukim*) yaitu yang menjadi penasihat kepala mukim dalam bidang hukum. *Imeum mukim* inilah yang bertindak sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah mesjid.
3. *Teungku meunasah* meskipun sebagai pembantu *keuchik* dalam bidang *hukom*, tetapi jabatan ini paling dominant dalam kehidupan masyarakat *gampong*.
4. *Teungku-teungku* pengelola lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti *dayah* dan rangkang juga termasuk murid-muridnya yang juga dipanggil dengan sebutan *teungku*.

Contoh yang paling konkrit dapat dilihat pada masa perang Belanda di Aceh pada mula terjadinya perang tersebut ulama dan *uleebalang* bersama-sama telah melakukan perlawanan yang mengakibatkan pihak Belanda mengalami kekalahan.

Respon Ulama Pada Masa Proklamasi

Pemberitaan mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu dan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh masyarakat Aceh diterima agak terlambat. Berita menyerah kalahnya Jepang baru pada tanggal 23 Agustus resmi diketahui oleh rakyat karena pada tanggal tersebut Atjeh Syu Tyokan (Residen Aceh) memanggil para pemimpin rakyat setempat ke kediamannya (Pendopo Gubernur sekarang). Dalam pertemuan itu S. Ino secara resmi menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan situasi daerah Aceh dan posisi Jepang pada waktu itu. Ia menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada rakyat dianjurkan untuk bersama dengan pemerintah Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh.

⁷ Ibid, hlm 26

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut pada tanggal 25 Agustus Tyokan S. Ino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur raya telah berakhir dan kemaharajaan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan sekutu. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus pesawat tempur sekutu menjatuhkan surat selebaran di kota Kutaraja dan di kota-kota lain di seluruh Aceh. Surat selebaran itu ditujukan kepada penduduk Indonesia, dengan menyatakan bahwa perang sudah selesai. Jepang telah mengaku tunduk tidak dengan perjanjian dan ditutup dengan hiduplah Seri Ratu! Hiduplah Indonesia.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan penuh kegembiraan oleh seluruh rakyat Aceh, sehingga mewujudkan keadaan yang sangat baik pada waktu itu. Kegentingan hilang dengan segera, sedangkan persatuan di antara rakyat dari setiap golongan dan lapisan masyarakat bertambah kuat. Rakyat bersatu padu dalam usaha memenuhi isi dan tujuan proklamasi kemerdekaan.

Para ulama sebagai salah satu golongan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rakyat Aceh melihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak disenangi, baik oleh Jepang maupun Belanda. Mereka secara terang-terangan ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu, pada 15 Oktober 1945 ulama Aceh mengeluarkan maklumat bersama yang berbunyi sebagai berikut :

Perang dunia yang maha dahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dar paduka yang mulia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Belanda adalah satu kerajaan kecil dan miskin, satu negeri yang kecil, lebih kecil dari daerah Aceh

dan telah hancur lebur. Bangsa dari negeri seperti ini kini bertindak melakukan kekhianatannya terhadap tanah air kita Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajahnya kembali.

Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan masyarakat, merampas semua harata benda negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali.

Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hambanya kembali dan menjalankan usaha untuk menghapus agama Islam kita yang suci serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Di Jawa bangsa Belanda serta kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap kemerdekaan Indoneisa hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguhpun begitu mereka belum juga insaf.

Segegap lapisan masyarakat yang telah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno-Hatta dan sedang menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.

Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini perjuangan suci yang disebut Perang sabil, maka percayalah wahai bangsaku bahwa perjuangan ini adalah sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang di pimpin oleh almarhum Teungku Chik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikuti jejak

*perjuangan nenek kita dahulu.
Tunduklah dengan patuh akan
segala perintah-perintah pemimpin
kita, untuk keselamatan Tanah Air,
Agama dan Bangsa.*

Kutaraja, 15 Oktober 1945

Atas nama ulama seluruh Aceh

*Tgk. Haji Hasan Kroeeng Kale-Tgk. M.
Daoed Beureueh, Tgk. Haji Dja'far Sidik
Lamdjabat, Tgk. Haji Ahmad Hasballah
Indrapoeri.⁸*

Jadi maklumat bersama itu merupakan suatu fatwa bahwa perang melawan Belanda dalam mempertahankan Republik Indonesia adalah suatu keharusan dalam agama dan dapat dinamakan perang sabil, yang kalau meninggal waktu melakukannya mendapat pahala syahid. Oleh karena itu, maklumat tersebut sangat penting bagi rakyat Aceh, mereka tidak mau kalah hanya mati sia-sia. Namun mereka rela mati, kalau mati itu adalah mati syahid. Mati syahid hanya ada dalam perang sabil. Orang yang dapat menetapkan mati syahid atau bukan hanyalah para ulama.

Fatwa ulama Aceh itu dengan cepat beredar ke segala lapisan masyarakat di kota dan di desa, sehingga diikuti tua dan muda dengan satu tujuan membela tanah air tumpah darah Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, tertanamlah keyakinan yang membaja dalam hati rakyat Aceh bahwa berjuang dan berperang melawan musuh-musuh Republik Indonesia adalah perang sabil dan kalau mati namanya mati syahid. Untuk itu mereka selalu mengikuti perkembangan perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya. Para ulama melihat bahwa negara dan bangsa dalam keadaan genting, terutama sekali sesudah mendapat berita tentang hebatnya pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Karena itu para ulama Aceh menyatakan bahwa Maklumat Bersama tanggal 15 Oktober belum memadai untuk menghadapi kegentingan negara pada

waktu itu. Namun perlu menyusun suatu rencana yang lebih luas dan harus terjun langsung ke dalam kancah perjuangan fisik. Sebagai kelanjutan maklumat Bersama 15 Oktober itu, maka pada tanggal 17 November 1945 bertempat di Mesjid Tiro diadakan suatu rapat besar yang dihadiri oleh 600 ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam Kabupaten Pidie. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Teungku Umar Tiro dan mengambil keputusan mendirikan Barisan Muhajidin dengan ketua umumnya Teungku Umar Tiro sendiri.

Kemudian pada tanggal 23 November 1945 berlangsung musyawarah ulama seluruh Aceh bertempat di Mesjid Raya Baiturrahman di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Musyawarah memutuskan mendirikan Barisan Hisbullah dengan Ketua Umumnya Teungku Muhammad Daud Beureueh serta mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa keadaan sekarang Hukum Perang Fardhu Ain.

Pengurus besar Hisbullah terdiri dari Teungku Haji Hasan Kreung Kale, Teungku Said Abdullah kayu, Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Haji Makam Gampong Blang, Teungku Muhammad Lampisang, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdul Wahab Seulimun, Teungku Muhammad Saleh Lambhuk, Tuanku Abdul Aziz, Teungku Haji Hamzah Ateuh, Teuku Muhammad Amin, Teungku Muhammad Daud Ulee Lheu, Sykeh Marhaban Krueng Kale, Teungku Haji Jakfar lamjabat, dan Teungku Sulaiman Mahmud Uleekareng. Di antara mereka yang terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum masing-masing Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, sedangkan sekretaris umum, sekretaris I dan II masing-masing Teuku Muhammad Amin, Syekh Marhaban dan Teungku Sulaiman Mahmud Uleekareng. Tidak berapa lama kemudian yaitu pada 1 Desember 1945 Barisan Hisbullah ditukar namanya menjadi laskar Muhajiddin. Pada waktu itu juga

⁸ Ibid, hlm74

mengeluarkan maklumat pertamanya yang isi utamanya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berjihad melawan musuh-musuh Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia di Aceh Belanda berusaha membujuk pemimpin-pemimpin rakyat Aceh untuk pembentukan sebuah negara boneka. Dalam usahanya ini Belanda melalui wali negara Sumatra Timur, Dr. Tengku Mansur telah mengirimkan sepucuk surat mengajak Gubernur Militer Aceh, Langkat, Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk membentuk suatu negara federal serta menghadiri Mukhtar di Sumatra yang dilaksanakan di Medan pada bulan maret 1949.

Namun usaha yang dijalankan oleh Belanda untuk membentuk negara boneka di daerah Aceh tidak berhasil. Tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Teungku Muhammad Daud Beureueh terhadap surat Dr. Tengku Mansur sangat tegas sekali. Beliau menolak ajakan tersebut sebagaimana yang terlihat dari suatu pernyataan beliau dimuat dalam surat kabar Semangat Merdeka. Pernyataan yang diberikan oleh Gubernur militer Aceh, Langkat, dan tanah karo Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah sebagai berikut:

Perasaan kedaerahan Aceh tidak ada sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk satu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republikan. Sebab itu juga undangan dari Wali negara Sumatra Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja dan arena itulah tidak kita bahas. Berdasarkan surat tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo tersebut jelas bahwa rakyat Aceh tidak mengingini bentuk negara federal gaya van Mook tersebut.

Alim Ulama Dalam Revolusi Sosial

Setelah proklamasi kemerdekaan muncul beberapa kelompok elite di Aceh sebagai berikut. Pertama, adalah golongan *uleebalang* (bangsawan) yang secara turun-

temurun menduduki jabatan pemerintahan suatu kawasan daerah di Aceh. Secara garis besar *Uleebalang* digolongkan dalam satu kelompok, tetapi sebenarnya mereka mempunyai status yang berbeda. Perbedaan status ini berkaitan erat dengan usia silsilah Sultan Aceh dan otoritas politik dalam tata feodal seperti luas daerah kekuasaan.

Kedua, elite ulama yang merupakan pemimpin spiritual dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mereka yang tergolong dalam kelompok elite ulama ini memiliki status yang berbeda sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki. Elite ulama ini dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu elite ulama modernis dan elite ulama ortodoks. Di antara kedua kelompok ulama ini tampaknya elite ulama modernis telah mampu menyusun organisasi yang agak teratur yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Oleh karena itu, kelompok elite ulama ini mempunyai jaringan komunikasi ke seluruh anggotanya yang tersebar di seluruh Aceh. Sejak masa pendudukan Jepang, elite ulama modernis sudah banyak memangku jabatan tertentu dalam pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan keagamaan. Sedangkan elite ulama ortodoks umumnya masih tetap meneruskan peran tradisionalnya, terutama di *dayah-dayah* (pesantren).

Kelompok elite ketiga adalah pemuda, mereka dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu elite pemuda yang mendapat pendidikan Jepang dan elite pemuda yang mendapat pendidikan sekolah keagamaan modernis. Mereka yang termasuk kelompok elite pertama umumnya bersatu untuk membentuk angkatan bersenjata Aceh yaitu API, sedangkan kelompok elite kedua tampil dengan berani membentuk barisan-barisan kelaskaran. Kelompok elite keempat yaitu elite minoritas. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini terdiri dari pemimpin-pemimpin golongan minoritas yang berasal dari luar daerah Aceh. Oleh karena itu, jumlah mereka tidak banyak.⁹

⁹Ibid, hlm 92

Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh daerah Aceh, maka orang-orang atau golongan elite yang telah ada dalam masyarakat Aceh mempunyai pendapat yang berbedabeda tentang proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini disebabkan hubungan kontak social yang berlangsung antara masing-masing kelompok elite selama ini. Reaksi dan pendapat yang terlihat dalam uraian selanjutnya merupakan pencerminan dari sisi kelompok elite di Aceh.

Pertama tampak dari golongan *uleebalang* (bangsawan), mereka terdiri dari dua kelompok pertama mereka ini selama penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang tidak mempunyai kesadaran “Nasionalis Indonesia”, dapat dikatakan sebagai pro-Belanda serta tidak ada kepercayaan diri untuk berdiri sendiri sebagai orang yang merdeka.

Hal itu tergambar dari keyakinannya bahwa bangsa Indonesia dianggap tidak mampu menggerakkan roda pemerintahan “Negara yang Merdeka” dan mereka ini berkeyakinan bahwa “Proklamasi 17 Agustus 1945” tidak bersifat permanen karena pasti akan terbentuk lagi Gubernur Hindia Belanda, kemudian dengan keyakinan itu dapat mempengaruhi mental mereka terhadap keadaan yang sedang dilakukan oleh *uleebalang* di Pidie, yaitu menggalang persatuan dan kekuatan sesama elite *uleebalang* yang sependapat untuk mengembalikan wewenang dan kekuasaan mereka, yang dianggap telah hilang selama ini.

Kelompok kedua, yaitu para *uleebalang* yang selama pendudukan Belanda bersikap “anti penjajah”, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Mereka ini dengan terus-menerus mengikuti perkembangan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mendukung penuh kepadanya. Mereka ketika mendapatkan berita “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” menyambut dengan gembira serta meyakini bahwa Republik Indonesia pasti akan menang.

Kedua terlihat dari golongan elite ulama, mereka terpecah menjadi dua kelompok dalam menghadapi berita “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945”. Pertama, kelompok elite ulama ortodoks menyambut dengan gembira berita proklamasi. Di samping rasa gembira mereka ini masih ada keraguan yang mempertanyakan sikap itu muncul karena pengalaman waktu terjadi “Perang Kolonial” di berbagai daerah Indonesia, banyak wilayah-wilayah Indonesia tidak dapat bertahan lama, kecuali Aceh. Walaupun demikian mereka telah bertekad bahwa bersama-sama golongan ulama lainnya akan mengumumkan “Perang Sabil” terhadap Belanda yang akan datang menjajah Indonesia kembali.

Kedua, kelompok elite ulama modernis, mereka lebih cepat bergerak dalam menanggapi berita “Proklamasi 17 Agustus 1945”. Tindakan itu disebabkan tingkat kesadaran nasional dan pengetahuan politik mereka lebih tinggi. Seperti para ulama yang dahulunya pernah menjadi, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota partai politik Syarikat Islam dan para ulama pimpinan/anggota PUSA/pemuda PUSA. Mereka ini sudah memperhitungkan kemungkinan akan terjadinya suatu proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah. Oleh karena itu mereka menyambut berita proklamasi kemerdekaan dengan tekad akan berjihad untuk mempertahankan proklamasi itu. Ketiga terlihat dari golongan elite pemuda, mereka ini berpendapat bahwa dengan terjadinya perubahan politik dunia dewasa ini, bangsa Indonesia harus mewujudkan suatu kemerdekaan yang abadi. Berdasarkan pemikiran ini, maka para pemuda di Aceh menyambut berita proklamasi dengan mengbil inisiatif untuk membentuk “Angkatan Pembela Proklamasi 17 Agustus 1945”, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Dengan demikian, mereka ini telah mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi. Keempat terlihat dari golongan elite minoritas dalam kelompok ini terdapat dua

macam pendapat, yaitu di satu sisi berpendapat bahwa Belanda kemungkinan akan kembali lagi untuk menjajah. Hal ini menandakan bahwa mereka ini kurang mempercayai akan kemampuan para pejuang kemerdekaan, tetapi di sisi lain dari kelompok ini mereka telah mengerti tentang politik kebangsaan untuk “Bernegara yang Merdeka”, dan juga telah mengerti usaha yang dilakukan oleh para pejuang, baik secara militer maupun secara diplomasi, mendukung seluruhnya proklamasi kemerdekaan. Sehubungan dengan penjelasan di atas, tampak bahwa kelompok elite ulama (terutama modernis) dan pemuda yang paling cepat menentukan sikap sehubungan dengan proklamasi kemerdekaan dan karenanya lebih berperan dan meraih pengaruh pada waktu itu. Mereka melihat jalur militer merupakan jalur yang tepat untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk itu, mereka mendirikan lembaga kemiliteran atau kelaskaran sebagai dasar bagi perwujudan orientasi politiknya.

Penutup

Dari tulisan di atas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa alim ulama merupakan salah satu kelompok pemimpin informal yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh. Keberadaan para alim ulama ini telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh.

Masyarakat menyebutnya dengan nama teungku, teungku chik, dan abu. Sebagai pemimpin informal, peranan alim ulama ini dalam masyarakat cukup besar dan sangat disegani. Apa yang dikatakan atau di fatwakan oleh mereka didengar dan dipatuhi oleh masyarakat daripada apa yang dikatakan oleh pemimpin formal lainnya.

Peranan para alim ulama di Aceh dalam memotivasi rakyat untuk berjuang melawan kaum penjajah sudah kelihatan sejak perang Belanda di Aceh dengan ideologi perang sabil. Mereka tidak berhenti ketika Kesultanan Aceh runtuh dan tunduk kepada penjajah Belanda. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, para ulama Aceh mengkonsolidasikan diri untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Sewaktu berita proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah Aceh, para alim ulama melalui organisasi PUSANYA tanpa ragu-ragu menyatakan dukungannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan, bahkan setelah kemerdekaan pun para ulama ini masih memberikan andil yang sangat besar dalam membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan penjajahan Belanda.

Membedah Nasionalisme Masyarakat Aceh Dari Perspektif Agama

Oleh : Cut Zahrina

Pendahuluan

Masyarakat Aceh merupakan komunitas masyarakat muslim yang senantiasa patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Islam di Aceh berkembang bukan hanya dalam ruang lingkup agama saja akan tetapi senantiasa masuk pada aspek-aspek budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh. Tidak menutup kemungkinan bahwa Islam merupakan agama turun-temurun dalam artian berkembang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Berdasarkan informasi sejarah masuknya Islam di Aceh disebutkan bahwa Islam telah berkembang di Aceh pada abad-13 M, buktinya terdapat pada batu nisan Malikus's-Saleh yang berangka tahun 1297 M. Daerah berlabuhnya kapal penjiar Islam pertama di Aceh adalah di pelabuhan Barus. Pada waktu itu terdapat kerajaan yang dikenal dengan nama Samudera Pasai di bawah kekuasaan raja *Meurah Silo* akhirnya namanya diganti dengan nama Islam menjadi *Maliku's-Saleh*.¹ Untuk selanjutnya, Islam di Aceh begitu kuat dan menyatu dengan masyarakat Aceh.

Pada masa jayanya kerajaan Aceh Darussalam berkembang *hadih maja* yang berbunyi :²

Adat ngon hukom

Hanjeut cree

Lagee zat ngon sifeut

Adat bak po Teumereuhom

Hukom bak Syiah Kuala

Kanun bak Putroe Phang

Reusam bak lakseumana

¹ H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* Jilid I. (Waspada Medan, 1980). hlm. 82.

² Muhammad Umar (Emtas), *Darah dan Jiwa Aceh (mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh : yayasan Busafat, 2002). hlm. 33

Kentaranya nilai-nilai agama Islam yang tertanam dalam masyarakat, membentuk sebuah kepribadian yang Islami seperti yang tertera dalam makna *hadih maja* diatas. Lazimnya masyarakat Aceh apabila berhadapan pada persoalan yang bertolak belakang dengan norma agama maka kemungkinan besar persoalan tersebut ditentangnya. Inilah jiwa patriotisme masyarakat Aceh, yang sangat sesuai dengan karakter dan lingkungannya. Contoh yang paling tepat misalnya penjajahan yang dilakukan oleh para kolonialis Belanda.

Berbicara tentang topik nasionalisme, disini penulis teringat pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya, juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abu Hurairah berkata :

"Seorang laki-laki datang dan bertanya, wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu jika datang seseorang hendak mengambil hartaku, Rasulullah menjawab : 'jangan engkau berikan hartamu'. Bagaimana kalau ia menyerangku? Jawab Rasulullah lagi 'seranglah ia'. Bagaimana jika ia membunuhku? Jawab Rasulullah : 'Engkau mati syahid.'"

Penulis disini ingin mengatakan sebuah perumpamaan bahwa harta yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah sesuatu dapat berwujud benda atau barang yang sangat berharga bagi kita. Katakanlah itulah bangsa yang harus kita jaga keutuhannya, kesatuan dan persatuan. Namun tatkala bangsa kita diserang oleh bangsa lain maka kita harus mengadakan serangan balik sampai ketitik darah terakhir. Wujud loyalitas atas daerah dan bangsa akan dipertahankan oleh seorang katakanlah anak bangsa. Dalam persoalan ini, Islam telah

Wacana

menegaskan bahwa bagi yang bersungguh-sungguh melawan para kolonialis atau *kompeuni* yang tentunya dipandang kafir maka Allah telah menjanjikan tempat yang paling mulia di sisi-Nya yaitu surga.

Mati syahid menjadi spirit utama dalam mengusir penjajahan Belanda di Aceh. Para kolonialis ini sangat sukar untuk dapat menduduki Aceh, ini disebabkan oleh para pejuang Aceh yang selalu menghalau dan menghalang-halangi niat Belanda untuk menguasai daerahnya. Berbagai usaha Belanda tempuh mulai dari melancarkan penyerangan-penyerangan sampai dengan usaha mendatangkan Snouck Hurgronje ke Aceh. Snouck, untuk menutupi kecurigaan masyarakat Aceh terhadapnya maka dia memakai nama samaran yaitu Abdul Gaffar. Nama muslim dipakai, agar masyarakat mempercayai segala taktiknya dan tidak mencurigai gerak-geriknya selama berada ditengah-tengah masyarakat Aceh. Untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam, maka negeri Arab merupakan tempat yang tepat bagi dia untuk belajar bahasa Arab sekaligus tentang Islam.

Pada saat Belanda hendak menguasai daerah Aceh, kerajaan Aceh Darussalam dibawah pimpinan Sultan Mahmud Syah. Kerajaan masih tetap eksis namun sudah mulai melemah salah satu penyebabnya adalah diangkatnya sultan yang masih dibawah umur. Akibat dari kelemahan itu Belanda melancarkan serangan untuk menaklukkan terhadap Aceh. Adapun penyerangan Belanda terdiri dari dua agresi yaitu agresi I (April 1873)³ dan Agresi II (Desember 1873-Januari 1874).⁴

Pada agresi I Belanda belum berhasil menaklukkan kerajaan Aceh namun pada agresi II Belanda berhasil menduduki Aceh. Dalam usaha penegakan kekuasaan kolonial di Aceh berbagai cara dan strategi mereka pikirkan, salah satunya adalah pembentukan birokrasi di bawah Gubernur. Van Heutsz yang terkenal sebagai penakluk

Aceh di sini sangat berperan penting. Setelah van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk sementara ia menyerahkan pemerintahan sipil dan militer kepada van der Wijck.

Berdasarkan wacana diatas maka ada salah satu bahagian yang menarik untuk kita telusuri, berkenaan dengan nasionalisme masyarakat Aceh dalam mempertahankan daerahnya dari penjajahan Belanda. Perang kolonial ini disebut juga sebagai upaya perwujudan *Pax Neerlandica* (masa keemasan penjajahan Belanda) di daerah ujung Barat laut kepulauan Indonesia secara resmi telah dimulai.⁵ Pihak Belanda mengatakan "Perang Aceh" sedangkan rakyat Aceh menyebutnya dengan "Prang Kaphe". Penamaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan agama antara masyarakat Aceh dengan penjajah Belanda, sehingga mereka sangat membencinya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, maka terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu *nasionalisme*.

Makna Nasionalisme

Nasionalisme adalah pengindonesiaan dari *nationalism*, yang kadang diindonesiakan dengan 'paham kebangsaan'. Nasi (nation) berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:89), kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Beberapa makna kata bangsa diatas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat.

³ Lihat Mohammad Said Jilid I. hlm. 675

⁴ Lihat Mohammad Said Jilid II. hlm. 3 .

⁵ Munawiah, *Birokrasi Kolonial Di Aceh 1903-1942*. (Yogyakarta : AK Group, 2007). hlm. 28.

Dalam bahasa Indonesia, istilah *nasionalisme* memiliki dua pengertian: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dengan demikian, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Istilah *nasionalis* dan nasional, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "lahir di", kadangkala tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Namun istilah yang disebut terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik.

Dengan demikian, definisi *nasionalisme* adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut para ahli, ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Jiwa nasionalisme muncul, ketika naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Inilah faktor yang melemahkannya. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini. Dalam sejumlah negara, kekhawatiran akan melemahnya *nasionalisme* mulai dibicarakan, termasuk Indonesia yang terus terancam oleh disintegrasi sejak era reformasi yang mulai diganti dengan wacana *lokalisme* akibat semangat 'otonomi daerah' yang kebablasan.

Sejarah memberikan pola-pola ulangan (*recurrent patterns*) mengenai

peristiwa-peristiwa penting yang dialami suatu bangsa di masa lalu. Dengan pola-pola ulangan itu memungkinkan kita mendekonstruksi dan merekonstruksi pola perkembangan saat ini dan memproyeksikannya untuk masa depan. Bercermin pada masa lalu selain memberikan inspirasi imajinatif, juga dalam tingkat tertentu menjelaskan bagaimana posisi kita saat ini. Disinilah saya kira relevansi merenungkan dan melacak kembali akar-akar kebangkitan *nasionalisme* kita di masa lalu.

Ada teori lain mengenai kemunculan nasionalisme.⁶ Dalam tulisannya, "Qu'est-ce Qu'une nation? (Apakah Bangsa Itu?) Ernest Renan berpendapat bahwa unsur formatif dan integrative nasionalisme adalah 'keinginan untuk selalu hidup bersama (*le desire de vivre ensemble*) yang secara historis muncul karena pengalaman penindasan kolonialisme sosial sebagai unsur formatif dan integrative nasionalisme. Peranan media massa elektronik dan cetak, alat-alat transportasi dan jaringan komunikasi masa lainnya menjadi begitu penting dalam pembentukan etos *nasionalisme*. E.J Hobsbawm menyebut beberapa "criteria objektif" nasionalisme : bahasa yang sama (*linguafrance*), etnisitas, persamaan sejarah masa lalu dan ikatan-ikatan cultural.

Pemikiran George Mc. Turner Kahin dalam karya klasiknya, *Nationalism and Revolution in Indonesia* telah memberikan jawaban mengapa nasionalisme Indonesia dan kekuatan-kekuatan sejarah yang membangkitkannya berbeda dengan yang terdapat di belahan bumi Eropa. Satu hal yang menyebabkan kedua nasionalisme itu berbeda adalah konteks historis dan lingkungan tempat bangkitnya kedua nasionalisme itu. Nasionalisme Indonesia bangkit dalam konteks historis yang unik, dan keunikan itu semakin transparan bila nasionalisme Indonesia itu dibandingkan dengan nasionalisme negara lainnya seperti

⁶ <http://www.google.co.id/>. Dr Ahmad Suhelmi, MA adalah Guru Besar FISIP-UI, *Kebangkitan Nasionalisme Indonesia: Suatu Refleksi Sejarah*. Kamis, 22 Mei 2008

Wacana

Filipina, Malaysia dan negara-negara Afrika. Begitu juga dalam skoop yang kecil misalnya saja Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan beribu pulau. Masing-masing daerah berbeda motivasi dan cara untuk mengusir penjajah Belanda dari daerah atau kerajaannya. Masyarakat Aceh lebih cenderung pada motivasi agama, tentunya ini berbeda dengan masyarakat suku yang lain. Namun pada intinya adalah untuk mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda.

Kahin menyebutkan beberapa kekuatan sejarah yang membangkitkan nasionalisme. Pertama adalah agama Islam. Islam sebagai agama mayoritas menjadikan nasionalisme Indonesia unik bila dibandingkan dengan nasionalisme barat. Masyarakat Barat nasionalisme tumbuh karena terjadinya pertarungan antara kaisar dengan kekuasaan gereja, sementara di Indonesia nasionalisme pada segi-segi tertentu, justru merupakan produk ritus keislaman. Dalam bahasa Kahin, nasionalisme Indonesia tidak lain merupakan suatu produk homogenitas keagamaan yang ditanamkan Islam karena ia merupakan agama mayoritas bangsa Indonesia.

Agama Dan Jiwa Nasionalisme Masyarakat Aceh

Jiwa nasionalisme masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh norma-norma Islam. Begitu eratnya kaitan Islam dengan rasa kebangsaan, gambaran tentang "bangsa kita" di masa-masa awal pergerakan nasional tidak lain adalah pribumi muslim. Islam menjelaskan posisi sosial seseorang, apakah ia seorang nasionalis atau bukan. Fungsi identifikasi nasionalistik itu memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di Malaysia. Mereka yang dinamakan "bangsa Melayu" tidak lain adalah mereka yang beragama Islam. Mereka yang non Muslim, bagaimanapun loyalitas mereka kepada bangsa, tetap sulit diidentifikasi atau diakui sebagai "bangsa Melayu", maka, cara terbaik untuk bisa diidentifikasi sebagai "bangsa Melayu" adalah dengan menjadi seorang muslim.

Identifikasi Islam yang begitu kuat dengan etos kebangkitan *nasionalisme* adalah karena agama ini menjadi symbol perlawanan pribumi terhadap kolonialisme Belanda selama berabad-abad. Kehadiran Islam dalam wacana politik zaman penjajahan memperjelaskan identifikasi diri (*self identification*) tentang siapa yang pejuang, penjajah atau antek-anteknya. Dalam perang Aceh, penjajah Belanda diidentifikasi sebagai kafir dan harus diperangi.

Betul seperti pendapat yang diutarakan oleh Snouck Hurgronje bahwa kegigihan rakyat Aceh secara terus menerus memerangi Belanda tidaklah semata-mata karena alasan politik bahwa Belanda adalah penjajah, melainkan juga karena mereka adalah orang-orang kafir yang wajib diperangi. Jadi perlawanan rakyat Aceh memiliki dasar teologis yang kokoh. Dalam konteks inilah konsep jihad (yang memiliki makna : Perang Suci) memiliki peranan khusus dalam mengorbankan semangat anti kafir Belanda. Karena itu tidak mengherankan, menurut Herbert Feith dan Lance Castle berbagai gerakan anti penindasan kolonialis di Indonesia digerakkan oleh ruh jihad Islam.

Berbicara masalah jihad (perang suci), di Aceh terdapat salah satu hikayat yang dinamakan *Hikayat Prang Sabi*. Pada masa perlawanan rakyat Aceh melawan *kompeuni* Belanda hikayat *prang sabi* dianggap sebagai media dakwah yang sanggup membangkitkan semangat perang dan jihad *fisabilillah*.⁷ Oleh pihak *kompeuni* Belanda hikayat tersebut senjata yang sangat berbahaya sehingga pada waktu itu dikeluarkan larangan keras untuk membaca, menyimpan dan mengedarkannya. Snouck Hurgronje merupakan salah seorang sarjana Belanda yang sangat menaruh perhatian terhadap *Hikayat Prang Sabi*.

Dalam Hikayat *prang sabi* mengajarkan kita untuk berjihad, secara tidak

⁷ A. Hajsmy, *Apa sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1977). hlm. 19

langsung telah mengajarkan kita kepada *nasionalisme*. Islam telah mengajarkan bahwa perjuangan melawan orang-orang kafir sebenarnya tidak boleh berhenti. Jihad atau perang suci merupakan kewajiban agama yang berupa tanggung jawab setiap anggota masyarakat Islam.⁸ Perang Aceh atau perang yang dilancarkan rakyat Aceh untuk membela tanah air mereka dari serbuan Belanda (1873) tercatat dalam sejarah sebagai suatu pengalaman yang sangat pahit bagi Belanda. Pengalaman tersebut sekaligus sangat memalukan, sebab setelah bertempur selama puluhan tahun ternyata Aceh tidak pernah mengaku takluk. Perlawanan heroik rakyat Aceh itu telah tercatat dengan tinta emas dalam lintasan sejarah Indonesia, sehingga menjadi bahan pertimbangan pasukan Jepang yang datang kemudian.

Setelah Belanda berhasil menguasai Aceh dalam perang yang menghabiskan begitu banyak biaya dan menelan korban yang amat besar dikalangan mereka. Belanda yakin kekuasaannya bisa bertahan dengan pengorbanan financial yang lebih besar lagi. Berkaitan dengan berbagai kebijaksanaan yang digariskan oleh Snouck Hurgronje berdasarkan pada usaha memberikan jaminan kepada rakyat Aceh bahwa agama dan adat istiadat mereka akan terpelihara dengan baik selama berada dibawah kekuasaan pemerintah Belanda.

Jatuhnya Keraton Aceh pada tahun 1874 bukan merupakan akhir perlawanan rakyat Aceh, akan tetapi perjuangan terus berlangsung secara terputus-putus selama tiga puluh tahun. Pada tahun 1903 Belanda secara resmi mengumumkan telah berhasil mengalahkan Aceh, setelah sultan Muhammad Daud dan orang-orang dekatnya menghentikan perlawanan namun daerah ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Keadaan ini berlangsung sampai sepuluh tahun kemudian, sebab pada masa ini Belanda terus menghadapi serangan dari

pasukan-pasukan gerilya yang populer dengan sebutan muslimin dengan sistem yang berpencar-pencar.

Dalam rangka mempercepat proses penaklukan Aceh, maka Belanda segera memberlakukan *Korte Atjeh-verklaring* (perjanjian pendek Aceh) terhadap *Uleebalang*. Dalam perjanjian ini para *Uleebalang* diharuskan untuk mengakui kedaulatan Belanda atas kesultanan Aceh, sementara Belanda mengukuhkan kekuasaan *Uleebalang - Uleebalang* tersebut atas Nanggroe (wilayah) mereka masing-masing.

Pada tahun 1898 perjanjian ini diperbaiki oleh Snouck Hurgronje dengan memasukkan sebuah pasal baru. Pasal baru ini antara lain menyatakan bahwa para *Uleebalang* menganggap musuh Belanda sebagai musuh mereka juga dan mengakui nanggroe mereka sebagai bagian dari hindia Belanda. Maka sudah jelas bahwa perbaikan perjanjian ini Snouck Hurgronje bermaksud untuk bersekutu dengan para *Uleebalang* dan memisahkan mereka dari rakyat Aceh yang masih terus memerangi Belanda dibawah pimpinan sultan dan ulama-ulama. Ini merupakan strategi utama Belanda dalam upaya untuk menundukkan Aceh.⁹

Di samping itu, menurut Snouck Hurgronje rakyat Aceh yang taat beragama Islam tidak mungkin mau menyerah kepada Belanda. Langkah selanjutnya adalah mereka harus ditundukkan dengan kekerasan, atas saran tersebut maka gerakkan ofensif ke daerah digerakkan secara efektif.¹⁰ Pada awal 1900, perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daud Syah. Termasuk juga para pemimpin adat antara lain : T. Panglima Polem, T. Ben Blang Pidie Aceh Barat. Sementara para ulama terdiri dari Tgk. Di Mata Ie dan Tgk.

⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekkah (Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1049)*. (Jakarta : UI Press, 1999). hlm 15-17 .

¹⁰ Zakaria Ahmad, (et al), *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah Aceh*. (Jakarta : Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982). hlm. 80-81.

⁸ Aksi Poh Kaphe di Aceh Atjeh Moorden (kumpulan Karangan mengenai laporan kasus, hasil penelitian tentang latarbelakang dan sebab musabab pembunuhan Aceh Tempo doeloe. (Banda Aceh : PDIA , 2002). hlm. 21.

Wacana

Di Barat di Pasai, Aceh Utara, Tgk. Cot Plieng, Tgk di Beureu'eh, teungku-teungku di Tiro, Tgk. Chik Mayet dan Tgk. Di Buket, di Pidie serta Tgk. Di Krueng Cut Seunangan dan Habib Meulaboh di Aceh Barat.¹¹ Pada tahun 1903 sultan terpaksa menyerah setelah melewati masa pengejaran oleh pihak Belanda.

Penyerahan dilakukan karena Belanda melakukan penangkapan terhadap isterinya Pocut Murong beserta keluarganya yang lain. Demikian juga dengan Panglima Polem dan Tuanku Raja Keumala setelah memberikan perlawanan yang gigih terpaksa mengikuti langkah sultan, sehingga dia menyerah pada tahun 1903. Dengan alasannya yang sama yaitu Belanda menangkap para isteri dan keluarga para pemimpin.¹² Pada bulan Februari 1904 tokoh terkenal T. Ben Peukan bersama dengan pengikutnya menyerah juga.¹³ Pada tahun ini juga daerah Gayo baru berhasil dimasuki oleh Belanda dibawah pimpinan van Daelen, tentunya setelah menjalani perlawanan yang keras dari masyarakatnya.

Pada saat van Daelen ditetapkan sebagai Gubernur Sipil dan Militer di Aceh. Maka dibawah pimpinannya ia telah melakukan kekejaman-kekejaman dan aksi-aksi teror yang luar biasa, sehingga mengakibatkan ratusan penduduk Aceh laki-laki dan wanita serta anak-anak terbunuh.¹⁴

Kitchhener sebagai salah seorang yang terkenal dalam sejarah perang kolonial mengatakan bahwa Daelan dianggap tidak cocok sebagai pejabat penakluk yang harus memenuhi tuntutan yang diajukan oleh van Heutz.¹⁵ Akibat politik kekerasan yang

dilaksanakan Belanda di Aceh, banyak ulama terkemuka syahid, diantaranya Teungku di Alue Keutapang, Teungku Kadli, Teungku di Cot Cicem, Teungku Leman, Teungku Chik Paya Bakong dan beberapa ulama di Tiro.¹⁶ Karena tindakan-tindakannya yang sangat kejam tersebut van Daelen mendapat kecaman dari orang-orang Belanda itu sendiri yang di muat dalam beberapa surat kabar di negeri Belanda seperti Avondpost di kota Den Haag, akhirnya van Daelen meminta berhenti karena menganggap dirinya tidak bersalah.¹⁷ Perang Aceh yang terkenal dengan *Prang Kaphe* di sini ulama sangat berperan, sehingga dibentuklah satu musyawarah. Musyawarah ini dihadiri oleh 500 orang para pemimpin terkemuka. Hasil dari musyawarah telah dikeluarkannya ikrar satu sumpah dibawah pimpinan Imeum Luengbata dan Teuku Lamnga. Adapun sumpah yang diikrarkan bersama adalah "*wajib perang sabil untuk mengusir kafir Belanda*".

Atas dasar wajib jihad tersebut, maka ulama-ulama menjadi aktif dan mengambil peranan penting. Ulama sebagai pemimpin perang maupun sebagai pengawas koordinasi perlawanan total rakyat terhadap Belanda.

Ketentuan-ketentuan terhadap rakyat umum, menurut keputusan musyawarah, adalah:¹⁸

1. Sifat jihad, rakyat diwajibkan turut serta memanggul senampang atau kelewang adalah mereka yang sudah menyatakan sukarela untuk ambil bahagian langsung.
2. Rakyat diwajibkan gotong-royong untuk segera memperbaiki masjid yang rusak akibat perang supaya kewajiban ibadat tetap terpelihara.

¹¹ G.D.E.J. Hotz, *Beknopt Geschiedkundig Overzicht van den Atjeh-Oorlog*, (Breda : De Koninklijke Militaire Academie, 1924). hlm. 57-58

¹² Munawiyah. op.cit., 2007. hlm. 27.

¹³ G.D.E.J. Hotz, op. cit 1942. hlm. 60-61

¹⁴ Teuku Ibrahim Alfian, (ed), *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Banda Aceh : PDIA, 1997). hlm. 53.

¹⁵ M. H. Du Croo dan H.J. Schmidt, *General Swart Pacificator van Atjeh*, (Maasstricht : Uitgave N.N. Laiter Nypels). hlm. 80

¹⁶ *Mengenai Perlawanan Pihak Aceh seperti di Lhokseumawe, Lhok Sukon, Idi dan Tapaktuan* dapat dilihat dalam Koloniaal Verslag tahun 1908

¹⁷ Muhammad Ibrahim (et.al), *Sejarah Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional, 1991) hlm. 153.

¹⁸ Lihat A. Hasjmy . 1977. hlm.38-39

3. rakyat diwajibkan gotong-royong untuk bersama-sama mengatasi akibat perang.
4. dalam masa perang dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan sukaria yang tiada bertalian dengan agama, seperti seudati dan yang lainnya.
5. Setiap yang membutuhkan bantuan, wajib diberi bantuan oleh penduduk dan persembunyiannya
6. apabila diperlukan untuk membangun benteng (kuta), rakyat diwajibkan bergotong royong
7. Ulama setempat berwenang memberikan bantuan dan menerima pengaduan-pengaduan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dideritanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rakyat Aceh secara sungguh-sungguh dan bersatu dalam mengusir *kompeuni* Belanda. Walaupun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan, kekalahan itu khususnya hanya dalam bentuk senjata yang dipakai untuk berperang. Rakyat Aceh senjata yang dipakai untuk berperang sangat jauh ketinggalan dengan jenis senjata canggih yang dimiliki oleh *kompeuni* Belanda pada waktu itu. Namun semangat yang sudah tertanam dalam sanubarinya tidaklah kalah dan terus menggebu-gebu untuk melawan Belanda, sehingga banyak sekali berjatuhannya para pejuang yang mati syahid, keadaan tersebut tidak menakutkan para pejuang Aceh karena memang itu yang diidamkan-idamkan dalam hikayat *prang sabi*.

Penutup

Masyarakat Aceh sangat gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sehingga Belanda untuk menaklukkan daerah Aceh membutuhkan waktu yang sangat lama. Walaupun akhirnya daerah Aceh dapat didudukinya juga. Namun setelah mereka menempuh berbagai cara sehingga keberadaannya di Aceh bertahan lama.

Salah satu caranya dengan mempertentangkan kaum bangsawan dengan ulama, antara keduanya itu ditanamkan perasaan saling curiga. Sehingga tumbuhlah suasana konflik yang tidak terlerai di dalam sejarah Aceh. Disamping itu Belanda selalu berusaha mencegah dan mematahkan setiap upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh kedua kekuatan pribumi tersebut.

Masyarakat Aceh, jiwa nasionalisme tidak diragukan lagi. Perlawanan untuk melawan Belanda bangkit dari berbagai pelosok daerah Aceh. Perang Aceh yang diperkirakan terjadi pada tahun 1873-1903, yaitu antara Kesultanan Aceh melawan Penjajah Belanda, namun secara faktual perang Aceh terus berlangsung hingga masuknya tentara Jepang Ke Aceh yang menggantikan posisi Belanda, pasukan Jepang mendarat di Aceh pada tahun 1942.

Bagi masyarakat Aceh, perang melawan Belanda merupakan perang sabil (Perang di jalan Allah), karena melawan kaphe (orang kafir) Belanda. Kekuasaan pelaksanaan perang dipimpin oleh ulama dan uleebalang seperti Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman (Wilayah Aceh Barat dan Aceh Pidie), Teungku Chik Di Paya Bakong bersaudara, Teungku Syeh Ibnu Hajar, Tengku Chik Di Paya Bakong Khatib, Teungku Chik Di Paya Bakong Seupot Mata (wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur), Teuku Cut Ali (Aceh Selatan), Panglima Polem, Teuku Umar Djohan Pahlawan dan lain-lain.¹⁹ Disamping itu, tidak kalah juga adanya srikandi-srikandi Aceh seperti ; Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati, Pocut Barein, Pocut Meurah Inseun, Pocut Meurah Intan dan lain-lain.

¹⁹ Mr. Teuku Moehammad Hasan, *Dari Aceh Ke Pemersatu Bangsa*. (Jakarta : Papis Sinar Sinanti 1999). hlm. 4

Cut Zahrina, S.Ag adalah Tenaga Penterjemah pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Memaknai Nasionalisme dalam Seni Tari Tradisional Aceh

Oleh: Essi Hermaliza

Pendahuluan

Sebagai daerah yang kaya akan budaya, Aceh memiliki seni tari yang luar biasa. Tidak hanya rakyatnya yang berdecak kagum akan ketangkasan dan kedinamisan gerak yang ditampilkan, namun warga dunia pun dibuat terpana dan terkagum-kagum. Keberadaan Aceh dalam tatanan global bisa dikatakan tidak dapat dipandang sebelah mata dalam hal seni budaya, khususnya seni tari yang kini telah cukup populer.

Lihat saja, bagaimana riuhnya tepuk tangan penonton ketika Tari Saman menyelesaikan tahap demi tahap gerakannya, atau lihat bagaimana mata penonton tidak berkedip ketika *Seudati* menggoyang lantai panggung dengan kelincahannya. Dengar pula bagaimana pesona Rapa'i Geleng membuat penikmatnya melongo, dan masih banyak seni tari lainnya yang tidak kalah mempesonanya, tidak hanya menghibur tapi juga member banyak nilai baik dari simbol-simbol gerakannya maupun dari syair-syair lagunya.

Akan tetapi mengapa generasi muda masih memandang sebelah mata? Apakah ini adalah karena nasionalisme yang semakin menipis? Ataukah karena mereka tidak memahami arti nasionalisme sebagai anak bangsa?

Perhatikan petikan kejadian berikut:

"Pulang yuk, ngapain nonton tarian gituan, kampungan banget". Saya terperanjat ketika saya mendengar kalimat itu meluncur mulus dari lidah saudara sepupu saya, saat itu kami sedang mengunjungi Pameran Budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Balai Chik Di Tiro atau yang lebih dikenal dengan nama Gedung Sosial. Pameran tersebut juga menggelar festival

tarian-tarian Aceh dari berbagai daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Antusiasme masyarakat tampak lumayan, karena Gedung Sosial tampak ramai pengunjung. Tetapi ada komentar yang mengundang tanda tanya yang muncul dari remaja seumur 19 tahun yang mengganggu pikiran saya. Ini adalah kesekian kalinya saya mendengar. "Kampungan", itukah nilai dari tarian tradisional yang dibanggakan seluruh rakyat di bumi Serambi Mekkah ini?

Konsep Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme. Sebaliknya, narasi-narasi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan transaksi sosial, politik, dan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara dunia ketiga, seperti India, China, Brazil, dan Indonesia.¹

Sebagai konsep sosial, nasionalisme tidak muncul dengan begitu saja tanpa proses

¹ Sulfikar Amir, *Epistimologi Nasionalisme*, Rubrik Bentara Kompas, <http://www.kompasonline.com/bentara/epistimologi-nasionalisme>

evolusi makna melalui media bahasa. Dalam studi semantik Guido Zernatto (1944), kata *nation* berasal dari kata Latin "nation" yang berakar pada kata "nascor" yang bermakna 'saya lahir'. Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada Abad Pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Perhias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang).²

Dari sumber lain, Nasionalisme secara bahasa berasal dari kata berbahasa Inggris "nation", adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.³

Dalam hal ini, Nasionalisme dibahas dalam konteks seni budaya yang difokuskan kepada kecintaan dan kebanggaan terhadap seni budaya bangsa dimana nasionalisme itu muncul sebagai rasa dan sikap yang menganggap seni budaya lokal adalah seni budaya terbaik yang patut dilestarikan.

Pemahaman tersebut dekat dengan pemahaman awam tentang konsep Chauvinisme. Namun kedua konsep itu tentu saja berbeda, Nasionalisme memiliki kecenderungan pada gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa, sedangkan Chauvinisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Contoh Chauvinisme seperti yang dikemukakan oleh *Adolf Hitler* dengan kalimat *Deutschland Uber Alles in der Welt* (Jerman di atas segala-galanya dalam dunia). Slogan ini kadang masih dipakai di Jerman untuk memberi semangat pada atlet dalam bertanding. Inggris juga punya slogan *Right or Wrong is My County*. Demikian pula

² Ibid.

³ Nasionalisme, Artikel Kategori: Politik, <http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, accessed on 22 April 2008.

Jepang yang menganggap bangsanya merupakan keturunan Dewa Matahari.⁴

Jadi secara umum dapat digambarkan bahwa nasionalisme merupakan paham yang terbentuk karena kecintaan terhadap tanah air yang pada akhirnya dapat diikuti dengan sikap patriotik, rela berkorban, dan lain-lain yang berhubungan secara langsung pada pembelaan bangsa negara.

Seni Tari Tradisional Aceh

Berbicara tentang nasionalisme, seni tari juga memuat nilai nasionalisme atau pesan yang dapat meningkatkan nasionalisme masyarakat. Berikut analisis nasionalisme dalam seni tari tradisional yang tumbuh dan berkembang di bumi Serambi Mekkah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Tari *Seudati*

Kata *Seudati* berasal dari bahasa Arab, *syahadati* atau *syahadatain*, yang berarti kesaksian atau pengakuan. Dalam bahasa Aceh, *syahadati* diubah menjadi *Seudati*. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa kata *Seudati* berasal dari kata *seurasi* yang berarti harmonis atau kompak. Selanjutnya, kata *Seudati* dijadikan salah satu istilah tarian yang dikenal dengan Tarian *Seudati*. Tarian ini cukup berkembang di Aceh Utara, Pidie dan Aceh Timur. Di daerah yang disebutkan terakhir tarian *Seudati* dijadikan sebagai salah satu tarian tradisional.

Tarian tradisional yang satu ini sempat mengalami akulturasi. Sebelumnya tarian ini disebut *rato* yang difungsikan sebagai hiburan yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral bahkan dakwah penyebaran Islam. Namun dalam perjalanannya mengalami perubahan sehingga saat ini *Seudati* lebih dikenal sebagai tarian tradisional yang menunjukkan kejantanan, keberanian sehingga diberi julukan sebagai Tari Perang Rakyat Aceh.⁵

⁴ Ade Sulaiman, dkk., *Memunjukkan semangat kebangsaan*, <http://www.lsnanimurti's Weblog.htm>, accessed on 1 Agustus 2008.

⁵ T. Alibasjah Talsya, *Atjeh Jang Kaya Budaya*, Pustaka Meutia, Banda Atjeh, 1972, hlm. 10

Seudati ditarikan oleh delapan orang laki-laki sebagai penari utama, terdiri dari satu orang pemimpin yang disebut *syekh*, satu orang pembantu *syekh*, dua orang pembantu di sebelah kiri yang disebut *apeet wie*, satu orang pembantu di belakang yang disebut *apeet bak*, dan tiga orang pembantu biasa. Selain itu, ada pula dua orang penyanyi sebagai pengiring tari yang disebut *aneuk syahi*.

Tarian ini tidak menggunakan alat musik, tetapi hanya membawakan beberapa gerakan, seperti tepukan tangan ke dada dan pinggul, hentakan kaki ke tanah dan petikan jari. Gerakan tersebut mengikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan. Beberapa gerakan tersebut cukup dinamis dan lincah dengan penuh semangat. Namun ada beberapa gerakan yang tampak kaku, tetapi sebenarnya memperlihatkan keterampilan dan kegagahan si penarinya. Itu, tepukan tangan ke dada dan perut mengesankan kesombongan sekaligus kesatria.

Pakaian yang dikenakan dalam tarian *Seudati* terdiri dari celana panjang dan kaos oblong lengan panjang yang ketat, keduanya berwarna putih; kain songket yang dililitkan sebatas paha dan pinggang; rencong yang disisipkan di pinggang; *tangkalok* (ikat kepala) yang berwarna merah yang diikatkan di kepala; dan sapu tangan yang berwarna kuning. Busana seragam ini hanya untuk pemain utamanya, sementara *aneuk syahi* tidak harus berbusana seragam.

Bagian terpenting dalam tarian *Seudati* terdiri dari *likok* (gaya; tarian), *saman* (melodi), irama kelincuhan, serta kisah yang menceritakan tentang kisah kepahlawanan, sejarah dan tema-tema agama.

Tari *Seudati* terdiri dari beberapa tahap, yaitu: *saleum aneuk*, *saleum syekh*, *likok*, *saman*, kisah, *pansi*, *lanie/gambus* pembuka dan gambus penutup. Fase *saleum*, dimaksudkan sebagai tahap memberi salam kepada syahi dan hadirin yang melihat pertunjukan itu, kemudian diikuti fase *likok* yaitu fase penentuan gerakan yang akan ditampilkan dan *saman* dimana beragam

syair dan pantun saling disampaikan dan terdengar bersahutan antara *aneuk syahi* dan *syekh* yang diikuti oleh semua penari. Selain itu ada juga fase kisah dan lainnya, dalam fase itu dapat dilantunkan syair yang berupa cerita-cerita sejarah, pesan-pesan agama Islam, pesan adat atau *hadihmaja*, serta pesan-pesan yang bersifat pembakar semangat.

Dulunya di zaman peperangan *Seudati* sering digunakan untuk membangkitkan semangat perang sabil melawan *kaphe* penjajah. Di antara syair yang sering dilantunkan adalah syair yang dipetik dalam *Hikayat Prang Sabi* (Hikayat Perang Sabil). Berikut sepenggal syair *Hikayat Prang Sabi*.⁶

*Beu e' muwoe Raja Aceh
Gaseh Allah ade neubri
Miseue raja nyangka dilee
Ade meu thee hana sakri*

*Po teumeureuhom raja dilee
Neu prang sitree jeueb-jeueb nanggri
Bandum kaphe talo neu prang
Panglima prang that beurahi*

*Nanggroe Aceh sikeulian
Pidie meunan he ya Rabbi
Lom Meureudu ngon peusangan
Sawang meunan teuh Lhokseumawe
Teulheueh ryan Pase lom Geudong
Kaphe Bajeung bek le neubri*

*Neubri beuhabehe sikeulian
Beu teureuban sampoe Idi
Neubri beugadoh dum kaphe ryan
Bek ji kaman nanggroe ini*

Terjemahannya:

Agar kembali raja Aceh
Karunia Allah adil diberi
Seperti raja terdahulu
Adil masyhur tak terperi

⁶ Anita T. Iskandariata, M.Hum, Makna Hikayat Perang Sabil di Aceh, Ar Raniry Press, Banda Aceh, 2004, hlm. 57

Baginda Marhum raja terdahulu
Memerangi seteru di setiap negeri
Sekalian kafir kalah berperang
Panglima perang sangat berani

Negeri Aceh sekalian
Pidie pun demikian o ya Rabbi
Juga Meureudu dengan Peusangan
Sawang pun sama dengan Lhokseumawe
Setelah itu Pase dan Geudong
Kafir jahannam jangan dibiarkan lari kemari

Semuanya engkau musnahkan
Agar terbang sampai ke Idi

Semoga lenyap kafir itu
Tidak berdiam di negeri ini

Syair-syair ini menggambarkan kecintaan rakyat Aceh terhadap tanah air. Pada dasarnya nasionalisme rakyat Aceh didasari oleh motivasi cinta kepada agama dan tanah air. Dilihat dari beberapa wilayah yang disebutkan dalam syair menunjukkan bahwa rakyat Aceh tidak hanya mencintai wilayah tertentu namun mencintai seluruh negeri yang menjadi bagian dari wilayahnya. Ketika Aceh menjadi wilayah Kesultanan Iskandar Muda, bisa saja wilayah yang dibela itu adalah semenanjung kesultanan, namun pada masa sekarang wilayah yang dimaksud tentulah Indonesia secara menyeluruh.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika di Aceh, syair-syair *Seudati* dapat disesuaikan. Seorang syekh ataupun aneuk syahi yang handal dapat menciptakan syair-syair secara spontan sesuai dengan kondisi saat tampil. Dalam pertunjukan dalam rangka memperingati hari besar nasional syairnya biasanya disesuaikan. Misalnya, pada peringatan tujuh belasan, hari kemerdekaan Republik Indonesia, syair diisi dengan semangat nasionalisme dengan bermacam-macam bentuk syair yang dapat menambah kecintaan masyarakat terhadap bangsanya.

Hal ini menunjukkan bahwa melalui *Seudati* sikap nasionalisme dapat ditumbuhkembangkan. Karena gerakannya yang harmonis dan patriotik secara psikis dapat

menyampaikan pesan itu dengan lebih berkesan.

2. Tari Saman

Dalam seni tari tradisional lainnya, tersebut pula salah satu tari konvensional yang cukup populer yaitu Tari Saman. Saman adalah tari yang ditampilkan dengan kegembiraan. Kata *Saman* berasal dari kosa kata bahasa Arab yaitu *samaniah* yang berarti delapan.⁷ Tarian ini memang ditarikan oleh delapan orang penari atau lebih dan dua orang syekh yang bertugas melantunkan syair-syair pengiring gerakan Tari Saman atau yang biasa disebut *Ratoh* yang berarti nyanyian.

Tari Saman merupakan tarian Aceh terpopuler di antara tarian-tarian yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam. Tari Saman pada awalnya bernama *Tari Rateb Meusekat* yang ditampilkan oleh sejumlah perempuan dan nikmati oleh para perempuan pula. Sedangkan Saman ditarikan oleh sejumlah laki-laki. Tari ini dimainkan oleh pemuda-pemuda di dataran tinggi Gayo. Namun dalam perkembangannya tarian Aceh yang ditarikan dengan posisi duduk, mengandalkan kecepatan dan keharmonisan gerak dikenal dengan Tari Saman, walaupun ditarikan oleh laki-laki ataupun perempuan.

“Apalah arti sebuah nama”, dalam hal ini pepatah itu sepertinya cukup tepat. Mengingat pesatnya perkembangan Tari Saman tersebut, dengan kreasi yang semakin menakjubkan, salut tetap tertujukan untuknya.

Popularitas tarian yang satu ini telah merambah seluruh pelosok negeri dan dunia. Bahkan para peneliti seni dari luar negeri ada yang datang khusus untuk meneliti tarian yang satu ini.

Popularitas itu pula yang kemudian memunculkan rasa nasionalisme pada diri anak negeri. Nasionalisme tersebut termotivasi dari rasa bangga terhadap budaya bangsa. Tari Saman tidak harus ditarikan oleh anak Aceh, tapi juga dimainkan oleh

⁷ *Ibid.*, hlm. 22..

sejumlah anak di daerah lain. Bahkan hampir semua SMA di daerah Jabodetabek mempunyai kegiatan ekstra kurikuler tari Saman. Hampir tiap minggu selalu ada festival yang diikuti belasan hingga puluhan SMA. Karena tradisi festival ini, banyak variasi gerakan tercipta.

Hal ini menunjukkan bahwa Saman tidak hanya milik Aceh tapi milik Indonesia. Setiap anak bangsa di negeri ini dapat bangga menyebutkan Tari Saman adalah salah satu seni budaya Indonesia. Jadi ketika Saman ditampilkan di Eropa, Asia, Amerika, Australia dan Afrika dan dibanjiri pujian kekaguman itu tidak hanya ditujukan pada seni budaya Aceh, akan tetapi seni budaya Indonesia.

Bayangkan jika tarian ini diklaim oleh bangsa lain sebagai seni budayanya, tak hanya Aceh yang bergolak namun juga se-Indonesia. Mengapa? Karena nilai nasionalisme pasti ada dalam diri setiap anak bangsa di negeri ini.

Penutup

Merujuk pada fenomena tersebut diatas kiranya sangat tidak pantas bila masih ada di kalangan generasi muda apalagi di Aceh sendiri menganggap seni tari tradisional sebagai *performance* yang kampungan. Apakah ini yang membuat perkembangan Saman terbatas di Nanggroe Aceh Darussalam?

Marzuki, seorang pelatih tari tradisional Aceh yang berdomisili di Jakarta menyebutkan bahwa di luar Aceh, Saman berkembang dengan baik, ada variasi gerakan yang inovatif tercipta. Hal itu disebabkan oleh banyak diselenggara-kannya festival-festival Tari Saman yang membuat penarinya menjadi lebih kreatif dan kompetitif.⁸ Sedangkan di Aceh kegiatan semacam itu sangat jarang diselenggarakan.

Namun perlu diperhatikan bahwa penanaman nasionalisme kepada generasi muda dapat ditanamkan melalui seni. *Seudati* dan Saman hanya sampel sederhana. Masih banyak seni budaya lainnya yang dapat dijadikan media untuk menanamkan nasionalisme semenjak dini.

⁸Amir Sodikin, *Tari Saman*: http://www.kompas.com/kompas_cetak/0612/01/SocialImagination.htm

Pendidikan dan Tumbuhnya Kesadaran Nasionalisme Masyarakat Aceh

Oleh Sudirman

Pendahuluan

Perjuangan bangsa pada umumnya diartikan sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air, kerelaan, dan kesadaran untuk membela negara yang timbul pada suatu bangsa. Nasionalisme suatu bangsa lebih disebabkan oleh adanya kemauan bersama dari kelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan budaya, suku dan agama. Demikian juga oleh faktor geografis, ekonomis, historis, dan lain-lain.

Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat Aceh. Dalam bidang pendidikan dapat diamati sejarah Aceh awal abad XX, karena di samping berperang melawan Belanda, sebahagian masyarakat Aceh mulai mengenal salah satu unsur kebudayaan Barat, yaitu pendidikan model Barat yang sebelumnya hanya dikenal pendidikan model dayah. Akibat kontak kebudayaan itu timbullah perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat Aceh. Demikian juga pendidikan agama ikut menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman dengan melakukan berbagai reformasi pada pendidikan agama. Dengan pendidikan itu, melahirkan keinginan untuk hidup bersama melalui kesadaran berbangsa.

Pendidikan Barat

Pada mulanya Belanda menjalankan pemerintahan kolonialnya di Aceh melalui lembaga-lembaga adat. Untuk mengikutsertakan lembaga-lembaga itu dalam struktur birokrasinya yang dirasionalkan sesuai kebutuhan birokrasi kolonial, diperlukan uleebalang yang berpendidikan moderen. Rakyat pun perlu ditingkatkan kecerdasannya melalui sekolah desa untuk dapat menulis, membaca huruf latin dan berhitung. Dengan pendidikan itu, Belanda yakin bahwa rakyat tidak akan

mengikuti seruan beberapa orang elite agama untuk melawan pemerintah Belanda.

Pada tahun 1901 sudah ada beberapa putra *uleebalang* yang dikirim bersekolah ke Kutaraja (Banda Aceh). Semenjak tahun 1904 mereka mulai mengirinkan ke *Kweekschool* (Sekolah Guru) di *Fort de Kock* (Bukittinggi). Ada juga di antara mereka yang dikirim ke Bandung dan kalau dianggap sudah mahir berbahasa Belanda, ada yang dipilih untuk meneruskan ke *Opleiding School Voor Indische Ambtenaren* (OSVIA/sekolah pamong praja bumiputera) di Serang.¹

Pada tahun 1907, Gubernur Sipil dan Militer, Van Daalen, memprakarsai berdirinya sekolah-sekolah desa di Aceh, mula-mula di Aceh Besar dengan murid 38 orang. Sekolah untuk anak-anak perempuan didirikan pertama kali di Ulee Lheue pada tanggal 1 Maret 1910 atas usaha swasta.² Sekolah untuk anak-anak perempuan yang kedua di buka di Lamreung pada tanggal 9 Oktober 1913, dan yang ketiga pada tanggal 1 Desember 1913 di Kutaraja. Semenjak itu jumlahnya berkembang menjadi 20 buah dengan hampir 1.200 orang murid.³ Pada masa pemerintahan Gubernur Swart, sekolah-sekolah desa bertambah jumlahnya. Pada tahun 1909 berjumlah 51 buah dengan 2.009 orang murid, tanpa murid-murid perempuan.⁴ Sekitar lima tahun kemudian, pada akhir

¹Ibrahim Alfian, "Kontak Kebudayaan dan Pendidikan Moderen di Aceh pada Awal Abad XX", dalam Badruzzaman Ismail, dkk. (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 389.

²J. Kreemer, *Atjeh II*, (Leiden : E. J. Brill, 1922), hlm. 165.

³*Ibid*

⁴*Ibid.*, hlm 163.

Wacana

tahun 1914, di seluruh Aceh terdapat 165 buah sekolah dengan murid lebih 8.200 orang dan termasuk di dalamnya enam buah sekolah untuk anak perempuan dengan jumlah murid 240 orang.⁵ Pada tahun 1919 sekolah desa itu meningkat menjadi 258 buah dengan 15.476 orang murid, di antaranya 20 buah sekolah perempuan dengan 1.161 orang murid.⁶

Pada akhir 1918, ada sekitar 490 orang guru bekerja pada 250 sekolah dengan jumlah murid 14.747 orang, yaitu dua guru per sekolah dan satu guru untuk 30 orang murid.

Untuk orang-orang kampung yang terpendang dan anak-anak pegawai rendah didirikan sekolah rendah lima tahun yang dinamakan *Inlandsche School (Vervolg School)* atau Sekolah Melayu. Pada tahun 1930 terdapat 1,1 % dari penduduk Aceh yang telah bebas buta huruf latin, sedangkan di Jawa pada waktu itu sekitar 5,5 %.⁷ Jumlah Penduduk Bumiputra di Aceh tahun 1918 adalah 709.841 jiwa.⁸

Reformasi Pendidikan Agama

Para elite agama akhirnya turut pula menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mengambil bahagian pula dalam pola sekolah-sekolah moderen untuk menaikkan martabat mereka. Akan tetapi tidak semua kesempatan terbuka bagi mereka. Kecuali beberapa orang, mereka pada umumnya tidak dapat memasuki sekolah lanjutan negeri. Untuk mengikuti kemajuan yang telah dicapai oleh kalangan elite adat dalam dunia yang terus berubah, mereka mencari jalan keluar dengan mengirimkan putera-puteranya ke Minangkabau, Sumatera Barat, untuk memasuki Sekolah Normal Islam dan Sekolah Thawalib, oleh karena di daerah itu

modernisme dalam lembaga pendidikan Islam sudah cukup berkembang.

Adapula yang mengirinkan putera-puteranya ke Jawa untuk sekolah menengah umum Muhammadiyah, Sekolah Guru Muhammadiyah, dan sebagainya. Elite agama akhirnya mengadakan menyesuaikan diri dengan mendirikan sekolah-sekolah agama moderen. Sebelum elite agama Aceh memprakarsai berdirinya madrasah-madrasah, orang Minangkabau dan orang Arab telah terlebih dahulu mengambil langkah untuk mendirikan sekolah-sekolah agama moderen di Aceh. Pada tahun 1919 orang-orang Minangkabau mendirikan cabang Sumatera Thawalib di Tapaktuan (Aceh Selatan) Beberapa tahun kemudian madrasah yang sama didirikan pula di Labuhanhaji (Aceh Selatan), Meulaboh, dan Sinabang. Madrasah itu meniru pola induknya di Sumatera Barat dengan guru-guru yang juga didatangkan dari Sumatera Barat.⁹

Seorang pendatang dari Sumatera Barat bernama P.K.A. Majid, mendirikan pula *Diniyah School al-Islamiah* di Sigli pada tahun 1924.¹⁰ Di Lhokseumawe seorang pedagang Arab, Syaikh al-Kalali, membangun *Madrasah Jamiah al-Isliah wal Irsyad al-Arabiyah* pada tahun 1927. Seorang pedagang Arab yang lain, Syaikh Husin Syihab, mendirikan pula Madrasah Ahlunnah wal Jamaah di Idi pada tahun 1928.¹¹

Kegiatan elite agama Aceh dalam mendirikan sekolah-sekolah agama dimulai dari kerabat sultan Aceh, Tuanku Raja Keumala dan Tuanku Abdul Aziz, pada tahun 1923 membangun Madrasah al-Khairiyah di Mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja (Banda Aceh). Teungku Abdulwahab Seulimuem (1898-1966), tamatan Dayah Jeumala, pada tahun 1926

⁵Kolonial *Verlag*, 1908, hlm. 20.

⁶J. Kreemer, *op.cit.*, hlm. 159.

⁷J. Jongejans, *Atjeh Land en Volk, Vroeger en Nu* (Baarn : Hollandia Drukkerij, 1939), hlm. 254.

⁸ *Kolonial Verlag*, 1918.

⁹Isa Sulaiman, *Agresivitas, Revolusi, dan Pemberontakan Aceh, 1942-1962*, (Banda Aceh, 1991), hlm. 45.

¹⁰*Kolonial Verlag*, 1929, hlm. 77.

¹¹Isa Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 46.

mendirikan Madrasah Najdiyah dan kemuadain berubah menjadi Perguruan Islam di Keunaloi, Seulimuem, Aceh Besar.¹²

Pada tahun 1930. Teungku Syaikh Ibrahim Lamnga bersama dengan T. Main, uleebalang Montasiek, Aceh Besar mendirikan Jamiah Diniyah al Montasiah (Jadam), di Montasiek, H. Muhammad Arief, pendatang asal Minangkabau yang pernah di Darul Ulum, Kairo, sebagai pemimpin madrasah. Selain itu, Teungku Hasballah Indrapuri (1888-1958) dan Teungku Abdullah Umar Lam U (1892-1970) mendirikan pula madrasah masing-masing Madrasah Hasbiyah di Indrapuri, Aceh Besar pada tahun 1927 dan Madrasah Diniyah di Montasiek, Aceh Besar.¹³

Di Pidie, pelopor pendidikan agama adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan dibantu oleh Teungku Abdullah Ujong Rimba, yang mendirikan Jamiatuddiniyah di Peukan Pidie, Sigli pada tahun 1929. Dua tahun kemudian dengan bantuan uleebalang Mukim II Pineung, T. Bentara H. Ibrahim, mendirikan pula Madrasah as-Saadah al-Abadiyah di Blang Paseh, Sigli.¹⁴

Di Aceh Utara dengan bantuan uleebalang Peusangan, Teuku Chik M. Johan Alamsyah, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (1900-1949) membangun perguruan Al-Muslim di Matang Glumpang Dua pada tahun 1929. Ulama itu bersama dengan Teungku Syaikh Ibrahim berkunjung ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri perkembangan sekolah-sekolah agama di sana.¹⁵

Para lulusan madrasah yang masih setingkat ibtidaiyah (dasar) pada masa itu meneruskan pelajaran mereka ke luar Aceh, di antaranya Ali Hasjmy, Sayid Abubakar, A. Jalil Amin, M. Abduhsyam memilih Sumatera Barat. Amir Husin al-Mujahid memilih Tanjung Pura, M. Hasbi Ash-

Shidieqie dan Cek Mat Rahmany berangkat ke pulau Jawa, sedangkan M. Nur el-Ibrahimi dan Usman Raliby menuju Mesir, dan A. Wahab Dahlawi melanjutkan pelajaran ke India.¹⁶

Sebahagian di antara mereka yang kembali dari menuntut ilmu di perantauan menjadi guru di madrasah-madrasah, seperti Ali Hasjmy dan Sayid Abubakar di Perguruan Islam Seulimuem, M. Nur el-Ibrahimi di Madrasah Nahdatul Islam (Madni) yang sebelumnya bernama Madrasah Ahlussunnah wal Jamaah.¹⁷

Untuk membangun Perguruan Islam tingkat menengah sebagai kelanjutan madrasah-madrasah ibtidaiyah, maka Muhammadiyah mendirikan *Sekolah Leergang* di Kutaraja pada tahun 1936 di bawah pimpinan Teungku Ismail Yakub, yang dua tahun kemudian diubah namanya menjadi Darul Muallimin dipimpin oleh Teungku Hasbi Ash-Shiediqie. Pada tahun 1940 atas prakarsa Panglima Sagi Mukim XXII, Teuku M. Daud Panglima Polem didirikan Mahad Imanil Mukhlis (MIM) di Lampaku, Aceh Besar dipimpin oleh Ilyas M. Ali, pendatang dari Minangkabau, lulusan Mesir. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1939 didirikan pula Perguruan Normal Islam di Bireun di bawah pimpinan Teungku M. Nur el-Ibrahimi.¹⁸

Kesadaran Nasionalisme

Berkembangnya sistem pendidikan moderen telah melahirkan suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Pemuda-pemuda Aceh yang telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah-sekolah pemerintah Belanda dan juga dari sekolah-sekolah agama yang modernis, sebagiannya menjadi tokoh-tokoh yang memelopori munculnya kesadaran nasionalisme di daerah Aceh.

¹²Ibid., hlm. 47.

¹³Ibid.,

¹⁴Ibid.,

¹⁵Ibid., hlm. 48-49.

¹⁶Ibid., hlm 50-51.

¹⁷Ibid. dan Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1987, hlm. 55-57.

¹⁸ Ibid., hlm. 52-53.

Berdasarkan pengalaman mereka selama dalam pendidikan, terutama yang dilihat atau dialami sendiri di luar daerah Aceh, timbul keinginan untuk menghimpun diri dalam wadah tertentu (organisasi moderen). Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat mereka mencoba berjuang dengan cara-cara tidak lagi dengan menggunakan kekerasan, tetapi melalui organisasi-organisasi, baik yang khas Aceh maupun yang berasal dari luar Aceh. Pergerakan nasional yang telah muncul di pulau Jawa semenjak tahun 1908, bergema pula di daerah Aceh.

Pada tanggal 17 Desember 1916 di Kutaraja (Banda Aceh) sekelompok pemuda mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Vereeniging Atjeh* (Serikat Aceh). Pengurusnya adalah : Teuku Chik Muhammad Thayeb sebagai ketua, Teuku Teungoh sebagai wakil ketua, Nyak Cut sebagai sekretaris pertama dan Abu Bakar sebagai sekretaris kedua, Teuku Usen dan Teuku Chik Muhammad sebagai bendahara. Teuku Johan Alamsyah dan Teuku Asan sebagai komisaris. Sedangkan anggotanya terbuka bagi seluruh rakyat Aceh.

Tujuan didirikannya *Serikat Aceh* itu secara umum adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh, yaitu : untuk memajukan dan memperbaiki sistem pendidikan di Aceh dan memperbaiki sopan santun yang sedang berlaku dalam masyarakat Aceh pada waktu itu.¹⁹

Organisasi kebangsaan yang berasal dari pulau Jawa yang pertama masuk ke Aceh adalah Sarekat Islam. Pada mulanya muncul di Tapaktuan (Aceh Selatan) pada tahun 1916, kemudian muncul pula di tempat-tempat lain seperti di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Beberapa tokoh uleebalang seperti Teuku Keujruen Chik Muhammad Alibasyah, uleebalang Samalanga, Teuku Abdul Hamid Orang Kaya Sri Maharaja uleebalang Lhokseumawe, Teuku Chik Muhammad Said dari Cunda, Teuku Abdul Latif dari Geudong, dan Teuku Raja Budjang dari Nisam bersama dengan

ratusan rakyatnya menjadi anggota Sarekat Islam.²⁰ Hingga tahun 1920, Sarekat Islam menjadi organisasi politik yang cukup kuat di Aceh, sehingga mengkhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan pemimpin Serikat Islam di Aceh selalu diawasi. Pada tahun 1926, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap tokoh Serikat Islam.

Organisasi *National Indische Partij* (NIP) masuk ke Aceh pada bulan Februari 1919. Seorang tokoh partai itu, Teuku Chik Muhammad Thayeb, uleebalang Peureulak. Ketua cabang partai itu di Kutaraja ialah Teuku Nyak Arief. Di samping itu, pada tahun 1919 Teuku Nyak Arief juga menjadi ketua *Atjeh Vereeniging* (Serikat Aceh) menggantikan Teuku Chik Muhammad Thayeb yang diangkat menjadi anggota *volksraad* (1918-1920) di Batavia. Organisasi itu ternyata tidak begitu berkembang di Aceh, apalagi setelah Teuku Nyak Arief harus berhenti dari keanggotaannya karena pada tahun 1920 diangkat menjadi Panglima Sagi XXVI Mukim menggantikan orang tuanya,²¹ kemudian juga pada bulan Mei 1923 organisasi ini di pulau Jawa telah membubarkan diri.²²

Jong Islamieten Bond (JIB), organisasi ini didirikan di Aceh pada tahun 1930 M, dengan dukungan Teuku Nyak Arief cabang JIB dapat didirikan di Kutaraja, Sigli dan Lhokseumawe, dengan catatan bahwa organisasi ini tidak mencampuri urusan politik di Aceh. Ketentaun itu diberlakukan karena setiap organisasi Islam yang masuk ke Aceh selalu dicurigai oleh Pemerintah Hindia Belanda.

²⁰Van Sluijs, "Nota", *Atjeh en onderhoorigheden*, September 1918-Oktober 1920, *Keenpapieren*, 797/156, KIT, hlm. 15.

²¹Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm. 21.

²²A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Djakarta : Dian Rakjat, 1970), hlm. 72.

¹⁹ mailr. 3225/20.

Cabang Kutaraja juga mendirikan bagian wanitanya yaitu *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA), pada tahun 1931 membuka sebuah sekolah khusus untuk putri, tetapi pada tahun 1932 sekolah itu diubah menjadi sekolah campuran (pria dan wanita). Pada Tanggal 6 Oktober 1932 JIB mendirikan lagi sebuah cabang di Sabang yang diketuai oleh Abdurrahim dan setelah itu JIB tidak mendirikan lagi cabang di Aceh.²³

Organisasi Muhammadiyah masuk ke Aceh pada tahun 1923 M, dibawa oleh mantan sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi, S. Djaja Soekarta, yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada Jawatan Kereta Api Aceh. Akan tetapi, pada waktu itu belum dimungkinkan untuk mendirikan sebuah cabang di Aceh karena belum ada pengurusnya. Baru pada tahun 1927 M, dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama A.R. Soetan Mansoer, organisasi Muhammadiyah secara resmi didirikan di Kutaraja. Adapun pimpinannya dipilih R.O. Armadinata, konsul dijabat oleh Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong. Pada tahun 1928 M organisasi ini mendirikan pula sebuah perkumpulan wanita, Aisyiyah, yang mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan dan kemajuan kaum wanita ; sebuah organisasi kepanduan yang bernama Hizbul Wathan, dan sebuah lembaga pendidikan HIS.

Perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah juga mendirikan cabang-cabang di beberapa kota lain di Aceh. Pada masa akhir Pemerintahan Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh sebanyak 8 buah.²⁴

Dibandingkan dengan organisasi lain, Muhammadiyah merupakan organisasi yang relativ dapat hidup dan berkembang di Aceh. Sekelompok cendekiawan Aceh

menjadi anggota pendukung Muhammadiyah. Melalui organisasi ini mereka menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya bersifat sosial sehingga memberi warna tersendiri bagi Muhammadiyah di Aceh. Apabila di Jawa Muhammadiyah lebih menitikberatkan gerakan pada bidang keagamaan dan sosial, di Aceh di samping itu juga turut dalam gerakan-gerakan politik.²⁵

Pada tahun 1928 M di Kutaraja didirikan sebuah organisasi *Atjehsche Studiefonds* (Dana Pelajar Aceh). Tujuannya membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Organisasi ini pada tahun 1929 M dengan Surat Keputusan Pemerintah Pusat tanggal 1 Februari 1929 no. 25 telah memperoleh hak sebagai badan hukum. Pengurusnya ialah : Tuanku Mahmud sebagai ketua dan Teuku Hasan Dik sebagai wakil ketua, H.M. Bintang sebagai bendahara, komisaris : Teuku Nyak Arief, Tuanku Djamil, Abidin dan T.A. Salam. Anggotanya adalah para uleebalang, guru dan pedagang, yang pada saat awal dibentuk berjumlah 137 orang.²⁶

Di daerah Peureulak (Aceh Timur) pada tahun 1929 berdiri pula sebuah organisasi pendidikan yang bernama PUSAKA (Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak). Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda seperti *Holland Inlandsche School*. Pengurus organisasi ini ialah : Teuku Chik Muhammad Thayeb sebagai pelindung, Teuku Cut Ahmat sebagai penasihat, T.M. Nurdin sebagai ketua, H.M. Zainuddin sebagai penulis, Muhammad Hisyam sebagai bendahara, serta T.M. Hasan, Teuku Tam Osman, Teuku Sabi dan Muhammad Syam sebagai komisaris.²⁷

²³Politieke Politoneel Verslag Betreffende het Geweest Atjeh en Onderhoorigheden No. 130x/29, hlm. 91.

²⁴J. Jongenjans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, Baam : N.V. Holiandia Drukkenj, 1939, hlm. 261.

²⁵A. J. Pickar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, Den Haag : W. Van Hoeve, 1949.

²⁶mailr. 10

²⁷H.M. Zainuddin, *Bungong Rampo*, (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1965), hlm. 127-129.

Untuk memajukan seni budaya di daerah Aceh, pada tahun 1908 M di Ulee Lheue, Kutaraja (Banda Aceh) didirikan sebuah organisasi musik yang bernama *Atjeh Band*. Sebagai sponsor dan pengawas adalah Teuku Teungoh (uleebalang Meuraksa). Sebagai pengajar seorang Indo-Jerman yang bernama A. Theveunet dan sebagai ketua korp pemain ialah Teuku Husein Trumon, alumni Sekolah Raja Bukit Tinggi. Pada tahun 1909 *Atjeh Bond* ikut bermain memeriahkan pasar malam yang dilangsungkan di Kutaraja dan mendapat sambutan baik dari masyarakat Aceh. Pada tahun 1919 ikut pula dalam Pekan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh organisasi *Atjeh Vereeniging* di Kutaraja. Di beberapa daerah juga mengikuti langkah seperti yang dilakukan oleh *Atjeh Band*, seperti di Peureulak pada tahun 1930 muncul *Jolly Night Band* serta *Tugep Tuneel Genelschap Peureulak* dan di Jeunib tahun 1937 *Liliput Band* di bawah asuhan Teuku Ahmad (Uleebalang Cut Jeunib).²⁸

Perguruan Taman Siswa didirikan di Kutaraja pada tanggal 11 Juli 1937 yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh dengan mendapat dukungan dari beberapa orang terpelajar yang berasal dari luar daerah. Panitia pendiri cabang ialah : Hasan Glumpang Payong sebagai ketua, Teuku Nyak Arief sebagai wakil ketua, Pohan dari Tapanuli sebagai penulis, anggotanya antara lain A. Aziz (Padang), Paman Ras Martin (Ambon). Panitia segera mengirim utusan, T.M. Usman el Muhammady, ke Yogyakarta menemui Ki Hajar Dewantara, memohon agar Taman Siswa membuka cabang di Aceh.

Berdasarkan permohonan masyarakat, Majelis Luhur Taman Siswa mengirim tiga orang guru ke Aceh, yaitu Ki Soewondo Kartoprojo beserta istrinya yang juga sebagai guru dan Soetikno Padmosoemarto. Dalam waktu yang relatif singkat panitia berhasil membuka 4 buah sekolah Taman Siswa di Kutaraja, yaitu

sebuah Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa.

Sebuah organisasi kedaerahan yang bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) didirikan di Aceh, sebagai hasil keputusan musyawarah ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5-8 Mei 1939 di kampus Madrasah Almuslim Peusangan, Matang Glumpang Dua, Bireun. Inisiatornya ialah Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dan Teungku Ismail Yakob dengan mendapat restu dan perlindungan Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah, uleebalang Peusangan. Pengurus pertamanya adalah : Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap sebagai wakil ketua, Sekretaris I M. Nur el Ibrahimy, sekretaris II Teungku Ismail Yakob, Bendahara T. M. Amin. Komisaris : Teungku Abdul Wahab Seulimuem, Teungku Abdul Hamid Samalanga, Teungku Usman Lampoh Awe, Teungku Yahya Peudada, Teungku Mahmud Simpang Ulim, Teungku Ahmad Damhuri Takengon, Teungku Muhammad Daud, Teungku Usman Aziz.²⁹

Organisasi ini dalam waktu yang relatif singkat sudah meluas ke seluruh Aceh dan menjadi milik masyarakat. Adapun maksud dan tujuan gerakan PUSA adalah : Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar agama Islam, menyatukan paham pada penerangan hukum, memperbaiki dan menyatukan *leerplan* pelajaran agama di sekolah-sekolah agama, dan mengusahan untuk mendirikan perguruan Islam dan mendidik pemuda-pemuda serta putra-putri Islam dalam keagamaan.

Tujuan pendirian PUSA itu tampaknya tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi dalam kenyataannya muncul juga gerakan politik semenjak kongres pertama tahun 1940. Benih-benih permusuhan terhadap Belanda ditanamkan, terutama kepada pemuda melalui organisasi kepanduan yaitu *Kasyfatul Islam*, sehingga kelak gerakan ini menjadikan dirinya sebagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Reid, *op.cit.*, hlm. 58.

gerakan anti pemerintah Belanda yang cukup membahayakan.

Menjelang akhir kekuasaan Belanda, PUSA, melalui utusannya, Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga, mengadakan hubungan rahasia dengan Jepang di Penang. Setelah Jepang berkuasa, para pemimpin PUSA menjadi musuh Jepang yang sangat ditakuti, sehingga banyak di antara mereka yang ditangkap, seperti Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Teungku Abdul Wahab Seulimuem, Amir Husin Almujaheed, dan Teungku Yunus Jamil.³⁰

Penutup

Munculnya berbagai organisasi sosial politik dan keagamaan di Aceh pada masa pergerakan nasional, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat nasional, berkait erat dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan yang ada di daerah Aceh pada waktu itu.

Semua organisasi itu, pada umumnya dikoordinir dan dipimpin oleh para cendekiawan, baik dari hasil pendidikan pemerintah Belanda maupun hasil pendidikan agama yang modernis. Hal itu membuktikan adanya kesadaran nasional di antara mereka yang pada umumnya bertujuan untuk memperjuangkan nasib bangsanya melalui organisasi tersebut.

Merujuk kepada pemahaman nasionalisme klasik, yakni perjuangan kebangsaan untuk membebaskan negeri dari penjajah. Dalam konteks ini, nasionalisme suatu bangsa hanya sebatas berjuang membebaskan bangsa dari bangsa penjajah. Namun, dalam konteks kekinian, nasionalisme tidak hanya sebatas berkecimpung dalam pergolakan perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa yang telah diraih.

Dalam mengisi kemerdekaan bangsa, setiap warga negara yang memiliki semangat nasionalis tentu saja akan menjalankan peranannya masing-masing sesuai dengan bidangnya secara proporsional dan profesional serta bertanggung jawab, demi kesejahteraan rakyat dan berlangsungnya kehidupan bangsa Indonesia.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

Sudirman, S.S adalah Tenaga Peneliti pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

MoU, Perdamaian dan Reintegrasi: Meretas Kembali Nasionalisme Di NAD

Oleh : Titit Lestari

Pendahuluan

"Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, selalu di puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata"

Begitulah lantunan bait salah satu lagu nasionalisme "Indonesia Pusaka". Memang lagu ini diciptakan pada saat gelora kemerdekaan dan gelora nasionalisme kebangsaan sebagai negara-bangsa sedang di puncak-puncaknya. Kondisi saat itu negara-bangsa Indonesia masih relatif sangat muda, sangat miskin dan terbelakang tetapi semangat untuk membangun komunitas sebagai suatu negara-bangsa sangat menonjol dalam kegotong-royongan nasional. Euforia kemerdekaan masih begitu kental karena baru terlepas dari cengkeraman penjajahan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Negara-bangsa Indonesia ini dengan geografis kepulauan berjumlah 17.058 pulau. Lebih dari 450 subetnis, hukum, adat, dan bahasa serta dukungan 216.600.000 jiwa penduduknya¹. Semua bernaung di bawah naungan UUD 1945 dan Pancasila sebagai "payung nasionalisme". Hal ini merupakan anugerah dan juga sebagai masalah yang mewarnai lebih setengah abad kemerdekaan.

Pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia berbagai persoalan telah terindikasi terjadi di wilayah Indonesia. Mulai dari kebijakan sentralistik yang dirasakan kurang profesional, kurang proporsional dan tidak mengakomodasikan keinginan rakyat serta belum meratanya pembangunan menjadikan daerah-daerah "panas hati" kepada republik. Banyak di antara pencinta republik ini mengubah haluannya dari "pejuang negara" menjadi "pemberontak terhadap negara".

¹ Menurut data BPS, Tahun 2007.

Gejala perubahan dari "nasionalisme kebangsaan" menjadi "nasionalisme kedaerahan" mulai muncul karena banyak munculnya tokoh "founding nation" yang sakit hati seperti Kartosuwirjo, Teungku Daud Beureueh, Kahar Muzakkar, dan lain sebagainya. Di antara mereka kemudian ada yang kembali lagi ke pangkuan "ibu pertiwi" dan ada pula yang dihukum mati.

Beragam masalah muncul kembali di Indonesia seperti melunturnya identitas kebangsaan dan nasionalisme. Persoalan dan wacana perdebatan rakyat tentang negara-bangsa ini terjadi lagi, sejak dari provinsi paling barat yaitu NAD sampai provinsi paling ujung timur Indonesia yaitu Papua.

Di antaranya juga muncul konflik yang berbau SARA seperti yang terjadi Kalimantan Barat dan Maluku. Masalah diskriminasi dan marginalisasi lokal ternyata kini menjadi persoalan rumit yang berakhir pada anarkisme, baik secara horizontal maupun vertikal. Telah lahir korban jiwa, harta dan tetesan air mata mewarnai lembaran panjang sejarah kehidupan "ibu pertiwi", klaim rasa "ketidak-adilan" sebagai buah dari "ketidak-merataan" pada pembangunan nasional yang dianggap sentralistik oleh berbagai daerah (provinsi) di Indonesia.

Berbagai ketidak-puasan rakyat menyelimuti etnis di pulau-pulau di gugusan nusantara. Lepasnya Sipadan dan Ligitan dari "tubuh" negara-bangsa Indonesia kepada Malaysia adalah contoh konkret dari lemahnya pemahaman nasionalisme rakyat kepada Indonesia di sana. Pemicunya adalah "kekurangperhatian" dan "kealpaan" dari pembuat kebijakan tersentralistik yang berakibat negatif bagi integrasi negara-bangsa di daerah-daerah.

Kini sudah 63 tahun negara-bangsa Indonesia lahir. Tanah air yang unik dan

penuh keragaman namun memiliki semangat "ke-Bhinneka Tunggal Ika-an" ini bersama-sama telah menapaki jalan kemerdekaan sejak tahun 1945. Namun harmonisasi kehidupan negara-bangsa di belahan timur dunia yang kaya akan potensi alam ini tidaklah semulus yang diharapkan.

Hal ini tentu diperlukan kajian dan penafsiran kembali pemahaman nasionalisme terutama dalam kontekstualisasi lokal. Pemberian ruang yang sebesar-besarnya bagi semangat desentralisasi seperti kebebasan penerapan syariat Islam dan realisasi pemberian otonomi khusus bagi NAD yang akan membawa masyarakatnya ke dalam suasana *baladatan, tayyibatun warabbun ghafur* dan kebebasan mengelola daerahnya untuk kesejahteraan rakyat NAD adalah salah satu koreksi dari "kebijakan" masa lalu.

Tujuan pembentukan negara-bangsa Indonesia untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia kini harus benar-benar dipikirkan oleh semua elemen bangsa serta pembuat kebijakan untuk menjawab semua persoalan yang dapat mengurangi semangat nasionalisme dan ancaman disintegrasi negara-bangsa. Lebih cepat menyadari "kekeliruan" masa lalu lebih baik sebelum terlambat "menyesali".

Perkembangan Nasionalisme

Perkembangan dan proses nasionalisme di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1899 atau 40 tahun sebelum terjadinya PD II (Perang Dunia Kedua). Nasionalisme digolongkan sebagai objek bagi penyelidikan akar sejarah pergerakan nasional. Mengenai karya-karya perkembangan sejarah nasionalisme Indonesia dapat dikaji dari tulisan karya Amry Vandenbosh (1944), Bernard Vlakke (1943), A.von Arx (1949), George M.Kahin (1952) kesemuanya ditulis pada akhir atau setelah PD II.

Pada periode sebelumnya, J.Th.Petrus Blumberger (1931) secara sistematis memuat banyak sumber sejarah sampai tahun 1930. Kemudian J.M. Pluvier juga telah menuliskan sebuah tinjauan umum mengenai nasionalisme pada periode

berikutnya yang diterbitkan pada tahun 1953. Tulisan karya S.J.Rutgers (1946) dan D.M.G.Koch juga pernah menyajikan gambaran umum dari seluruh perkembangan pergerakan nasional sampai PD II.

Di antara tulisan itu ada yang ditulis oleh penulis dari bangsa Indonesia seperti A.K.Pringgodigdo (1950), dan Sitorus (1947). Di samping karya yang bersifat deskriptif tersebut, juga diperlukan analisis tentang aspek-aspek pergerakan nasional sebagai fenomena empiris sehingga dapat dikenal lebih jelas ciri-ciri khas dari nasionalisme Indonesia. Hal itu dilakukan untuk dapat dibuat klasifikasi arah yang paling utama dari pergerakan nasional dimaksud.

Proses identifikasi nasionalisme Indonesia akan memberi gambaran lebih jelas terhadap pengertian nasionalisme pada umumnya². Berdasarkan terminologi dari fenomena historis tentang lahirnya nasionalisme, Blumberger dan Pluvier menyebut sebagai *Nationalist Movement*. Sedangkan Kahin menggunakan istilah *Nationalistic Movement*.

Di samping itu Vandenbosch menggunakan istilah *National Awakening* dan juga diikuti oleh Reveille. Istilah *National Movement* terdapat pada tulisan karya Ramsay Muir (1917), karya F.Hertz (1951), dan pada laporan dari *Royal Institute of International Affair* (1939). Laporan tersebut mengatakan bahwa kata "*national*" sebagai kata sifat dari "*nation*" digunakan menurut kedua pengertian yang lebih luas, yaitu menunjukkan kesatuan seluruh warga negara. Tentang kata "*nation*" dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa, "...menunjuk sekelompok individu yang dipersatukan baik oleh ikatan politik, ikatan persamaaan-persamaan ras, agama, bahasa, atau tradisi"³.

² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hlm. 227

³ *Report by a Study Group of Members of The Royal Institute of International Affair*, (London/New York, 1939), hlm. XVII.

Wacana

Dalam penulisan kata "nasional" sebagai kata sifat dari pergerakan, sama sekali tidak menunjukkan pengertian ikatan seperti yang terdapat pada laporan tersebut. Kata "nasional" di sini dipergunakan dengan maksud menunjukkan seluruh aktivitas dari gerakan di semua lapangan kehidupan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu berjuang melawan kekuasaan kolonial.

Istilah pergerakan nasional juga menunjukkan seluruh proses terjadi pertumbuhan nasionalisme Indonesia yang berwujud sebagai organisasi-organisasi nasionalistis yang berdasarkan kesadaran, perasaan, dan keinginan yang sama, yaitu berjuang bagi kemerdekaan rakyat di dalam satu lingkungan negara kesatuan. Dalam studi nasionalisme, terminologinya tetap merupakan persoalan yang belum diperoleh pemecahan yang memuaskan.

Pada mulanya penulis Belanda menulis istilah *Jong Java Beweging* (Gerakan Muda Jawa), kemudian istilah *Inlandsche Beweging* (Gerakan Pribumi) diterima sebagai cakupan semua pergerakan dari golongan suku-suku (etnis) bangsa Indonesia. Istilah *Indiesche Beweging* diartikan sebagai gerakan yang menuju pengintegrasian semua golongan rakyat Indonesia.

Penggunaan istilah-istilah tersebut pada masa itu seiring dengan pertumbuhan nasionalisme itu sendiri. Pemakaian kata "nasionalisme" pada tingkat pertama sejarah pergerakan biasanya disertai batas-batas tertentu, seperti *Javaansch Nationalisme*, *Indisch Nationalisme*. Pada taraf lebih kemudian dikenal istilah *Indonesisch Nationalisme*.

Dengan meluasnya cita-cita akan kesatuan dan cita-cita kebebasan, istilah ini menjadi umum dan dapat diterima oleh semua kaum nasionalis. Di lain pihak, terminologi yang digunakan penjajah merupakan petunjuk bahwa ideologi kolonial sangat sukar berubah.

Pada waktu yang sama, nama "Indonesia" berfungsi simbolis dalam sejarah pergerakan nasional. Pergerakan dengan sebutan "Indonesia" ditentukan oleh keadaan

historis dan merupakan fase baru di dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun lazimnya yang disebut sejarah pergerakan nasional adalah periode tahun 1908, pada saat berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi nasional sampai tahun 1942, saat pecahnya perang Pasifik.

Gerakan Nasionalisme Indonesia

Pergerakan nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari ekstraksi berbagai faktor ; seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dengan interelasinya yang kompleks dan multidimensional sehingga diperlukan pendekatan multidisipliner untuk menjelaskan berbagai segi pergerakan nasional Indonesia.

Kekhasan dari nasionalisme Indonesia memerlukan suatu konseptualisasi metodologi dalam mengungkapkan karakter-karakter dan klasifikasi-klasifikasinya. Di samping itu, kronologi akan memberikan suatu perspektif historis sehingga dinamika pergerakan nasional dapat dilihat dengan jelas sebagai suatu gerakan yang menggunakan beberapa konsepsi sebagai titik tolak; semata-mata hanya dimaksudkan sebagai suatu pengantar untuk beberapa masalah sejarah pergerakan nasional di Indonesia.

Pertumbuhan nasionalisme di Indonesia harus dilakukan melalui jalan objektivikasi. Ini berarti bahwa harus diketahui konteks dan situasinya. Menurut H.Kohn (1944) nasionalisme adalah suatu *state of mind*⁴, yang berarti bahwa sejarah pergerakan nasional harus dianggap sebagai *history of ideas*. Konsep sosiologis dari ide, pikiran, motif, kesadaran, harus selalu dihubungkan dengan lingkungan yang konkret dari situasi sosio-historis.

Nasionalisme dapat dianggap suatu tindakan kelompok atau tindakan bersama untuk menghadapi kondisi-kondisi hidup dengan jalan mengadakan reaksi yang sesuai dengan posisi kelompok tersebut. Situasi kolonial merupakan suatu tantangan bagi

⁴ H.Kohn, *The Ideas of Nationalism*, (New York : 1944), dalam Sartono K, *Op.Cit.*, hlm.230.

rakyat di tanah jajahan untuk mengkonsentrasikan aktivitas kolektif mereka dalam mempertahankan diri dan berusaha mengubah situasi ini sehingga timbulnya kesadaran nasional.

Nasionalisme Indonesia seperti juga negara-negara Asia Tenggara lainnya mempunyai basis historis pada kolonialisme maka sifat antikolonialisme menjadi motif utamanya. Pada situasi ini nasionalisme kolonial dapat dianggap sebagai kekuatan sosial yang mempunyai orientasi terhadap masa depan, sedangkan ideologi kolonial melihat masa lampau. Ideologi kolonial dipandang sebagai kekuatan antagonis dari nasionalisme.

Universalisme Gerakan Nasionalisme

Pluralitas dari organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia, seperti yang terlihat dalam setiap anggaran dasar mereka. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, pada saat pembatasan hak politik rakyat yang diatur dalam Pasal 111 *Regeering Reglement* yang melarang rakyat Indonesia melakukan kegiatan politik dan yang mengenakan pembatasan terhadap hak untuk rapat dan berbicara masih berlaku.

Selama fase ini aktivitas lebih ditekankan pada bidang sosio-kultural, seperti pada tahun-tahun pertama berdirinya organisasi nasional Boedi Oetomo atau organisasi pada bidang-bidang ekonomi dan agama, seperti tahun-tahun pertama berdirinya Syarikat Islam. Ada juga gerakan yang prinsipnya memilih lapangan usaha lain misalnya bidang sosial seperti Muhammadiyah atau pada bidang kultural seperti Taman Siswa. Kedua organisasi ini jelas menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan politik.

Namun nasionalisme selalu berarah pada bidang politik, karena makin lama makin terasa bahwa kekuatan politik adalah syarat utama untuk menentukan setiap segi kehidupan. Pergerakan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai tipe diferensiasi yang hanya dapat diinterpretasikan demikian : satu-satunya pergerakan sebagai suatu kesatuan tindakan kelompok, lahir pada bidang-bidang

tersebut yang sifatnya kompleks dan simultan.

Upaya membentuk karakter nasionalisme merupakan keharusan menentukan derajat persamaan dan perbedaan organisasi-organisasi nasional ini serta menentukan corak struktural yang terkemuka pada periode tertentu, sehingga dengan cara ini akan dapat ditentukan suatu periodisasi nasionalisme Indonesia.

Aspek-aspek ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik sangat mempengaruhi pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Unsur-unsur formatif nasionalisme Indonesia dibentuk oleh keadaan-keadaan khusus dan secara kebetulan (*unpredictable*) atau tercipta melalui percobaan keadaan historis.

Nasionalisme dianggap sebagai faktor sosio-psikologis, misalnya K.Lamprech (1920) memakai istilah *social souls*, F.Meinacke (1901) menyebutkan sebagai sesuatu ide yang kabur, Brinton (1950) menganggapnya sebagai *a sense of belonging*, dan Kohn (1944) melihatnya sebagai *state of mind and an act of consciousness*.

Konseptualisasi metodologi nasionalisme mungkin dapat dicapai melalui sudut pandangan nasionalisme sebagai fakta sosio-psikologis. Sebagai tindakan kelompok mempunyai tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek orientasi nilai/tujuan dan aspek afektif.⁵

Ketiga macam aspek ini hanyalah struktur-struktur analitis. Struktur dalam hal ini menunjukkan suatu aspek fenomena empiris, cita-cita, organisasi-organisasi yang menunjukkan keseragaman yang dapat dilihat.

Struktur analitis adalah struktur yang dapat ditetapkan sebagai tindakan manusia yang dapat dipolakan, yang tidak dapat dipisahkan secara konkret dari aspek-aspek tindakan yang dipolakan lainnya, sekalipun hanya dalam teori⁶.

⁵ M.J. Levy Jr. *The Structure of Society* (Princeton, New Jersey, 1952) dalam Sartono K, *Loc.Cit*, hlm. 245.

⁶ *Ibid.*

Nasionalisme (Islam) Sebelum Kemerdekaan

Semangat untuk melaksanakan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia tidak pernah padam. Semenjak Islam masuk ke negeri ini upaya itu telah dilakukan untuk dijalankan. Ketika nusantara ini belum bernama "Indonesia" (mulai dari abad ke-7 dan mulai ramai abad ke-13), kerajaan-kerajaan yang berdiri senantiasa berusaha menegakkan syariat Islam di daerahnya.

Setelah kolonialisme mulai berkuasa di nusantara, kerajaan-kerajaan Islam masih eksis dalam menegakkannya. Namun, secara berangsur-angsur hegemoni dan hukum Barat ataupun hukum adat, yang telah dipisahkan dari hukum Islam yang boleh diterapkan di nusantara.

Pergerakan nasional yang bersifat Islam (ada juga yang sekuler) mulai abad ini masih menempatkan syariat Islam sebagai "cita-cita" yang ingin ditegakkan. Berbagai organisasi seperti Syarikat Islam harus berubah haluan menjadi Syarikat Dagang Islam. Muhammadiyah memilih berorientasi ke bidang sosial karena tekanan penjajah yang mengontrol semangat nasionalisme yang mulai tumbuh di Indonesia.

Nasionalisme (Islam) Indonesia Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, usaha ke arah penegakan syariat Islam tidak berhenti. Ada yang berangsur-angsur menegakkannya dalam kehidupan politik (seperti penggunaan "tujuh kata" dalam dalam Piagam Jakarta) ataupun dengan tuntutan dasar Islam bagi negara Indonesia, seperti yang diperjuangkan dalam *Kontituante* tahun 1946-1959. Usaha tersebut masih dilanjutkan dengan menyusun kembali undang-undang yang berkaitan dengan kekeluargaan atau Undang-Undang Perkawinan sesuai tuntutan Islam pada tahun 1974. Seiring dengan itu dimantapkan pula kedudukan Pengadilan Agama pada tahun 1980-an, sebelumnya keputusan hanya dilaksanakan dengan penguatan dari Pengadilan Negeri.

Sebelum periode itu, adapula daerah-daerah (provinsi) yang berusaha memperoleh desentralisasi dengan keterpaksaan melakukan resistensi terhadap negara-bangsa seperti yang dilakukan oleh DI (Darul Islam) dan NII (Negara Islam Indonesia) yang dipelopori Kartosuwirjo, Kahar Muzakkar dan Teungku Muhammad Daud Beureueh⁷.

Di NAD, ulama modern telah membentuk organisasi *Aljamiyyatuddiniyah* di Pidie yang kemudian berkembang menjadi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Tujuan organisasi ini adalah untuk memurnikan dan mengembangkan ajaran Islam di Aceh⁸.

Ketika presiden Soekarno berkunjung ke Aceh tahun 1947, beliau memberikan harapan untuk syariat Islam di bumi "Serambi Mekkah". Dalam kunjungan itu, presiden meminta agar rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teungku Daud Beureueh sebagai pemimpin PUSA menyanggupi hal itu dan bersepakat bahwa perang rakyat Aceh melawan Belanda adalah perang sabil atau *jihad fisabilillah*.

Presiden menjamin se usai perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat Aceh diberi kebebasan menjalankan syariat Islam di daerahnya. Beliau juga bersumpah akan memberikan desentralisasi (otonomi) untuk menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat Islam. Presiden akan mempergunakan pengaruhnya untuk merealisasikan hal tersebut.

Orde Baru dan Kontrol Hegemoni

Pada masa Orde Baru berkuasa terjadi perubahan dengan upaya integrasi politik yang dilakukan dengan berbagai kebijakan seperti depolitisasi, deideologi dan *floating mass* yang bekerja di bawah disain korporatisme negara melalui pembentukan organisasi politik dan sosial dengan tujuan

⁷ Deliar Noer, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam*, dalam Pengantar, (Jogjakarta : Wihdah Press), hlm.vii.

⁸ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta : Grafiti Press), hlm. 117.

pengendalian terhadap rakyat⁹. Di sini letak hubungan politik yang sentralistik dalam mengatasi berbagai gejolak dan aspirasi rakyat NAD melalui “tekanan” militer.

Sejak Orde Baru memerintah, NAD mendapat perhatian serius dalam dua hal. Pertama, kepentingan pusat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sedemikian besar ; kedua, persoalan sejarah resistensi yang berpotensi secara *continued* mengancam integrasi nasional di NAD. Proses ekstraksi sumber daya potensial disertai oleh tekanan birokratisasi dan militerisasi dilakukan untuk memberikan jaminan sukses produksi¹⁰.

Akibat kebijakan sentralistik seperti itu muncul kekecewaan pada tingkat lokal, yang direpresentasikan dengan lahirnya GAM pada akhir tahun 1976. Penumpasan terhadap GAM yang represif dilakukan melahirkan penderitaan bagi masyarakat. Dalam kondisi itu cita-cita syariat Islam semakin sulit dilakukan karena Islam “dianggap” sebagai “ancaman” bagi Pancasila. Kebijakan ini berlaku sampai di ujung pemerintahan presiden Soeharto tahun 1997.

Reformasi dan Desentralisasi

Setelah Orde Baru berlalu, disusul era reformasi tahun 1998 yang telah melahirkan beberapa kebijakan pusat mulai kebijakan presiden B.J.Habibie, sampai kepada presiden Abdurrahman Wahid seperti lahirnya UU/No.22 Tahun 1999 dan UU/No.25 Tahun 1999 yang merupakan landasan bagi pelaksanaan otonomi yang luas. Dalam undang-undang itu diatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar terhadap pemanfaatan sumber daya daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut, dikhususkan untuk Aceh dan Papua, namun

dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dari Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Perjuangan untuk memperoleh kewenangan luas dalam menjalankan pemerintahan bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu diberikan otonomi khusus untuk meredakan suasana ancaman disintegrasi bangsa di NAD.

Selanjutnya pelaksanaan UU/No.44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Upaya perdamaian antara RI dan GAM pernah dilakukan pada tahun 2000 melalui *COHA* namun gagal NAD masih dalam ancaman disintegrasi negara-bangsa.

MoU, Perdamaian dan Reintegrasi

Ketika Megawati berkuasa upaya penyelesaian masalah disintegrasi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan tentang desentralisasi yaitu pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus yaitu UU/No.18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam dengan kebebasan menjalankan *qanun-qanun* atau peraturan daerah dalam pelaksanaan syariat Islam. Selain itu juga disepakati pembagian sumber daya alam 70% untuk daerah dan 30% untuk pusat. Pelaksanaan Undang-Undang ini belum begitu berjalan dengan baik, namun sebagai langkah awal guna meredakan ancaman disintegrasi yang melanda Aceh.¹¹

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan berorientasi pada perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan yang telah dituangkan dalam UUD 1945 yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini adalah sangat menggembirakan bagi rakyat di NAD.

Setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami yang melanda NAD pada 26

⁹ Korporatisme merupakan strategi negara untuk melakukan kendali terhadap rakyat melalui pembentukan organisasi sosial yang bekerja sebagai kontrol hegemoni. Lihat penjelasan ini dalam Mohtar Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm.13.

¹⁰ Syarifuddin Tippe, *Aceh Di Persimpangan Jalan*, (Jakarta : Cisesindo, 2000), hlm. 65.

¹¹ *Sabli No.5 Th.IX*, tanggal 29 Agustus 2001. Hlm.24.

Wacana

Desember 2004, upaya ke arah perundingan telah dilakukan antara RI dan GAM. Baru pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani butir-butir MoU oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dari pihak RI dan Malik Mahmud di pihak GAM menandatangani *Memorandum of Understanding* yang membawa kedamaian di NAD.

Patut disyukuri dengan adanya MoU ini maka eksistensi GAM sebagai gerakan separatis bersenjata akan hilang. Kesepakatan ini juga memberikan ruang partisipasi politik bagi GAM dengan membentuk partai politik lokal. Partisipasi politik ini adalah alat transportasi bagi GAM menjadi kekuasaan politik dalam bentuk partai lokal dengan syarat nasional.

Di samping itu, gejala ke arah reinterpretasi nasionalisme Indonesia dalam konteks lokal Aceh dapat dikemukakan semakin harmonis, setelah adanya MoU dengan RI. Mantan GAM sudah mengakui Aceh dalam bingkai NKRI dan mengakui Indonesia sebagai negaranya dengan menjunjung tinggi identitas nasional. Para kombatan GAM juga telah diintegrasikan menjadi warga bangsa Indonesia dengan penanganan yang serius oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka setelah kembali ke dalam kehidupan masyarakat Aceh sebagai warga negara Republik Indonesia dengan kewajiban dan hak yang sama.

Masuknya mantan para elite dan kombatan GAM ke dalam sistem pemerintahan RI ditandai dengan pengintegrasian mereka ke dalam sistem politik lokal. Pada tataran terkini, terpilihnya pemimpin lokal dari mantan GAM oleh masyarakat Aceh menjadi gubernur/wakil gubernur atau bupati/wakil bupati, merupakan bentuk lain dari semakin jelasnya arah persatuan dan kesatuan lokal untuk meretas kembali semangat nasionalisme Indonesia seperti yang pernah menggelora di Aceh pada saat awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Mereka juga telah bersumpah setia kepada NKRI, yang menginterpretasikan bahwa nasionalisme dan integritas NKRI akan kembali bersemi di "daerah modal" perjuangan kemerdekaan RI. Di samping itu, penggunaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai AD/ART oleh salah satu partai lokal di Aceh menginterpretasikan munculnya kembali semangat nasionalisme dan reintegrasi "Aceh" ke dalam wadah NKRI setelah adanya MoU Helsinki oleh mantan "pelaku separatis yang dulu sempat menggugat integrasi Aceh dalam wilayah NKRI dan antipati terhadap UUD 1945 dan Pancasila.

Peristiwa gempa bumi dan tsunami telah membuka kembali mata hati *ureung* Aceh ke dalam wawasan nasional dan internasional. Hal inilah yang mendorong kesadaran lokal untuk kembali bernegara dan berbangsa Indonesia, antara lain disebabkan banyaknya sesama anak bangsa yang datang ke Aceh untuk membantu apa saja yang dibutuhkan oleh korban gempa bumi dan tsunami bahkan seluruh rakyat Aceh. Faktor-faktor inilah yang telah mendorong renasionalisme dan kebangkitan kembali semangat untuk meretas kembali nasionalisme sebagai satu negara-bangsa Indonesia di *bumo* Nanggroe Aceh Darussalam.

Penutup

Masalah nasionalisme dan disintegrasi bangsa adalah tantangan yang sangat besar bagi negara-bangsa Indonesia. Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah dari Allah SWT, namun juga masalah karena kebijakan negara di masa lalu yang telah memarjinalkan daerah-daerah (provinsi) sehingga terjadi "ketidakmerataan" hasil pembangunan.

Pada usia negara-bangsa yang ke 63 tahun, langkah Indonesia sebagai negara-bangsa telah dilewati dengan sekelumit dinamika dan problematika di daerah-daerahnya (provinsi). Semua itu menjadi pelajaran berharga bagi pembuat kebijakan Indonesia agar sama-sama bertekad bulat mewujudkan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran bagi seluruh rakyat di seluruh pelosok negeri.

Dinamika sejarah kelabu pada tingkat lokal di NAD yang telah dimulai sejak awal kemerdekaan, masa orde baru sampai masa reformasi memberikan ilustrasi bahwa integrasi bukanlah “murah” harganya dan semangat disintegrasi sangat mudah “terbakar” apabila *punishmen* terlalu ditonjolkan oleh negara dan *reward* terhadap kesejahteraan rakyat tidak mendapatkan perhatian lebih serius.

Namun di balik itu semua, dalam relung hati rakyat NAD dan seluruh rakyat di nusantara ini masih tetap menjunjung NKRI. Indonesia tetaplah menjadi harapan bagi semua “*aneuk nanggroe*” untuk dapat hidup bersama dalam bingkai perdamaian dan keadilan dengan semangat perdamaian dan reintegrasi.

Kini saatnya membangun kembali “*nanggroe*” dan membangun NAD seutuhnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Andai semua tahapan itu telah dilampui maka nasionalisme akan lebih terpatri dalam kalbu setiap orang di “daerah modal”. Akhirnya NAD sejahtera dan adil adalah cermin bagi semua rakyat Indonesia. Rasa bangga sebagai negara-bangsa akan bersemi dari provinsi ini. Indonesia bagi warga NAD tetaplah warisan untuk anak-cucu dan masa depan yang tetap harus dilestarikan.

Gempa bumi dan tsunami telah berlalu menghapus kenangan lama kedukaan yang tak terperi. Uluran tangan anak bangsa dan internasional telah membuka mata hati pemerintah dan GAM untuk melakukan proses mediasi di Vantaa, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Perdamaian, MoU dan desentralisasi dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh telah bersemi di “*Bumo Serambi Mekkah*”, kini saatnya membangun NAD dari “*the dark age*” menuju “*the golden age*”. Semoga *nanggroe* dapat bangkit kembali dalam bingkai negara-bangsa.

Di usia kemerdekaan yang sudah ke-63 ini merupakan era kebangkitan kembali bagi NAD dan kebangkitan dari seluruh keterpurukan nasional untuk dapat membangun kembali renasionalisme Indonesia di Aceh. Saatnya bersatu kembali dalam integrasi dengan melupakan keinginan disintegrasi karena kesejahteraan rakyat NAD adalah tujuan bersama yang harus benar-benar diwujudkan sesuai dengan amanat kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945. *Beudoh rakan, peusaboh nanggroe, peu sabee banja.*

Titit Lestari, S.Si adalah Tenaga Peneliti Pertama pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Reinterpretasi Nasionalisme : Pergulatan Identitas Etnik Dan Identitas Kebangsaan Di Aceh

Oleh : Hasbullah

Pendahuluan

Aceh kini sedang mengalami transformasi politik, sosial dan budaya setelah resmi bernaung di bawah “payung besar” negara-bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai gejala transformasi itu sudah dialami provinsi yang pernah dijuluki “daerah modal” pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gejala transformasi itu telah dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia sehingga Aceh dianggap daerah yang khas yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat, terutama berlangsung pada pada tahun-tahun awal semenjak kemerdekaan.¹

Pada awal kemerdekaan di Aceh terjadi konflik horizontal antara *Ulama* dan *Uleebalang* yang dikenal dengan peristiwa Cumbok. Kemudian Aceh berseteru secara vertikal dengan pusat setelah lahirnya DII/TII pada masa Orde Lama. Ketegangan itu terus berlangsung. Setelah DII/TII sempat padam, Aceh masih diselimuti potensi konflik yang sangat besar karena “marjinalisasi” dari pusat. Dalam ungkapan Aceh, situasi seperti itu disebut “*lagee apui lam seukeum*” (seperti api dalam sekam). Akhirnya potensi itu muncul setelah adanya aktivitas GAM pada masa pemerintahan Orde Baru. Konflik vertikal terus terjadi hingga terjadinya reformasi di Indonesia dan tumbanganya Orde Baru tahun 1998.

Pada era reformasi terjadi pemberian otonomi daerah dan otonomi khusus (sistem desentralisasi) dari pusat. Setelah adanya pemekaran dari beberapa

kabupaten di Indonesia menjadi provinsi baru karena perbedaan latar belakang sejarah, etnik, budaya dan bahasa. Di Aceh muncul pula ide pembentukan provinsi baru ALA dan ABAS sebagai manifestasi ketidakragaman etnis, bahasa dan budaya tertentu di dalam provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam).

Secara historis, konflik identitas merupakan salah satu ciri penting dalam kehidupan sebagian besar negara baru yang dibentuk pascakolonial Barat terakhir, sebagai akibat dari tidak adanya ketidakerasian antara negara dan bangsa seperti yang dikatakan John Saul.² Tidak adanya keserasian itu telah menjadi beban berat pada sistem politik nasional, sehingga memunculkan konflik antara negara dengan rakyat dan berdampak sangat buruk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti itu legitimasi negara tidak berakar kuat pada rakyat sehingga sebagian dari mereka beranggapan bahwa negara sebagai lembaga yang terpisah dan asing dari komunitasnya. Walaupun sebagian besar komunitas etnik hidup di dalam wilayah negara yang sama. Tetapi menurut John Martinussen mereka sebenarnya tidak memiliki perasaan yang kuat sebagai bangsa yang sama.³ Proses pembentukan identitas etnis tertentu berpotensi belum berakhir, walaupun setelah negara baru dideklarasikan. Bagi komunitas-komunitas etnis tertentu yang ada di dalam negara baru itu dipahami tidak lebih sebagai identitas kebangsaan yang imajiner, di samping realitas identitas kebangsaan lain

² Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, (Yogyakarta : Ombak, 2006), hlm.159. Lebih detail tentang pernyataan tersebut lihat Saul, John., *State and Revolution in Estern Africa*, (London : Heinemann, 1979).

³ Martinussen., John, *Society, Staat and Market*, dalam Bambang Purwanto, *Ibid*

¹ Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta : Grafiti, 1990), hlm.1-2

yang juga melekat pada masing-masing kelompok etnis.⁴

Secara teoritik, terdapat dua pendapat tentang keberadaan etnik dan kebangsaan. Kelompok pertama yang melihat secara normatif berpendapat bahwa perbedaan identitas etnik dan kebangsaan merupakan suatu yang dialami sesuai dengan identifikasi primordial dan loyalitas dari masing-masing kelompok yang memiliki persamaan dan perbedaan.

Di dalam pandangan kelompok ini yang diwakili oleh Clifford Geert dan Bjorn Herne, sebagian besar negara baru lebih banyak mengandung kategorisasi-kategorisasi etnik daripada bangsa. Sementara itu menurut pendapat kedua, seperti yang disampaikan oleh Ernest Gelner, identitas etnik dan kebangsaan merupakan sebuah fenomena secara sosial dan ideologi diciptakan secara sengaja melalui manipulasi simbol, yang biasanya terjadi dalam kompetisi para elite untuk menguasai sumber dan hak.⁵

Ketika para elite dari berbagai kategori etnik itu berkompetisi untuk menguasai kesempatan-kesempatan baru yang muncul dari perkembangan masyarakatnya. Mereka secara sengaja mendorong terjadinya transformasi etnik untuk membentuk identitas baru di dalam komunitas etnik sebagai cara yang dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencapai tujuan.

Menurut John Martinussen, ciri-ciri objektif umum seperti agama, bahasa dan pertalian wilayah hanya akan menjadi penting jika digunakan sebagai dasar untuk menciptakan kesadaran dan mobilitas sosial. Namun menurut Paul Brass, tahapan transformasi etnik berikutnya dari komunitas etnik ke kesadaran terhadap identitas kebangsaan hanya kan terjadi jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya kebutuhan terhadap identitas itu disurakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan

adanya organisasi tertentu yang mampu mencapai status khusus sehingga dapat menyatakan dirinya mewakili seluruh komunitas⁶.

Paul Brass lebih lanjut menyatakan bahwa transformasi etnik dipahami sebagai sebuah proses yang kompleks dalam pembentukan identitas etnik dan kebangsaan. Dalam konteks politik, kebangsaan tidak semata-mata dihubungkan dengan kebutuhan terhadap sebuah negara yang terpisah. Begitu juga dengan kelompok etnik ini, identitas itu tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan terhadap perbaikan dan penataan kembali di dalam negara yang telah ada. Ketika sebuah kelompok etnik mulai mengorganisir dan bertindak secara kolektif melawan kelompok lain atau negara, kelompok etnik itu mulai mengalami proses transformasi etnik untuk membentuk identitas komunitas etnik. Proses transformasi etnik dari komunitas etnik menuju kesadaran kebangsaan terjadi apabila komunitas etnik itu membutuhkan tambahan otonomi politik atau negara yang terpisah.

Nasionalisme yang mendasari munculnya kesadaran kebangsaan itu merupakan manifestasi dari kontradiksi dan konflik kepentingan daripada sekedar hasil solidaritas antar atau di dalam kelompok. Dalam proses konsolidasi nasional dan mempertahankan keutuhan teritorial, Negara-negara baru itu biasanya menciptakan keseragaman serta membatasi atau bahkan menisbikan keragaman. Negara-negara pascakolonial itu sebagian besar dikelola berdasarkan kombinasi antara kekuatan dan kerentanan. Birokrasi sipil dan militer yang diwarisi penguasa kolonial telah memberikekuatan untuk mengelola negara. Namun, menurut Christopher Clapham⁷ pada saat yang sama kedudukan negara sangat rentan karena birokrasi yang ada tidak terintegrasi dengan komunitas politik di dalam masyarakat.

⁶ Brass, Paul, *Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison*, dalam Bambang Purwanto, *op.cit.*

⁷ Clapham, Christopher., *Third World Politic. An Introduction*, dalam Bambang Purwanto, *op.cit.*

⁴ *op.cit.*

⁵ Gelner, Ernest., *Nation and Nationalism*, dalam Bambang Purwanto, *op.cit.*

Nasionalisme yang merupakan imajinasi konseptual dari sebuah komunitas dalam membangun solidaritas bersama seperti yang dikatakan oleh Benedick Anderson⁸, di sebagian negara baru itu oleh Gerd Baumann diartikan sebagai identitas pascaetnik yang menafikan kenyataan multikultural namun ironisnya cenderung tidak netral secara etnik. Pada konteks yang terakhir itu, negara cenderung memaksakan hegemoni tertentu yang diambil dari etnik atau etnik-etnik tertentu sebagai sebuah nilai tunggal yang harus dipatuhi oleh kelompok dan komunitas lain atas bangsa. Akibatnya, usaha pembangunan sering tidak berhasil.⁹

Di beberapa negara, seperti dikatakan John Martinussen, sejumlah besar penduduk menolak komunitas politik yang diterapkan oleh negara, kelompok dan komunitas etnik tertentu tetap merasa diri mereka sebagai minoritas atau kelompok yang tertindas. Sebagai reaksi, kelompok komunitas etnis ini menuntut kesetaraan politis, pembagian keuntungan ekonomis dan hak yang lebih besar, atau bahkan negara yang terpisah dan bangsa yang merdeka. Akibatnya konflik identitas tidak dapat dihindari.

Indonesia Sedang Mengalami Transformasi

Meskipun pembentukan negara Indonesia telah dilakukan lebih dari 63 tahun yang lalu, keserasian hubungan social dan politik dalam bentuk konflik identitas etnik dan kebangsaan seperti yang telah disebutkan di atas masih merupakan salah satu di antara masalah-masalah yang paling rumit yang dihadapi negara dan masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Adanya konflik antarelit yang terus berlanjut, pemahaman yang simpang siur terhadap kebijakan otonomi daerah dan tidak adanya kepastian politik dan hukum dari pemerintah terhadap kebijakan

desentralisasi itu, semakin memperparah keadaan yang berhubungan dengan Indonesia sebagai sebuah identitas kebangsaan.

Beberapa negara baru lain yang muncul setelah keberhasilan mengatasi kolonialisme Barat. Sejak berakhirnya perang Dunia II, pembentukan negara Indonesia telah dilakukan terlebih dulu sebelum dilakukan konsolidasi bangsa.¹⁰ Batas-batas negara Indonesia pascakolonial telah dibangun ketika Hindia Belanda muncul sebagai sebuah negara yang berkuasa atas wilayah-wilayah itu tanpa mempertimbangkan kondisi objektif penduduk, persepsi masyarakat mengenai komunitas masing-masing, dan batas-batas nyata yang ada sebelumnya. Pada saat pergerakan kebangsaan Indonesia berkembang di awal abad XX salah satu tugas yang dilakukan adalah menciptakan sebuah bangsa yang kongruen dengan penduduk di wilayah yang telah dipersatukan oleh kekuasaan kolonial dulu.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, salah satu tugas utama dari Negara adalah menciptakan pondasi nasional bagi dirinya sendiri, sangat rentan terhadap gejolak identitas. Adanya campur tangan negara yang sangat besar dalam proses pembentukan identitas kebangsaan pada negara yang baru itu mengakibatkan nasionalisme yang berkembang adalah nasionalisme populer yang berakar kuat pada masyarakat Indonesia. Akibatnya, berbagai gejolak etnik dan ideologi telah terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sebagai reaksi dan bagian dari upaya negara mempertahankan keutuhan batas-batas wilayah yang telah ada. Pemerintah menganggap dirinya sebagai representasi dari negara cenderung bersikap otoriter dan sentralistik, baik pada masa presiden Soekarno maupun Soeharto. Rangkaian peristiwa sejak munculnya pergolakan kedaerahan pada tahun 1950-an, berkembangnya otonomi yang luas, adanya keinginan yang semakin kuat dari beberapa daerah atau etnik untuk memisahkan diri dari Indonesia sampai simpang-siurnya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dapat

⁸ Geert, Clifford, *Old Societies and New Staats*, dalam Bambang Purwanto, *op.cit.*

⁹ *op cit*, hlm. 162.

¹⁰ *op cit*, hlm.165

dilihat sebagai indikasi dari ketidakberhasilan atau belum selesainya proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Sebaliknya kesadaran terhadap identitas etnik di berbagai wilayah di Indonesia semakin menguat. Hal itulah yang akhir-akhir ini tercermin pada pernyataan yang dilontarkan baik oleh orang Indonesia maupun orang asing, seperti "akankah Indonesia bertahan", "bubarnya Indonesia", "the end of Indonesia", "Indonesia a country in despair" atau "Indonesia, sebuah permainan tanpa akhir".

Semua pernyataan itu secara umum memberi kesan bahwa di Indonesia pada saat ini sedang terjadi konflik identitas kebangsaan dan etnisitas yang multidimensi atau berdimensi banyak. Konflik identitas itu akhirnya bermuara pada akan terjadinya perubahan mendasar pada kontruks dan realitas Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, yang pada tingkat tertentu akan berarti disintegrasi. Sebagai sebuah realitas politik, dalam perjalanan sejarah Indonesia telah muncul tuntutan referendum atau kemerdekaan seperti yang telah disebutkan di atas. Persoalan yang terjadi di Aceh dan Papua tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai konflik daerah dan pusat di dalam Negara Republik Indonesia dalam pengertian ekonomis dan politis, melainkan juga telah terjadio konflik identitas dan sosial dan kultural yang disimbolkan dalam bentuk konflik antara Aceh atau Papua melawan kolonialisme Indonesia dan Aceh atau Papua melawan imperialisme Jawa. Etnik Melanesia yang merupakan penduduk asli di wilayah Papua, melihat Indonesia yang mewakili pemerintah pusat di Jakarta, birokrasinya, tentara, perusahaan-perusahaan, dan etnik-etnik lainnya sebagai unsur asing yang selama ini telah mengeksploitatif kekayaan Papua.

Dalam konteks yang terakhir ini, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa telah terjadi proses transformasi identitas kelompok-kelompok etnik di wilayah

Papua menjadi sebuah komunitas etnik Papua.

Bagaimana Dengan Kondisi di Aceh?

Hal yang hampir serupa terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi atau lebih tepatnya "daerah istimewa" ini sebenarnya didiami oleh kelompok-kelompok etnis yang berbeda, seperti Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Simeulue, Singkil dan sebagainya, yang memiliki banyak perbedaan dalam identitas sosial dan kultural. Pada awalnya kelompok-kelompok etnik yang berbeda itu sangat sulit untuk dipertemukan sebagai komunitas etnik, dan mereka hanya memiliki persamaan pada homogenitas keagamaan, yang diwakili oleh Islam sebagai agama mayoritas, atau yang lebih benar adalah salah-satu simbol identitas yang diterima. Namun pengalaman penduduk di provinsi ini sebagai warga negara yang secara terus-menerus mengalami marginalisasi dalam pengalaman sejarah yang sama, terutama pada masa Orde Baru, telah menimbulkan transformasi etnik mengarah pada pembentukan Aceh sebagai sebuah identitas kebangsaan yang dibedakan dari Indonesia bagi seluruh kelompok etnik yang tinggal di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal itu secara jelas dapat dibaca pada tuntutan referendum yang disuarakan oleh Sentra Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang mewakili identitas "Aceh Lama", SIRA sejak awal muncul sebagai kekuatan yang membangun sebuah identitas "Aceh Baru". Jika hal itu terus berlangsung, maka tidak ada kekuatan politik dan bersenjata yang mampu menahan terjadinya proses transformasi kelompok dan komunitas etnis menuju pembentukan identitas kebangsaan sebagai tandingan terhadap identitas Indonesia di wilayah yang mereka sebut "Atjeh".

Sementara, persoalan politik dan kewilayahan baru muncul pasca penandatanganan nota perdamaian antara RI dan GAM (*Memorandum of Understanding*) Helsinki. Masyarakat di beberapa wilayah yang selama ini secara politik hanya merupakan kabupaten-kabupaten yang ada dalam Provinsi NAD (Nanggroe Aceh

Darussalam) saat ini sangat bersemangat menyuarakan pemekaran menjadi provinsi-provinsi baru seperti adanya provinsi ALA dan ABAS yang terpisah dari Aceh, yang sekaligus menunjukkan bahwa identitas mereka bukan lagi "Aceh", baik secara politik maupun sosio-kultural.

Dari realitas di atas, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa sejarah menjadi salah satu variabel penting, karena baik negara Indonesia maupun masing-masing kelompok komunitas etnis telah menggunakan sejarah untuk melegitimasi eksistensinya. Pada saat yang sama, kelompok dan komunitas baik etnik mempersoalkan manipulasi sejarah yang telah dilakukan atas nama negara dan bangsa Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh orang Aceh menyangkut perang melawan hegemoni Hindia Belanda sejak tahun 1873. Dengan kata lain, menurut orang Aceh bahwa bangsa Aceh telah merdeka sejak dulu yang terus dan masih mencari bentuk kedaulatannya.¹¹

Sementara itu, kelompok dan komunitas etnik dianggap telah mengingkari realitas sejarah dari keberadaan mereka sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia, dan secara historis cakupan wilayah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas etnik, termasuk Aceh. Dalam konteks yang lain, sejarah juga digunakan oleh masing-masing etnik untuk melegitimasi keberadaan dan kekuasaan mereka atas suatu wilayah tertentu.

¹¹ Pandangan ini diungkapkan Hasan Tiro, "Nasionalisme Indonesia" dalam Abdul Ghani, *Mengapa Sumatera Menggugat*, (Biro Penerangan ASNLF, 2000), hlm.41-76.

Hasbulah, S.S adalah Tenaga Peneliti Pamong Budaya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nila Tradisional Banda Aceh

Penutup

Salah satu kelebihan dan kekuatan dalam rekonstruksi sejarah terdapat pada kemampuan untuk meyakinkan, mempesonakan, menyenangkan, membangun mimpi, namun sekaligus juga untuk menyiksa, memutarbalikkan kebenaran, dan menipu. Sejarah bisa dijadikan alat legitimasi yang sangat ampuh untuk membangun sebuah wacana yang menjadi nilai dasar untuk menentukan sikap, kesadaran dan kekuasaan. Kekuasaan legitimatif sejarah itu sangat penting pada saat masyarakat sedang mencari identitas diri atau ideologi, seperti nasionalisme etnik.

Isu pemekaran wilayah-wilayah pada tingkat lokal di daerah dan meningkatnya kesadaran etnis merupakan sebuah imperatif untuk segera menemukan solusi alternatif dari konflik-konflik yang sudah dan sedang terjadi, khususnya di NAD. Munculnya isu pemekaran provinsi ALA dan ABAS kiranya dapat menjadi pemahaman terhadap realitas historis dalam rangka melihat arah transformasi etnik dan kesadaran kedaerahan serta kebangsaan di masa depan, dan tentu saja harus mampu menghindari disintegrasi wilayah yang berbeda etnik, sosial dan budaya dari dalam daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Puti Baumakkan Kabau

Cerita ini berasal dari masyarakat Aceh Selatan yang mengisahkan kehidupan seorang putri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya yang berwujud seekor kerbau. Dalam kisah ini kita dapat menyadari bahwa seorang anak harus selalu berbakti kepada orang tuanya walau bagaimanapun keadaan/kehidupan orangtuanya.

Ado sabuah pantun lamo : "Derek Derek turun kasamak Dari samak turun ke padi Dari nenek turun ka umak Dari umak turun ka kami" Baitulah Ibu-ibu, Bapak-bapak sadonyo. Kisah yang akan ambo caritakan ko sabuah carito pado zaman dahulu suatu maso pado suatu tampek. Disabuah dusun ta dapek sabuah padang rumpuik yang hijau, tumbuhan di situ tumbuhan yang disukai hewan-hewan di antaronyo saikua kabau batino, Indak jajuah dari padang rumpuik itu ado pulo danau ketek, di danau itulah hewan-hewan tu manikmati aie yang janiah, Didalamnyo ado pulo ba macam jenis lauak dan kiambang, tumbuhan yang marapung diateh aie pemandangan menjadi indah. Diantaro hutan di dakek padang rumpuik ado sabuah kehidupan yang belinduang di apitan batu di sabuik dengan guo batu. Guo tu macam sabuah rumah, ado pintu jo pangadan, tabuek dari batu. Dalam guo tu ado saikua kabau dan ka tigo urang anaknyo. Anak nyo tu katigonyo puti yang rancak, nan jelita, elok dan rupawan sopo itulah konon kisahnyo. Sang kabau yo sayang ke anak-anaknyo di agiahnyo makan dan minum yang cukup melalui aia susunyo. Juo kasiyah sayang yang tulus. Koklah malam sambiah malalokkan puti inyo pun ba dendang :

"Tidulah anak.....
Sibuahhati.....
Tidulah sayang.....
Umak dendangkan
Jangan manangih.....
Anak ku sayang

Tak diizinkan nyamuak manggigik anaknyo, tak di padiakan anaknyo di cilakoi oleh binatang bueh makonyo di andokkannya anak tu dalam guo batu. Pagi hari matohari tabik diufuak timua, fajar manyingsing matoari mulai ba sinar kabau pun basiap-siap untuak mencari makan. Makanan tu ado di padang rumpuik. Inyo

makan sakayang-kayangnyo, supaya susunyo menghasilkan makanan bergizi dan menmghasilkan ASI yang segar untuak ka tigo anaknyo. Bilo inyo nandak pai ka padang rumpuik inyo ba pasan ka pado anak-anak e. "Bilo umakndak ado jangan kalian bukakan pintu" yo Mak !! jawab anak-anaknyo. Untuak manandakan suaro umak nyo kabau tu mandendangkan sabuah syair. Kabau maimbau namo-namo anaknyo, namo yang elok dibarikan kapado anaknyo. Anak yang patamo dibari namo Puti Upang, yang sorang lai Puti Duanggo, sedangkan yang ketek di panggianyo dengan namo Puti Painau-inau Ati. Dipagi tu juo seperti biasonyo kabau manuju padang rumpuik kalua pintu lalu putri manyaoknyo kambali. Manjalang patang, matoari kembali ke paraduannyo hari pun hampia sanjo, sang kabau baranjak pulang ka guo, tampek mereka tu tingga. Tibo di muko pintu guo kabau badendang "Puti upang nak puti duanggo puti painau-inau ati iko umak nak alah pulang, mancari makan dari pagi lapeh sanjosyair itu diulangnyo sampai tiga kali. Barulah anak-anaknyo yakin baso yang pulang tu umaknyo, pintu guo dibuka greengngng

Anak mananti dengan sanang hati. Lah masuk umaknyo, pintu tatutup baliak. Saharian dinanti untuk mandapek makanan. Bailulah satiok hari. Pado suatu hari sorang anak Rajo paiburu. Ta sasek di hutan tu, hari pun hujan sang Pangeran bataduah di sampiang gua, dari malam sampai pagi. Suatu kejadian yang mambuek sang pengeran heran !! Saikua kabau kalua dari guo batu, Sawaktu pangeran maliek, inyo bukak matonyo laweh-laweh nampaklah oleh nyo katigo putri cako, tapi ba'alalah pintu guo tatutup baliak. Pangeran penasaran !!.....didakek nyo pintu guo itu hinyo tu heran manga pulo didalam tu ada putri rancak-rancak bana, pintu payah mambukaknyo karano tabuek dari batu, Sapanjang hari tu

Cerita Rakyat

pangeran taduduak basanda didinding batu. Manjalang patang sang kabau putang kaguo, nampak oleh pangeran lalu inyo barandok saketek supaya indak di caliak sang kabau. Mulailah kabau badendang "putri upang, putri duanggo puti painan inau ati.....iko umak alah pulang mencari makan dari pagi lapeh sanjo diulangnyo juo tigo kali...,pintu tabukak masuaklah kabau cako, Dendang tu didanga oleh sang pangeran dan diulang-ulang nyo O.....O.....itu bilo mandadak mambuka pintu itu ???! dihapa-hapanya dendang itu akan ambo cubo kato sang pangeran, Dengan sabar dan tabah disertai dengan rasa ingin tau pangeran menanti hingggo pagi hari. Pagi itu sang ibu melaksanakan tugasnyo yang rutin, menuju padang rumput. Pangeran mahapa dendang tu yang didanga nyo kapatang, kini dicubonyo badendang... .sabanyak tigo kali. Katigo puti taهران-heran puti painau-inau hati batanyo kapado kakak-kakaknyo!.

"Manga yo kak,...umak lakeh pulang, rasonya umak baru ajo pai ?!.....,dan manjalang patang baru pulang! Kakaknyo manjawab. Alan.....la mungkin ado yang umak lupokan sesuatu. Bukaklah JIM puti duanggo mambuka pintu.....Katigonyo iyo bana takajuik maliek di muko pintulah tagak seorang pangeran. Sang pangeran pun tabulalak matonyo mamandang katigo puti. Lalu menghampiri, Pangeran manyapo dan membari salam... Assalamu'alaikum.....alaikum salam jawab puti ba sarno-samo pangeran bakato lai "buliah ambo masuak? Silakanjawab katigpnyo. Perbincangan mengarah kapado ajakan sang pangeran untuak mambaok katigo puti ka istana nyo, katigo puti ma nyatujuinyo. Siang tu sadonyo maninggakan guo bajalan menuju rumah sang pangeran, Setelah bajalan jauh sampailah di istana pangeran. Manjalang sanjo pulo kabau kembali pulang ka guo, Tibo di muko pintu seperti biasonyo kabau badendang, balun abih dendang kabau tacangang maliek pintu guo alah tabukak! Di imbau-imbaunyo anaknya indak ado jawaban. Inyo yo baibo, inyo yo ba duka, jo badan nan litak lalu inyo ta tidua. Pagi harinyo badan kabau taraso

barek untuak dudua apo lai tagak. Aia mato maleleh, manangih taruih ta kana ka anak salagu itu sapanjang malam hingggo jatuh sakik, badan tambah kuruih. Keluarga istana manyambuik baiak ateh kadatangan katigo putri yang rancak-rancak. Mulai saat itu katigo puti menjadi keluarga istana di istana katigonyo dipalakuan layaknyo kehidupan manusia. Hari demi hari pa tumbuhan sang putri semangkin dewasa, hingggo pado suatu katiko puti upang dilamar oleh saudagar kayo di nagari tu yang mempunyai harato yang malimpah. Sedangkan puti duanggo di pasuntiing seorang rajo dari nagari subarang.

Puti painau inau ati itu sandiri dipasuntiing sang pangeran. Dari katigonyo puti tu cako pangeran hanya tertarik kapado puti painau inau ati, urangnyo rancak, lembut, elok budi bahasonyo, santun dalam berbicara iyo bana sesuai. Mahkota kerajaan diunjuak sang Raja pada sang pangeran karano ayah alah tuo, anak pun alah pantos di dinabatkan man jadi rajo. Apolai beristrakan seorang yang elok nan jelita nagari dipimpinnyo waktu itu yo bana makmur sentosa rakyatnyo, karano di pimpin oleh pemimpin bijaksana dakek jo rakyatnyo, Dalam guo batu kabau mangarang maimbau anaknyo, dengan ta tatiah-tatiah dicubonyo tagqk paralahan dicubonyo bajalan.... ia mulai bisa bajalan seketek-ketek nyo kalua dari guo tu. Untuk mencari anaknyo tekat nyo pun alah bulek, inyo bajalan taruih sampailah inyo ka ujuang Desa katano inyo sakik dan kuruih pulo tak kuat bajalan capek, inyo tak mahiraukan padang rumput tu lai yang biaso manyadiokan makanan lezat baginyo dan anak-anaknyo. Dengan tata tiah tatiah sampailah inyo dimuko sabuah rumah nan gadang job a paga tenggih, didakeknyo paga rumah gadangtu .Ditaman rumah gadang tu inyo maliek dayang-dayang dan putri tengah ba galak galang karano bahagianyo sang kabau labiah mandakek lai sahingggo nampak kesalah seorang dayang-dayang putri, lalu inyo mandakek tuk kabau. "Hai gadih nan rancak agiahlah ambo makan, paruih ambo alah lapa, ambo hauih, ambo alah jauh bajalan tolonglah nak !!! gadih tu takajuik gadih pun balari bajuo putri dan

mencari token hal yang baru dilek dan di danganyo cako. Putri maliek karah kabau tanpa bapikia panjang putri mahalau kabau sarato ma maki-maki, "kabau gilo, tak tau malu, minta makan kasiko !! pai..... kasitin, jajokambo maliekengkau !!!"

Dengan perasaan nan iyo bana hibo kabau tu pun pai, maleleh aia mato di pipi 'Sungguah malang nasib ambo' Ambo mencari anak ambo "kabau pun pai. Tangiang-ngiang di talingo nyo ucapan sang putri cako tapi inyo sempat maliek muko putri tu "apokah itu anak ambo ?1 tapi manga inyo sampo itu terhadap ambo" ruponyo sang putri pun tau baso itu umaknyo. Tapi inyo malu baumakkan kabau. Puti tu adolah puti upang, Kabau pun bajalan tarus kini, malewati j'alan yang baliku-liku. Hari kahari perjalanan itu tibolah di sabuah keramaian, suaro gadih-gadiah sadang bamain di halaman rumah Rajo ada yang ma numuak-numbuak padi, ada yang bakaja-kajaran dan banyak lai yang lainnyo ruponyo, gadih tu adolah dayang-dayang puti Duanggp. Kabau maimbau salah sorang gadih tu. "Hai nak barilah ambo makan, amboko, alah bahari-hari indak makan, alah bahari-hari pula bajalan", engkau nandak kama ? tanyo gadih tu "ambo mencari anak ambo yang hilang antah kama" kalau baetu sabanta, ambo sampaikan pada puti, Gadih pun balari manghadok puti, lalu mencari tokannyo, "apo II minta makan ?!l, qiahtu mencari anaknyo ?!ll, puti Duanggo berang tanpa pikia panjang Duanggo maambiek alu, di libekannyo ka badan dan ka kaki kabau, Kabau manukiak dek sakih "sakik bana, patah kaki ambo" inyo pun di usia oleh puti Duanggo. Duanggo juo tau, baso itu umaknyo tapi inyo malu baumakkan kabau. Caci maki pun kalua dari mulluiknyo "kabau tak tau malu, alah sakik kuruih busuak dan banyak lai koto-koto cacian yang dikaluakannyo. Dengan kaki tengkaknyo kabau malanjuikkan perjalannyo kini menelujuri lembah dan bukit dengan kaki tengkak perjalan taraso jauh. Tibo disabuah taman, ditaman tu ado pohon yang sangat rindang dibawah batang tu taduah. Sang kabau manuju ka bawah batang tu ...kabau ba bisiak dalam hati "lamaknyo

disiko. Udar taraso sajuak, lapeh pulo litak awak setalah bajalan jauh sambil bersandar pada pohon tu, ingetannyo incision pado ka tigp anaknyo. Ditaman tu cako ada sakawan gadih-gadiah rupanyo dayang-dayang dan puti. Diantoro sakian banyak puti di situ ruponyo ada sorang puti rajo yang rancak, maliek ado saikua kabau basanda dibawah pohon, kabau yang kuruih karing. Puti mendakek dan ta ragu, puti mamacik tubuh kabau dan mengausuak kaki yang sakik. Kabau mepadiakan badannyo dipacik dan kakinyo dikusuk kusuak antaro taraso jo tidak karano kabau lalok-lalok indak. Sang puti maimbau panglimo dan prajurid untuak mambaok kabau yang sakik ke istana, Satibonyo di istana puti tu ruponyo puti painau-inau ati. Inyo mancaritokan kapado suaminyo, Sang raja mangingek-ingek kejadian. Koto puti Duanggo "itu adolah umak ambo kakanda" ruponyo rajo jua ta ingek kajadian yang lalu. "Kafau baetu iko juo umak ammo koto Rajo. Puti tak dapek Manahan tangihnyo mandanga pengakuan suaminyo yang sarupo itu inyo basyukur kapado Allah yang alah mambari inyo suami yang bijaksana. Lalu kaduonyo mancium kabau tu, sesaat kemudian kabau mambuka matonyo mamandang puti painau-inau ati, tapi tidak lamo sasudah itu matonyo tatutup lai ruponyo inyo maucapkan Isalamat tingga kapado anaknyo, hajalnya pun tibo. innalillahi wainalillahi rajium. Puti manangih ta sadu-sadu, taingek waktu yang lampau maso tingga jo umak kandung ta cinto. Pamakaman pun dilaksanakan layaknya pemakaman manusia, kabau di kabumikan di sampiang istana tak lamo sasudah itu tumbualah dipusara tu. Sabatang tumbuhan yang buahnyo kapiang-kapiang amen, ameh tu dibagi-bagikan kek rakyat yang miskin. Ruponyo tabatiak carito dari muluik kamuluik ka talingo puti upang dan puti Duanggo, baso di kerajaan pangeran ado batang ameh, inyo nandak mananamnyo pulo di tampeknyo waktu upang dan duanggo mamacik buah tu, buah tu pun baubah manjadi buah mingkudu yang busuak bilo puti inau-inau ati mamacik buah tu tatok ameh.



Dari
**BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN
NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH**

***Pengungkapan dan Pengkajian Latar belakang Isi Manuskrip Tambah Tujoh ,
Teuku Abdullah, 216 + iii halaman, 2007***

Tambah termasuk salah satu dari tiga bentuk sastra Aceh yang dianggap lebih penting oleh para ulama dan pujangga Aceh tempo dulu. Dua jenis lainnya ialah hikayat dan nadham. Tembeh disusun dalam bentuk puisi atau syair Aceh yang berisi ajaran-ajaran yang berhubungan dengan tuntunan hidup secara islami seperti tauhid, hokum, akhlak, pendidikan, tasawuf dan filsafat. maka kitab tambah biasa dinamakan karya sastra agama atau hikayat agama.

Sesuai dengan namanya, naskah *Tambah Tujoh* berisi tujuh topik permasalahan utama. Tambah tujoh merupakan karya sastra zaman dahulu yang berisikan ajaran-ajaran agama, pendidikan, etika (moral), kesehatan dan kedokteran. Ini menandakan keadaan kehidupan masyarakat Aceh pada masa lampau tidak hanya bergelut dengan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan.

Melalui buku *Pengungkapan dan Pengkajian Latar belakang Isi Manuskrip Tambah Tujoh* diharapkan generasi muda dapat lebih memahami lagi makna-makna yang terkandung dalam naskah *tambah tujoh* ini, sebagai rujukan atau dapat dijadikan tuntunan dalam kehidupan. (Ag)

BPNB ACEH
Koleksi Perpustakaan



B P N B - 5 1 1 4

